



KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU

RENSTRA

Kanwil Kementerian Agama
Provinsi Bengkulu

Tahun 2025 s/d 2029



<https://bengkulu.kemenag.go.id>

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala karunia, hidayah dan kekuatan yang diberikan-Nya, sehingga dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tahun 2025-2029 dengan baik.

Renstra Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu disusun berpedoman pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.

Penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu 2025-2029 diselesaikan oleh Tim yang dibentuk dengan melibatkan seluruh Stakeholder internal Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 menjadi acuan penyusunan Renstra di Tingkat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan Renstra Satuan Kerja Madrasah se-Provinsi Bengkulu.

Dengan telah selesainya disusun Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi guidance/ panduan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan rencana kinerja, rencana kegiatan ataupun rencana anggaran di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Satuan Kerja Madrasah.

Bengkulu, 20 Januari 2026

Kepala,



Saefudin



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
BENGKULU
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU,

Menimbang : bahwa Bahwa sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor : B-117/SJ/B.I.1/OT.01.1/08/2025 Tanggal 7 Agustus 2025 tentang Penyusunan Renstra Kementerian Agama, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu tentang Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran;

4. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

6. Peraturan Menteri Agama No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertika Kementerian



Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1361 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2025 tentang Rencana Strategi kementerian Agama tahun 2025-2029

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 – 2029.

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk:

- a. Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
- b. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;
- c. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 20 Januari 2026

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
BENGKULU,



SAEFUDIN

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
SURAT KEPUTUSAN	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum	2
1.1.1. Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu 2020- 2024	2
1.1.1.1. Hasil Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	2
1.1.1.2. Hasil Pelaksanaan Anggaran Periode Tahun 2020-2024.....	28
1.1.2. Hasil Aspirasi Masyarakat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	32
1.1.2.1. Pemenuhan Kebutuhan Publik:Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi	32
1.1.2.2. Layanan Publik : Komitmen membangun zona integritas, layanan PTSP dan Layanan PPID.....	36
1.1.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama.....	40
1.1.4 Aspirasi dan Isu Strategis	41
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	41
1.2.1. Potensi yang dimiliki	41
1.2.2. Permasalahan yang dihadapi	42
1.2.3. Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)	43
1.2.3.1. Implikasi Strategis	44
1.2.3.2. Matriks Strategis Turunan SWOT (SO-ST-WO-WT)	44

BAB II

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran46

- 2.1. Visi dan Misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu46
- 2.2. Tujuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu46
- 2.3. Sasaran Kegiatan49
- 2.4. Manajemen Resiko Pembangunan Nasional (MRPN).....58
- 2.5. Rumusan Pengukuran/ Metadata72

BAB III

TARGET, KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....92

- 3.1. Target Kinerja92
- 3.2. Kerangka Pendanaan101

BAB IV

PENUTUP106

LAMPIRAN107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Grafik Capaian Kinerja Tahun 2020-2024	27
Gambar 2	Bagan Organisasi Kanwil Berdasarkan PMA No. 6 Th. 2022	34
Gambar 3	Dokumentasi Fasilitas Layanan Publik	36
Gambar 4	Membangun Komitmen Zona Integritas Antara Pimpinan dan ASN di Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu melalui banner dan baliho	37
Gambar 5	Membangun Komitmen Zona Integritas melalui pembinaan eksternal dan monitoring daerah	37
Gambar 6	Penguatan Zona Integritas di Lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu, melalui sinergi dan pembinaan	38
Gambar 7	Kegiatan Evaluasi PPID Kantor Kemenag Kab/kota	38
Gambar 8	Publikasi Data Statistik	39
Gambar 9	Sertifikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Tahun 2022	39
Gambar 10	Sertifikat Informatif dari Kementerian Agama Tahun 2023	40
Gambar 11	Sertifikat Informatif dari Menteri Agama RI	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Pegawai Tahun 2020-2024 Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu	28
Tabel 2	Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Barang Tahun 2020-2024 Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.....	29
Tabel 3	Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Modal Tahun 2020-2024 Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu	29
Tabel 4	Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BanSos Tahun 2020-2024 Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.....	29
Tabel 5	Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Total Belanja Tahun 2020-2024 Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu	30
Tabel 6	Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Pegawai Tahun 2020-2024 Satker Kemenag Se-Provinsi Bengkulu	30
Tabel 7	Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Barang Tahun 2020-2024 Satker Kemenag Se-Provinsi Bengkulu	31
Tabel 8	Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Modal Tahun 2020-2024 Satker Kemenag Se-Provinsi Bengkulu	31
Tabel 9	Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BanSos Tahun 2020-2024 Satker Kemenag Se-Provinsi Bengkulu	31
Tabel 10	Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Total Belanja Tahun 2020-2024 Satker Kemenag Se-Provinsi Bengkulu.....	32
Tabel 11	Data ASN berdasarkan PNS Dan PPPK Se-Provinsi Bengkulu.....	35
Tabel 12	Data PNS berdasarkan Golongan Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2025	35
Tabel 13	Data PPPK berdasarkan Jabatan Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2025	35
Tabel 14	Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan Dan Luas Wilayah Se-Prov. Bengkulu	35
Tabel 15	Data Jumlah Satker Berdasarkan DIPA se-Provinsi Bengkulu	36
Tabel 16	Tabel SWOT Analisis	43

Tabel 17	Tabel Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT)	44
Tabel 18	Sasaran Kegiatan Dan Indikator Sasaran Kegiatan berdasarkan / Rujukan SK Dan IKSK Eselon-1 (Bidang Agama).....	51
Tabel 19	Sasaran Kegiatan Dan Indikator Sasaran Kegiatan Berdasarkan / Rujukan SK dan IKSK Eselon-1 (Bidang Pendidikan)	53
Tabel 20	Sasaran Kegiatan dan Indikator Sasaran Kegiatan Berdasarkan / Rujukan SK Dan IKSK Eselon-1 (Bidang Tata Kelola).....	56
Tabel 21	Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) Renstra Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – 2029	60
Tabel 22	Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – 2029.....	73
Tabel 23	Target Kinerja Tahun 2025 – 2029.....	94
Tabel 24	Kerangka Pendanaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu	102

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 dilakukan dengan pendekatan teknokratik, yaitu menggunakan analisis ilmiah dan data empiris untuk menghasilkan perencanaan yang rasional, terukur, dan berorientasi pada hasil. Pendekatan ini memastikan bahwa arah kebijakan, tujuan, sasaran, dan program kerja Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu selaras dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan zaman, serta kerangka pembangunan nasional dan sektoral.

Secara yuridis, penyusunan Renstra ini mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan, juga terjadi saling keterkaitan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, keterkaitan antara Renstra K/L dengan RPJMN
Keterkaitan Renstra K/L dengan RPJMN, seperti yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) bahwa dalam penyusunan Renstra K/L berpedoman pada dokumen RPJMN. Renstra K/L memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kementerian/ Lembaga yang merupakan penjabaran RPJMN dan bersifat indikatif.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional pada pasal 20 ayat (2), Keterkaitan antara Renja dengan Renstra yaitu bahwa Rancangan Renja-KL memuat kebijakan, program, kegiatan dan Keluaran (Output) sebagai penjabaran Renstra-KL.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023, Keterkaitan antara RKA-KL dengan Renja yaitu berdasarkan pasal 58 ayat (1), tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan bahwa RKA-K/L disusun berdasarkan RKP, Renja K/L, Pagu Anggaran K/L, dan Standar Biaya.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2021 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, keterkaitan antara Renstra dan RKA-KL dengan Perjanjian Kinerja dan laporan Kinerja yaitu setiap satuan kerja menyusun lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran serta mencantumkan Sasaran, Indikator Kinerja, dan Target Kinerja berdasarkan Rencana Strategis satuan kerja serta Laporan Kinerja Tahunan paling tidak memuat perencanaan strategis, pencapaian

sasaran strategis instansi pemerintah, realisasi pencapaian sasaran strategis dan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja.

5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1100 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029.

Dari dasar Hukum tersebut, Renstra dan Perjanjian Kinerja berkaitan erat dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Untuk Menyusunnya, Pegawai wajib melakukan dialog kinerja dengan Pimpinan untuk menetapkan dan mengklarifikasi Ekspektasi dengan memperhatikan pada Gambaran Keseluruhan Organisasi pada Dokumen Rencana Strategis Instansi/Unit Kerja dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja.

Dengan landasan pendekatan teknokratik ini, Renstra 2025–2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan administratif, tetapi juga menjadi instrumen manajemen yang efektif untuk mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Provinsi Bengkulu secara lebih terukur, akuntabel, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

1.1. Kondisi Umum

Pada kondisi umum ini menjelaskan tiga hal. Yang pertama menjelaskan Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada tahun 2020–2024. Yang kedua memaparkan Hasil Aspirasi Masyarakat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dan yang ketiga menjelaskan tentang Aspirasi dan Isu Strategis di Lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu.

1.1.1. Hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2020–2024

Pada hasil Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan ini dijelaskan dua hal : Hasil Capaian Kinerja Tahun 2020-2024 dan Hasil Pelaksanaan Anggaran Periode Tahun 2020–2024

1.1.1.1. Hasil Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

Dalam mendukung capaian Tujuan pada Rencana Strategis Kementerian Republik Indonesia Tahun 2020-2025, yang terdiri dari :

1. Peningkatan Kualitas Umat Beragama dalam Menjalankan Ibadah Ritual dan Sosial.
2. Penguatan Kualitas Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.
3. Peningkatan Umat Beragama yang Menerima Layanan Keagamaan.
4. Peningkatan peserta didik yang memperoleh layanan pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berkualitas.
5. Peningkatan Budaya Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Melayani dan Responsif.

2. Renstra Kanwil Kemenag Bengkulu 2025-2029

Juga dalam rangka ikut mewujudkan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia, yang terdiri dari :

1. Meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama
4. Meningkatnya pemanfaatan ekonomi keagamaan umat
5. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran
6. Meningkatnya kualitas pemerataan akses pendidikan
7. Meningkatnya pengelolaan dan penempatan pendidik
8. Meningkatnya kualitas penjaminan mutu pendidikan
9. Meningkatnya kualitas mental/karakter siswa
10. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel

Serta dalam rangka ikut mewujudkan Sasaran Program Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia, yakni :

1. Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama.
2. Menurunnya frekuensi isu-isu kerukunan umat beragama.
3. Meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama.
4. Meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama.
5. Menguatnya sistem pendidikan yang berperspektif moderat.
6. Menurunnya aksi konfrontatif terhadap tradisi dan ritual budaya dengan mengatasnamakan agama
7. Meningkatnya kualitas layanan administrasi dan literatur keagamaan.
8. Terwujudnya penyelenggaraan ibadah haji yang transparan dan akuntabel.
9. Meningkatnya kualitas penerimaan dana sosial keagamaan.
10. Meningkatnya kualitas asesmen dan kemampuan berpikir siswa.
11. Meningkatnya partisipasi peserta didik pada satuan pendidikan.
12. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
13. Meningkatnya kualitas guru yang memenuhi SNP.
14. Meningkatnya kualitas standar dan sistem penjaminan mutu pendidikan,
15. Menguatnya pendidikan karakter siswa.
16. Meningkatnya tata kelola organisasi Unit Eselon 1 yang efektif dan akuntabel.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dalam Rencana Strategis periode tahun 2020 - 2024 telah menetapkan 48 Sasaran Kegiatan (SK) dan 122 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) serta Hasil Evaluasi Pelaksanaannya dalam rangka ikut

mewujudkan 15 (lima belas) Sasaran Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020–2024

Untuk menggambarkan keterkaitan kinerja pada Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mulai : Visi, Misi, Sasaran Strategis (SS), Sasaran Program (SP), Sasaran Kegiatan (SK) sampai pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dapat dilihat pada diagram. Diagram dimaksud lebih menekankan penggambaran alur capaian IKSK ke SK dalam rangka ikut mewujudkan Sasaran Program (SP).

Selama lima tahun terakhir, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan 48 sasaran kegiatan dan 122 indikator kinerja. Ruang lingkup kerja yang luas ini mencakup hampir seluruh aspek kehidupan keagamaan masyarakat: mulai dari pembinaan umat, penguatan lembaga pendidikan, peningkatan kualitas guru, pengelolaan zakat dan wakaf, pelayanan keluarga melalui KUA, hingga tata kelola organisasi. Capaian dari seluruh indikator ini memperlihatkan dinamika yang menarik. Pada tahun 2020 capaian berada di angka 92,10%, kemudian menurun pada 2021 menjadi 81,85% akibat pandemi, naik lagi pada 2022 dengan capaian 91,87%, turun sedikit pada 2023 91,79%, dan ditutup dengan 100,87% pada 2024. Jika dihitung rata-rata selama lima tahun, capaian kinerja berada di angka **92,92%**. Angka ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program sekaligus adaptasi yang baik terhadap perubahan kondisi.

Untuk melihat evaluasi program melalui aplikasi SIPKA dapat diuraikan sebagai berikut:

1. SK 1 : Meningkatnya kualitas kinerja penyuluhan agama

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
1	Meningkatnya kualitas kinerja penyuluhan agama	Nilai kinerja penyuluh agama	91,60	90,32	96,56
		Persentase penyuluh agama yang dibina	94,80	90,62	92,10
		Jumlah penyiur agama yang dibina kompetensi	597,60	523,00	91,90
		Jumlah kelompok binaan penyuluh yang diberdayakan	1866,20	1912,20	103,40

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas kinerja penyuluhan agama pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menunjukkan hasil yang baik sekali. Nilai kinerja penyuluh agama mendekati target dengan capaian 96,56%. Persentase penyuluh agama yang dibina juga mendekati target dengan capaian 92,62%. Jumlah penyiur agama yang dibina juga mendekati target dengan capaian 91,90% dengan rata-rata 523 binaan per tahun. Sedangkan jumlah kelompok binaan

4. Renstra Kanwil Kemenag Bengkulu 2025-2029

penyuluh yang diberdayakan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan capaian 105,50%.

2. SK 2: Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dalam hak beragama

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dalam hak beragama	Persentase Jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindalanjuti	89,50	94,50	105,50
		Jumlah aktor kerukunan yang dibina	63,00	63,00	100,00
		Jumlah desa sadar kerukunan yang dibina dalam perlindungan hak beragama	5,80	1,60	45,10

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas pelayanan perlindungan umat beragama dalam hak beragama memiliki peningkatan yang baik sekali dari tahun ke tahun. Jumlah kasus pelanggaran hak beragama melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 105,5%. Jumlah aktor kerukunan yang dibina juga sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan rata-rata 63 orang per tahun. Meskipun ditahun 2020 kedua indikator tersebut belum terlaksana, namun di tahun selanjutnya dilakukan secara maksimal. Sedangkan, jumlah desa sadar kerukunan yang dibina dalam perlindungan hal beragama masih cukup jauh dibawah target dengan capaian 45,10%. Hal tersebut terjadi karena terbatasannya demografi/unsur agama yang ada pada kab/kota di Provinsi Bengkulu.

3. SK : Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
3	Menguatnya peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina	324,80	274,60	90,34
		Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan	8,00	7,40	92,22

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa tergolong baik sekali. Jumlah lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina mendekati target yang telah ditetapkan dengan capaian 90,34%. Jumlah forum dialog antar umat beragama yang diselenggarakan juga mendekati target yang telah ditetapkan dengan rata-rata 7,4 forum pertahun.

4. SK : Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
4	Menguatnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP	97,20	96,60	98,40

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menunjukkan hasil yang baik sekali. Persentase Sekber FKUB yang ditingkatkan layanannya melalui BOP mendekati target yang telah ditetapkan dengan capaian 98,40%.

5. SK : Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
5	Meningkatnya kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama	92,60	92,36	98,08
		Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan	10,00	9,40	96,67

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas pembinaan kerukunan intra umat beragama menunjukkan hasil yang baik sekali. Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang dibina kerukunan intra umat beragama mendekati target yang telah ditetapkan dengan capaian 98,08%. Jumlah forum dialog intra umat beragama yang diselenggarakan juga mendekati target yang telah ditetapkan dengan rata-rata 9,40 forum per tahun.

6. SK : Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja			
----	------------------	-------------------	--	--	--

6. Renstra Kanwil Kemenag Bengkulu 2025-2029

			Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
6	Meningkatnya kualitas moderasi beragama penyuluh agama	Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat	92,60	88,56	94,26

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas moderasi beragama penyuluh agama menunjukkan pencapaian yang baik sekali. Persentase penyuluh agama yang berwawasan moderat mendekati target yang telah ditetapkan dengan capaian 94,26%.

7. SK: Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
7	Meningkatnya pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase rumah ibadah yang ramah	68,20	63,04	94,24
		Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina	53,80	58,80	95,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran menunjukkan hasil yang baik sekali. Persentase rumah ibadah yang ramah mendekati target yang telah ditetapkan dengan rata-rata 63,04 per tahun. Persentase pengelola rumah ibadah yang dibina juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun dengan capaian 95%.

8. SK : Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
8	Meningkatnya kegiatan penyiaran agama di ruang publik	Jumlah siaran keagamaan yang berwawasan moderat di media massa dan ruang publik	39,60	11,40	76,47

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik menunjukkan hasil yang baik. Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama mendekati target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 90%. Persentase siswa di sekolah umum dan sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama mendekati target yang telah ditetapkan dengan capaian 91,60%. Persentase guru di madrasah yang dibina dalam

moderasi beragama juga tergolong baik dengan rata-rata 84 guru madrasah yang dibina pertahun. Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum dan sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama juga mendekati target dengan rata-rata 85,80 guru pertahun. Sedangkan persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama dan persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama masih cukup jauh dari target yang telah ditetapkan dengan masing-masing capaian 68% dan 67,48%. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembinaan moderasi beragama pada pengawas pendidikan baik dimadrasah maupun di sekolah umum masih perlu ditingkatkan.

9. SK: Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran

9	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
9	Menguatnya muatan moderasi beragama dalam mata pelajaran agama di ruang publik	Persentase siswa di madrasah yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	264,00	74,00	90,00
		Persentase siswa di sekolah umum dan sekolah keagamaan yang memperoleh pendidikan agama yang bermuatan moderasi beragama	81,60	75,60	91,60
		Persentase guru di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	88,00	84,00	96,00
		Persentase guru pendidikan agama di sekolah umum dan sekolah keagamaan yang dibina dalam moderasi beragama	87,40	85,80	94,80
		Persentase pengawas pendidikan agama di madrasah yang dibina dalam moderasi beragama	97,00	65,00	68,00
		Persentase pengawas pendidikan agama di sekolah umum yang dibina dalam moderasi beragama	87,60	60,00	67,46

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam menunjukkan hasil yang baik sekali. Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan Al Qur'an mendekati target yang telah ditetapkan dengan capaian 95,38%.

10. SK : Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam

8. Renstra Kanwil Kemenag Bengkulu 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
10	Menguatnya peran pendidikan diniyah dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama Islam	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah dan pendidikan AlQur'an	85,00	82,00	95,38

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Dialog lintas agama dan budaya menunjukkan hasil yang baik. Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan rata-rata 1,20 dialog pertahun dengan capaian 70%.

11. SK : Menguatnya dialog lintas agama dan budaya

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
11	Menguatnya dialog lintas agama dan budaya	Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan	3,20	1,20	70,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Dialog lintas agama dan budaya menunjukkan hasil yang baik. Jumlah dialog lintas agama dan budaya yang diselenggarakan rata-rata 1,20 dialog pertahun dengan capaian 70%.

12. SK: Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
12	Meningkatnya pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat	Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak)	5,80	3,40	77,27

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Pelestarian dan optimalisasi produk budaya berbasis agama untuk meningkatkan kesejahteraan umat menunjukkan hasil yang baik. Jumlah produk budaya berbasis agama yang memberikan manfaat terhadap kesejahteraan umat (Wisata religi, Situs, Artefak) memiliki rata-rata 3,40 produk pertahun dengan capaian 77,27%.

9. Renstra Kanwil Kemenag Bengkulu 2025-2029

13. SK : Meningkatnya Pemanfaatan Perayaan Keagamaan dan Budaya untuk memperkuat toleransi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
13	Meningkatnya Pemanfaatan Perayaan Keagamaan dan Budaya untuk memperkuat toleransi	Jumlah Event Keagamaan dan Budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan)	8,40	7,40	90,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Pemanfaatan Perayaan Keagamaan dan Budaya untuk memperkuat toleransi menunjukkan hasil yang baik sekali. Jumlah Event Keagamaan dan Budaya yang menumbuhkembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan) memiliki rata-rata 7,40 event pertahun dengan capaian 90% mendekati target yang telah ditetapkan.

14. SK : Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
14	Meningkatnya penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama	Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll)	4,00	4,40	111,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Penghormatan atas keragaman budaya yang merupakan wujud dari implementasi pengamalan nilai agama menunjukkan hasil yang sangat baik. Jumlah kegiatan ekspresi budaya yang mengandung nilai agama (contoh Pesparawi MTQ, STQ, Ustawa dll) melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian 111%.

15. SK: Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
----	------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------

15	Meningkatnya kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan	Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan	11,04	12,04	98,01
		Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan	1742,00	2100,60	144,57
		Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan;	79,00	108,20	142,31
		Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran arah kiblat;	42,80	49,40	97,83

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas sarana pendukung pelayanan keagamaan menunjukkan hasil yang sangat baik. Jumlah sarana dan prasarana layanan peribadatan yang disediakan memiliki capaian 98,01%. Jumlah kitab suci dan buku keagamaan yang disediakan memiliki rata-rata 2100,60 kitab suci dan buku keagamaan pertahun dengan capaian 144,57%. Jumlah bimbingan layanan syariah yang disediakan juga menunjukkan hasil yang melebihi target dengan capaian 142,31%. Jumlah masjid/mushalla yang terfasilitasi pengukuran mendekati target yang telah ditetapkan dengan capaian 97,83%.

16. SK: Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
16	Meningkatnya kualitas pelayanan nikah / rujuk	Jumlah Pembangunan gedung KUA	4,80	4,60	96,60
		Jumlah rehab gedung KUA	8,60	6,20	76,73
		Jumlah pengadaan lahan dan sertifikat tanah KUA	7,80	1,60	46,00
		Jumlah pengadaan sarana prasarana KUA	15,60	16,80	220,00
		Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah	3500,30	8069,68	293,04
		Jumlah Buku dan Kartu Nikah yang disediakan	17406,70	15634,10	171,33

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas Pelayanan Nikah dan rujuk Pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menunjukan hasil yang sangat baik. Jumlah Pembangunan gedung KUA menunjukan hasil yang hampir mendekati target dengan capaian 96,60%.Jumlah rehab gedung KUA dengan rata-rata 6,20 rehab pertahun.Jumlah pengadaan lahan dan sertifikat tanah KUA belum cukup mencapai target hanya rata-rata1,60 perlahan yang bersertifikat. Jumlah pengadaan sarana prasarana KUA dari yang ditargetkan mencapai 220,00% dengan capaian sangat baik.Jumlah calon pengantin yang memperoleh fasilitas kursus pra nikah yang

target mencapai rata-rata 8069,68 calon pengantin pertahun mencapaian 293,04% capaian sangat baik. Jumlah Buku dan Kartu Nikah yang disediakan pertahun dengan rata-rata 15634,10 pertahun dengan capaian 171,33% sangat baik.

17. SK: Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
17	Meningkatnya kualitas pelayanan bimbingan keluarga	Jumlah keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga sakinah/kristiani/bahagia/sukinah/ hitta sukhaya	7099,80	6486,60	137,46

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas pelayanan bimbingan keluarga memiliki capaian sangat baik 137,46% dari keluarga yang memperoleh bimbingan keluarga dengan sakinah/ kristiani/ bahagia/ sukinah/ hitta/ sukhaya dengan rata-rata 6486,60 keluarga pertahun.

18. SK: Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
18	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus	Persentase Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang terbina dan terawasi	94,00	97,00	97,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah umrah dan penyelenggara ibadah haji khusus dengan persentase penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh yang terbina dan terawasi dengan rata-rata 97,00 dengan capaian baik sekali.

19. SK : Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
19	Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan	98,00	97,40	99,20

	pendaftaran ibadah haji	Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan	2,80	21,00	80,00
--	-------------------------	--	------	-------	-------

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas Pelayanan pendaftaran ibadah haji di asrama haji dengan Persentase pusat layanan haji yang memenuhi standar pelayanan mencapai 99,20% dengan rata-rata 97,40 pusat pelayanan pencapaian pertahun baik sekali. Persentase calon jemaah haji yang batal diberangkatkan pada tahun bersangkutan dari rata-rata 21,00 calon jemaah mengalami peningkatan menjadi 80.00%.

20. SK : Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
20	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji	Persentase asrama haji yang memenuhi standar	96,00	99,40	99,80
		Persentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu	90,00	79,80	79,80

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas pelayanan jemaah haji di asrama haji Persentase asrama haji yang memenuhi standar dengan rata-rata 99,40 dengan capaian sangat baik yaitu 99,80% pertahun. Presentase pelayanan transportasi jemaah haji yang tepat waktu dengan hasil rata-rata 79,80 dan capaian 79,80% baik.

21. SK: Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
21	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji	82,00	79,80	79,80
		Persentase petugas haji yang professional	96,00	99,80	99,80
		Persentase Pembimbing Haji yang bersertifikat	90,00	74,20	76,20

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas pembinaan jemaah haji Persentase jemaah haji yang mengikuti manasik haji dengan capaian 79,80% dari rata-rata 79,80 jemaah haji capaian yang baik. Persentase petugas haji yang professional dari rata-rata 99,80 pertahunnya mencapai 99,80% dengan hasil Baik sekali. Persentase Pembimbing Haji yang bersertifikat dari hasil rata-rata 74,20 pertahunnya mencapai 76,20 % dengan hasil Baik.

13. Renstra Kanwil Kemenag Bengkulu 2025-2029

22. SK : Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
22	Meningkatnya pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu	Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service)	100,00	99,60	99,60

Pengelolaan data dan sistem informasi haji terpadu Persentase keberlanjutan layanan (Continuity service) dari hasil rata-rata 99,60 dengan capaian 99,60% pertahunnya capaian hasil baik sekali

23. SK: Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
23	Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat	Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi	85,00	75,00	79,78
		Persentase lembaga zakat yang dibina	96,60	92,60	95,78
		Persentase Lembaga Zakat yang terakreditasi sesuai syariah	79,00	95,00	100,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Pengelolaan dan pembinaan pemberdayaan dana zakat Persentase amil yang memiliki sertifikat kompetensi dengan rata-rata 75,00 mencapai 79,78% pertahunnya dengan hasil Baik.Persentase lembaga zakat yang dibina nilai rata-rata 92,60 dengan capaian 95,78% hasil yang baik sekali.Persentase Lembaga Zakat yang terakreditasi sesuai syariah mengalami peningkatan dari rata-rata 95,00 mencapai 100% pertahunnya dengan capaian sangat baik.

24. SK: Meningkatnya pengelolaan aset wakaf

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
24	Meningkatnya pengelolaan aset wakaf	Persentase lembaga wakaf yang dibina	77,00	95,20	100,20
		Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan	88,00	81,00	90,00
		Persentase tanah wakaf yang bersertifikat	87,00	78,60	87,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Pengelolaan aset wakaf menunjukkan hasil yang baik sekali. pengelolaan aset wakaf melebihi target dengan capaian 100.20%. Sedangkan Persentase akta ikrar wakaf yang diterbitkan dengan capaian 80.00% dan Persentase tanah wakaf yang bersertifikat memperoleh rerata capaian 87.00%.

25. SK: Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
25	Meningkatnya kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif	Persentase Madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum	84,00	90,60	103,36
		Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum;	78,00	62,00	80,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas penerapan kurikulum dan metode pembelajaran inovatif menunjukkan hasil yang baik sekali. Persentase Madrasah yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum melebihi target dengan capaian 103.36%. Persentase sekolah keagamaan yang menerapkan metode pembelajaran inovatif dalam kurikulum dengan capaian 80.00%.

26. SK : Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
26	Meningkatnya kualitas penilaian Pendidikan	Persentase guru /ustadz di madrasah/pendidikan keagamaan/sekolah umum yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan	94,00	78,00	80,00
		Jumlah penghargaan bagi guru dan tenaga kependidikan pada Madrasah/Pendidikan Keagamaan	6,20	3,60	62,67

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kegiatan guru/ustadz di Madrasah /Pendidikan Keagamaan /Sekolah Umum yang dinilai kinerjanya sebagai dasar penetapan tunjangan 80 % menunjukkan hasil baik. sedangkan target menunjukkan 94. untuk jumlah penerima penghargaan menunjukkan hasil cukup 62,67 dari jumlah 620.

27. SK: Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
27	Meningkatnya penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran	Persentase madrasah/ pendidikan diniyah/muadallah yang menerapkan TIK untuk e-pembelajaran	78,00	66,00	77,60
		Persentase mata pelajaran yang menggunakan bahan belajar berbasis TIK untuk e-pembelajaran	76,00	75,00	91,87

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pembelajaran pada Madrasah/Diniyah /Muadallah yang telah menerapkan TIK untuk e pembelajaran menunjukkan capaian 77,60 % kategori Baik dari target 78 sedangkan mata pelajaran yang menggunakan TIK menunjukkan hasil sangat Baik 91,87 dari target 76

28.SK : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
28	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana	1261,00	1210,00	93,40
		Persentase MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	74,40	78,00	98,40
		Persentase MTs/Wustha/ SMPTK/Madyama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	80,40	74,40	90,40
		Persentase MA/Ulya/SMTK/ SMAK/Utama Widya Pasraman yang memenuhi SPM sarana prasarana	87,20	85,80	88,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas sarana dan prasarana pendidikan sarana RA/Pratama Widya Pasraman/Taman Seminari/ Nava Dhammasekha yang memenuhi SPM sarana prasarana menunjukkan hasil Sangat baik 93,40 % dari target , untuk sarana dan Prasarana menunjukkan hasil sangat baik 98,40 dari target 74,40 , sedangkan untuk SPM sarana Prasarana menunjukkan hasil Sangat Baik 90,40 dari target 80, 40 kemudian MI/Ulya /SMTK/Madyana Widya Pasraaman yang Memenuhi SPM Sarana Prasarana menunjukkan hasil Baik Sekali 88,00 dari target 87,20.

16. Renstra Kanwil Kemenag Bengkulu 2025-2029

29. SK: Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
29	Meningkatnya pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat	Jumlah siswa MI penerima BOS	16140,98	17126,60	103,99
		Jumlah siswa MTs penerima BOS	42882,83	13184,60	93,58
		Jumlah siswa MA penerima BOS	7578,90	7499,80	102,04
		Persentase siswa MI penerima PIP	46,20	66,00	94,00
		Persentase siswa MTs penerima PIP	52,00	59,40	85,80
		Persentase siswa MA penerima PIP	48,40	54,80	84,00
		Persentase Pondok Pesantren yang mendapatkan bantuan operasional	48,00	47,00	80,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Pemberian bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu, daerah afirmasi, dan berbakat Bos MI menunjukkan hasil sangat Baik 103,99 % dari target jumlah Siswa 16.140.98 untuk Bos MTs menunjukkan hasil Baik sekali 93,88 dari target 42.882.83 untuk tingkat MA menunjukkan hasil sangat Baik 102,04 % dari target 7.578.90 sedangkan untuk penyaluran PIP tingkat MI menunjukkan hasil sangat Baik 94 % dari target 4620 Penerima, sedangkan untuk penyaluran PIP tingkat MTs menunjukkan hasil sangat Baik 85,80 % dari target 52.00 Penerima, sedangkan untuk penyaluran PIP tingkat MA menunjukkan hasil sangat Baik 84 % dari target 48.40 Penerima, sedangkan untuk BOP Pesantren menunjukkan hasil sangat baik 80 % dari target 48.00 jadi hasil rerata sangat Baik.

30. SK : Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
30	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Guru/Ustadz pada Madrasah/Pendidikan Keagamaan yang Lulus sertifikasi	33,20	12,76	53,20
		Persentase tenaga kependidikan Madrasah/Pendidikan Keagamaan yang memperoleh peningkatan kompetensi	33,60	25,20	64,29
		Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi	41,00	30,20	65,55

	Persentase Guru Madrasah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMO pola PKB dan AKG	41,40	37,20	85,40
	Persentase Guru Pendidikan Agama Islam memperoleh peningkatan kompetensi	81,00	59,00	67,60

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kegiatan Penguatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Guru/Ustadz pada Madrasah/Pendidikan Keagamaan yang lulus sertifikasi menunjukkan hasil Cukup 53,20 % dari Target 3,320 yang terealisasi hanya 1276 orang, sedangkan yang memperoleh peningkatan Kompetensi menunjukkan hasil Cukup 64,29 % dari Target 3,360 yang terealisasi hanya 2520 orang Guru Pendidikan Agama Islam memperoleh peningkatan kompetensi Kepala Madrasah yang memperoleh peningkatan kompetensi menunjukkan hasil Cukup 65,55 % target 4100 terealisasi 3020 Guru Madrasah yang mendapatkan penguatan melalui KKG/MGMO pola PKB dan AKG menunjukkan hasil Baik sekali 85,40 % dari Target 4140 yang terealisasi hanya 3720 orang menunjukkan hasil Cukup 67.60 % dari Target 8100 yang terealisasi hanya 5900 Orang

31. SK : Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
31	Menguatnya pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Jumlah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP	2840,00	2840,00	100,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Pelayanan 1 Tahun Prasekolah siswa RA/Pratama Widya Pasraman/ Nava Dhammasekha yang tingkatkan mutunya melalui BOP Menunjukkan hasil Sangat Baik 100 % sedangkan target 2840.

32. SK : Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
32	Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui	Persentase Guru Madrasah yang mengikuti PPG	28,60	10,18	60,03
		Persentase Guru Pendidikan Agama Islam yang mengikuti PPG	58,00	28,00	60,00

	peningkatan kualifikasi pendidik	Persentase Guru Pendidikan Agama berkualifikasi S1	89,60	69,60	78,60
--	----------------------------------	--	-------	-------	-------

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Meningkatnya kualitas pendidikan profesi guru melalui peningkatan kualifikasi pendidik Guru Madrasah yang mengikuti PPG Menunjukkan hasil Cukup 60, 3 % sedangkan target 2860 terealisasi 1018 Guru Pendidikan Agama Islam yang mengikuti PPG Menunjukkan hasil Cukup .60, % sedangkan target 58 terealisasi 28 Guru Pendidikan Agama berkualifikasi S1Menunjukkan hasil Baik 78, % sedangkan target 89.60 terealisasi 99.60.

33. SK : Meningkatnya budaya mutu Pendidikan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
33	Meningkatnya budaya mutu Pendidikan	Persentase madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	96,00	83,40	83,40
		Persentase siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	14,98	2,96	65,10
		Presentase sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu	100,00	62,50	75,00
		Presentase siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetensi nasional maupun internasional	28,50	28,50	100,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kegiatan budaya mutu Pendidikan madrasah/sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu Menunjukkan hasil Baik 83.40 % sedangkan target 14.898 terealisasi 83.40 siswa/santri madrasah/pendidikan diniyah/PDF/sekolah keagamaan yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional Menunjukkan hasil Baik 65.10 % sedangkan target 14.98 terealisasi 296 sekolah keagamaan yang menerapkan budaya mutu Menunjukkan hasil Baik 75 % sedangkan target 100 terealisasi 6250 siswa sekolah keagamaan yang mengikuti kompetensi nasional maupun internasional Menunjukkan hasil Baik 100 % sedangkan target 78.75 terealisasi 53.75.

34. SK: Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja			
----	------------------	-------------------	--	--	--

			Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
34	Meningkatnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	Persentase Pendidikan Keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	78,75	53,75	75,00
		Persentase Kepala Madrasah/Pendidikan Keagamaan yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman	83,60	81,60	95,52
		Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	90,00	88,00	97,60

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan menunjukkan hasil yang baik. Persentase Pendidikan Keagamaan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran memperoleh capaian 75.00%. sedangkan Persentase Kepala Madrasah/Pendidikan Keagamaan yang dibina dalam penerapan budaya belajar yang nyaman dan aman mendekati target yang telah ditetapkan dengan rata-rata 95.52% dan Persentase MTs/MA yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran juga mendekati target dengan 97.60%.

35. SK: Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
35	Meningkatnya kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan	Jumlah organisasi siswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	24,20	24,20	100,00
		Jumlah gugus pramuka pada madrasah yang dibina	62,00	16,00	80,00
		Jumlah organisasi siswa Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan	7,80	7,80	80,00
		Jumlah gugus pramuka pada Pendidikan keagamaan yang dibina	4,80	4,80	80,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kegiatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan pengembangan pendidikan keperamukaan menunjukkan capaian yang baik sekali. Berdasarkan Jumlah organisasi siswa yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan mencapai target sebesar 100%. Jumlah

gugus pramuka pada madrasah yang dibina mencapai target capaian sebesar 80%. sedangkan Jumlah organisasi siswa Pendidikan keagamaan yang dibina kepeloporan dan kesukarelawanan juga memperoleh target capaian sebesar 100% dan Jumlah gugus pramuka pada Pendidikan keagamaan yang dibina memenuhi target capaian sebesar 100%.

36. SK : Menguatnya Pendidikan Agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
36	Menguatnya Pendidikan Agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	Persentase guru pendidikan agama yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama	85,00	81,60	95,60
		Persentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama	84,40	83,40	100,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Pendidikan Agama, nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam sistem pendidikan menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase guru pendidika agama yang dibina dalam mengintegrasikan nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama mendekati target yang telah ditetapkan dengan capaian 95.60%. Jumlah Persentase pengawas pendidikan agama yang dibina dalam mensupervisi pelaksanaan pengintegrasian nilai toleransi beragama dan budi pekerti dalam pendidikan agama juga mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata 100% forum per tahun.

37. SK : Meningkatkan kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
37	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerja	82,00	81,00	98,50
		Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang abkode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti	82,00	82,00	100,00
		Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan	71,00	70,00	98,34

	Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu	90,00	89,00	97,58
	Persentase data ASN yang diupdate	89,20	87,80	98,20
	Persentase ASN yang memiliki Indeks Profesional berkategori sedang	71,67	69,33	96,54
	Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses	83,00	77,00	96,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai) menunjukkan hasil yang baik sekali. Persentase dokumen perencanaan ASN yang sesuai kebutuhan satuan kerjamendekati target yang telah ditetapkan dengan capaian 95.60%. Persentase laporan permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun yang ditindaklanjuti juga mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata 100%. forum per tahun. selain itu Persentase kesesuaian pemanfaatan hasil assesmen kompetensi dengan jabatan mendekati capaian dengan 98.34%. selain itu Persentase ASN yang diusulkan mutasi tepat waktu dengan capaian 97.58%. ditambah lagi Persentase data ASN yang diupdate memperoleh capaian 98.20%. sedangkan Persentase ASN yang memiliki Indeks Profesional berkategori sedang memperoleh capaian 96.54 %. terakhir Persentase layanan administrasi kepegawaian berbasis digital yang mudah diakses memperoleh capaian 96.00%.

38. SK: Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
38	Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu,	8,80	8,80	101,90
		Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK)	95,00	89,60	94,60
		Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal	100,00	97,74	97,74
		Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama	44,00	44,00	80,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Meningkatnya pengelolaan manajemen keuangan yang tertib sesuai dengan ketentuan menunjukkan hasil yang baik sekali. Jumlah laporan keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian 101.90%. Persentase satuan kerja yang telah menerapkan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK) juga mendekati target yang telah ditetapkan dengan rata-rata 94.60%. Persentase realisasi pelaksanaan anggaran yang optimal mendekati capaian dengan 97.74 %. terakhir Persentase penyelesaian Kerugian Negara pada Kementerian Agama memperoleh capaian 100.00%.

39. SK: Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
39	Meningkatnya pengelolaan BMN yang akuntabel	Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya	82,00	77,60	92,80
		Persentase tanah yang bersertifikat	83,20	77,00	84,80
		Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN	82,00	71,80	83,20

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Pengelolaan BMN yang akuntabel hasil yang baik sekali. Persentase nilai Barang Milik Negara yang ditetapkan status penggunaan dan pemanfaatannya mendekati target yang telah ditetapkan dengan capaian 92.80%. Persentase tanah yang bersertifikat juga mendekati target yang telah ditetapkan dengan rata-rata 84.80% dan Persentase nilai Opname Physic (OP)BMN memperoleh capaian 83.20%

40. SK : Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
40	Meningkatnya kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi	Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis	77,00	73,00	88,80
		Persentase Laporan Kinerja satuan organisasi yang dievaluasi	90,00	84,00	90,00
		Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	91,00	89,00	93,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas penataan dan penguatan manajemen organisasi memperoleh hasil yang baik sekali. Persentase satuan organisasi/kerja yang menetapkan dan mengevaluasi standar operasional prosedur berdasarkan peta proses bisnis mendekati target yang telah ditetapkan dengan capaian 88.80%. Persentase Laporan Kinerja satuan organisasi yang dievaluasi juga mendekati target yang telah ditetapkan dengan rata-rata 84.80% dan Persentase administrasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti memperoleh capaian 83.20%.

41. SK : Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
41	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi	41,00	26,00	53,60
		Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas	7,40	7,40	100,00
		Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja	5,40	3,80	60,60

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas penerapan Reformasi Birokrasi memperoleh hasil yang cukup. Persentase satuan kerja yang telah dilakukan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi dengan capaian 53.60%. Jumlah satuan kerja yang dibina dalam peningkatan zona integritas mencapai target yang telah ditetapkan dengan rata-rata 100% dan Jumlah agen perubahan yang dibina untuk mengimplementasikan program kerja memperoleh capaian 83.20%.

42. SK: Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
42	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Persentase output perencanaan yang berbasis data	93,00	88,00	93,65
		Persentase keselarasan muatan renja dengan renstra	92,00	73,00	77,60

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas perencanaan dan anggaran memperoleh hasil yang baik sekali. dari data Persentase output perencanaan yang berbasis data mendekati target yang telah ditetapkan dengan

capaian 93.65%. sedangkan Persentase keselarasan muatan renja dengan renstra memperoleh capaian 83.20%.

43. SK: Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
43	Meningkatnya kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran	Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas	96,00	93,00	96,84

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kegiatan kualitas pemantauan dan evaluasi perencanaan dan anggaran menunjukkan hasil baik sekali. Persentase laporan capaian kinerja perencanaan dan anggaran yang berkualitas mendekati capaian sebesar 98%.

44. SK: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
44	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar	88,00	86,80	96,80

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas sarana dan prasarana kantor menunjukkan hasil yang baik sekali. Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana kantor sesuai standar mendekati target yang telah ditetapkan dengan capaian 96.80 %.

45. SK : Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan dan layanan pengadaan barang dan jasa

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
45	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan dan layanan pengadaan barang dan jasa	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu	96,00	92,60	95,54
		Persentase dokumen yang dikirim secara elektronik	94,00	86,00	96,60

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang dan jasa. Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti secara tepat waktu mendekati capaian sebesar 95.54 % sedangkan persentase dokumen yang dikirim secara elektroni mencapai 96.60 %.

46. SK : Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
46	Meningkatnya kualitas pelayanan umum dan rumah tangga	Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan	92,00	91,00	97,60

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas pelayanan umum dan rumah tangga menunjukkan hasil yang baik sekali. Persentase kepuasan pelayanan tamu pimpinan mendekati target yang telah ditetapkan dengan capaian 97.60 %.

47. SK : Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
47	Meningkatnya kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi	Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi	2886,21	3986,60	112,80
		Persentase pemberitaan negatif tentang kemenag yang discounter	54,80	58,40	84,20

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kualitas layanan hubungan masyarakat dan informasi menunjukan hasil yang baik sekali. Berdasarkan Jumlah pemberitaan capaian program dan pelaksanaan kegiatan yang dipublikasi melebihi target dengan capaian 112.80% sedangkan Persentase pemberitaan negatif tentang kemenag yang discounter mendekati target yang dicapai sebesar 84.20%.

48. SK: Meningkatkan kualitas data dan sistem informasi

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Rata-rata Target 2020-2024	Rata-rata Realisasi 2020-2024	Rata-rata Indeks Kualitas 2020-2024
48	Meningkatkan kualitas data dan sistem informasi	Presentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable	82,00	83,00	98,00

Sumber : Aplikasi SIPKA Kanwil Kemenag Tahun 2020-2024

Kegiatan peningkatan kualitas data dan sistem informasi menunjukkan hasil baik sekali. Presentase data agama dan pendidikan yang valid, dan reliable mendekati target yang telah ditetapkan dengan capaian 98.00 %.

Tata kelola organisasi memperlihatkan capaian paling menonjol. Hampir semua indikator berada di atas 95%. Layanan humas dan informasi bahkan mencapai 322,53%. Komunikasi publik yang terbuka dan transparansi data memperkuat akuntabilitas. Ke depan, pemerataan kualitas pelayanan antarwilayah tetap perlu diperhatikan agar seluruh masyarakat merasakan manfaat yang sama.



Gambar 1 Grafik Capaian Kinerja Tahun 2020-2024

Jika ditarik garis besar, capaian Kanwil Kementerian Agama Bengkulu selama 2020-2024 konsisten dan cenderung meningkat. Rerata capaian lima tahun berada di atas 90%. Beberapa indikator melampaui target, sementara yang lain masih memberikan ruang untuk peningkatan. Dengan capaian ini, arah ke depan dapat lebih fokus pada penguatan program yang memberi dampak langsung kepada masyarakat.

Memasuki periode 2025-2029, arah kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mengacu pada delapan program prioritas yang dirumuskan dalam ASTA PROTAS. Fokus diarahkan pada penguatan kerukunan dan cinta kemanusiaan melalui desa sadar kerukunan, pembinaan penyuluh, dan forum lintas iman. Program ekoteologi menekankan pelestarian lingkungan berbasis nilai agama dengan rumah ibadah ramah lingkungan dan gerakan hijau berbasis komunitas. Layanan keagamaan diarahkan agar lebih berdampak dengan standardisasi bimbingan perkawinan, digitalisasi data rumah ibadah, serta KUA inklusif. Pendidikan unggul menjadi sektor kunci, dengan pengembangan kurikulum kontekstual,

digitalisasi madrasah, peningkatan kesejahteraan guru, beasiswa, serta akreditasi. Pesantren diberdayakan melalui program kemandirian ekonomi, beasiswa santri, dan peran pesantren sebagai pusat layanan gizi. Ekonomi umat diperkuat dengan pengelolaan zakat dan wakaf produktif serta rumah ibadah sebagai pusat pemberdayaan. Seluruh program tersebut ditopang digitalisasi tata kelola melalui sistem satu data, *superapps* layanan, dan pembelajaran berbasis LMS.

Dengan fondasi capaian 2020-2024 dan panduan ASTA PROTAS 2025-2029, arah kebijakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat dilanjutkan secara lebih adaptif dan inklusif. Tantangan ke depan menuntut inovasi berkelanjutan, transparansi layanan, dan pemerataan manfaat di seluruh wilayah. Program yang dirumuskan bukan hanya melanjutkan capaian sebelumnya, tetapi juga merespons kebutuhan baru masyarakat. Dengan demikian, pelayanan publik keagamaan di Provinsi Bengkulu diharapkan semakin kuat, merata, dan berdaya guna.

1.1.1.2 Hasil Pelaksanaan Anggaran Periode Tahun 2020–2024

Dalam penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi Anggaran di Lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mempunyai dua tanggung jawab, sebagai berikut :

1. Penyusunan, Pelaksanaan dan monitoring evaluasi anggaran di Internal Kanwil terdiri 8 Program / 8 DIPA.
2. Mengkoordinasikan Penyusunan, Pelaksanaan dan monitoring evaluasi anggaran di Internal Kanwil terdiri 8 Program / 8 DIPA, Kabupaten/Kota sesuai dengan karakter program masing-masing daerah.

Adapun matrik anggaran tersebut sbb :

1. Pagu Dan Serapan / Realisasi Anggaran Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu Tahun 2020-2024

Tabel 1 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Pegawai Tahun 2020-2024
Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

No.	URAIAN	Pegawai			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Kanwil Kemenag Bengkulu	22.763.924.000	20.317.484.248	89,25	2.336.439.752
2021	Kanwil Kemenag Bengkulu	36.929.486.000	36.888.938.423	99,89	40.547.576
2022	Kanwil Kemenag Bengkulu	42.847.885.000	41.732.099.874	97,40	1.115.785.126
2023	Kanwil Kemenag Bengkulu	36.048.693.000	35.816.124.472	99,35	232.568.528
2024	Kanwil Kemenag Bengkulu	42.015.870.000	41.783.859.088	99,45	232.020.912

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Dari data tabel di atas, realisasi pagu anggaran Belanja Pegawai Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mulai tahun 2020 s.d. Tahun 2024 mengalami kenaikan dan tidak mengalami pagu minus.

Tabel 2 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Barang Tahun 2020-2024
Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

No.	URAIAN	Barang			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Kanwil Kemenag Bengkulu	21.298.812.000	21.034.783.012	98,76	264.024.988
2021	Kanwil Kemenag Bengkulu	18.138.234.000	18.033.649.600	99,42	104.582.400
2022	Kanwil Kemenag Bengkulu	21.973.137.000	21.624.734.237	98,41	348.402.763
2023	Kanwil Kemenag Bengkulu	21.681.889.000	20.646.224.415	95,22	1.035.664.585
2024	Kanwil Kemenag Bengkulu	16.818.801.000	16.524.531.650	98,25	294.269.350

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Sedangkan Belanja Barang presentasinya di atas 95% semua.

Tabel 3 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Modal Tahun 2020-2024
Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

No.	URAIAN	Modal			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Kanwil Kemenag Bengkulu	53.753.802.000	11.400.380.826	21,21	42.353.421.174
2021	Kanwil Kemenag Bengkulu	40.656.796.000	40.651.447.990	99,99	5.348.010
2022	Kanwil Kemenag Bengkulu	43.521.943.000	43.205.644.504	99,27	316.298.496
2023	Kanwil Kemenag Bengkulu	12.728.572.000	12.349.473.245	97,02	379.098.755
2024	Kanwil Kemenag Bengkulu	46.512.439.000	46.445.492.693	99,86	66.946.307

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Realisasi Belanja Modal pada tahun 2020 hanya 21,21% dikarenakan Covid. Sementara tahun 2021 s.d. 2024 rata-rata lebih dari 95% bahkan tahun 2021, 2022 dan 2024 sebesar 99% atau hampir 100%.

Tabel 4 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BanSos Tahun 2020-2024
Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

No.	URAIAN	BanSos			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	554.000.000	553.550.000	99,92	450.000
2021	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	0	0	0	0

2022	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	0	0	0	0
2023	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	0	0	0	0
2024	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	0	0	0	0

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Pada tahun 2020 realisasi Belanja Bansos 99,92 persen anggaran masih di alokasikan di Kanwil, sedangkan 2021 s.d 2024 Dana BOS tidak di Kanwil lagi melainkan di Satker masing-masing.

Tabel 5 :

Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Total Belanja Tahun 2020-2024
Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu

THN	SATKER	Total			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Kanwil Kemenag Bengkulu	98.370.538.000	53.306.198.086	54,19	45.064.339.914
2021	Kanwil Kemenag Bengkulu	95.724.516.000	95.574.036.014	99,84	150.479.986
2022	Kanwil Kemenag Bengkulu	108.342.965.000	106.562.478.615	98,36	1.780.486.385
2023	Kanwil Kemenag Bengkulu	70.459.154.000	68.811.822.132	97,66	1.647.331.868
2024	Kanwil Kemenag Bengkulu	105.347.110.000	104.753.883.431	99,44	593.226.569

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Dari total anggaran yang ada, tahun 2021, 2023 dan 2024 realisasi hampir 100%, sedangkan tahun 2020 realisasi hanya 54,19% hal ini dikarenakan realisasi belanja modal pada bidangng Penyelenggara Haji dan Umroh yang hanya realisasi sebesesar 21% pada tahun 2020.

2. Pagu Dan Serapan / Realisasi Anggaran Kantor Kemenag Kabupaten/Kota Se-Prov. Bengkulu Tahun 2020-2024.

Tabel 6 :

Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Pegawai Tahun 2020-2024
Satker Kemenag Se-Provinsi Bengkulu

THN	SATKER	Belanja Pegawai			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Kemenag Se-Prov. Bengkulu	437.035.862.000	434.026.548.248	99,31	3.009.313.752
2021	Kemenag Se-Prov. Bengkulu	451.800.490.000	478.805.227.408	105,98	-27.004.737.408
2022	Kemenag Se-Prov. Bengkulu	459.462.898.000	454.888.318.604	99,00	4.574.579.396
2023	Kemenag Se-Prov. Bengkulu	501.956.515.000	499.818.385.019	99,57	2.138.129.981
2024	Kemenag Se-Prov. Bengkulu	598.908.347.000	634.589.681.648	105,96	-35.681.334.648

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Dari 96 Satker Kantor Kementerian Agama Se-Provinsi Bengkulu, termasuk didalamnya Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu, Realisasi Belanja Tahun 2021 dan tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan diatas 100%, hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut : 1).

Anggaran Ketersediaan Alokasi Anggaran Kurang dari kebutuhan belanja. 2). Realisasi Realisasi atas tunggakan anggaran tahun sebelumnya tidak teralokasi DIPA Existing. 3). Adanya Kebijakan Baru, Rekrutmen Pegawai, Kebijakan gaji/tunjangan. Dan 4). Revisi Keterlambatan pengesahan Revisi DIPA.

Tabel 7 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Barang Tahun 2020-2024
Satker Kemenag Se-Provinsi Bengkulu

TAHUN	SATKER	Belanja Barang			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Kemenag Se-Prov. Bengkulu	139.476.208.000	136.139.566.814	97,61	3.336.641.186
2021	Kemenag Se-Prov. Bengkulu	136.543.182.000	133.059.960.001	97,45	3.483.221.999
2022	Kemenag Se-Prov. Bengkulu	148.443.613.000	143.436.281.805	96,63	5.007.331.195
2023	Kemenag Se-Prov. Bengkulu	149.770.137.000	142.757.212.068	95,32	7.012.924.932
2024	Kemenag Se-Prov. Bengkulu	150.994.719.000	140.000.264.158	92,75	10.944.454.842

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Untuk realisasi Belanja Barang Mulai Tahun 2020 s.d. 2024 hanya tahun 2024 yang yang 95%, selebihnya realisasi anggaran diatas 95%.

Tabel 8 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Modal Tahun 2020-2024
Satker Kemenag Se-Provinsi Bengkulu

TAHUN	SATKER		Belanja Modal			
			Pagu	Real	%	Sisa
2020	Kemenag Bengkulu	Se-Prov.	115.811.170.000	60.136.274.219	51,93	55.674.895.781
2021	Kemenag Bengkulu	Se-Prov.	125.631.973.000	124.415.329.173	99,03	1.216.643.827
2022	Kemenag Bengkulu	Se-Prov.	92.121.643.000	89.211.403.753	96,84	2.910.239.247
2023	Kemenag Bengkulu	Se-Prov.	115.279.173.000	111.330.449.395	96,57	3.948.723.605
2024	Kemenag Bengkulu	Se-Prov.	78.603.747.000	73.873.138.614	93,98	4.730.608.386

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Satker Se-Provinsi Bengkulu capaian realisasi Belanja Modal pada tahun 2020 pernah di 51,93% sedangkan 2021-2024 hampir semua tercapai 100% atau diatas 90%.

Tabel 9 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja BanSos Tahun 2020-2024
Satker Kemenag Se-Provinsi Bengkulu

TAHUN	SATKER		Belanja BanSos			
			Pagu	Real	%	Sisa
2020	Kemenag Bengkulu	Se-Prov.	13.057.400.000	13.056.950.000	100	450.000
2021	Kemenag Bengkulu	Se-Prov.	14.223.000.000	14.223.0000.000	100	0

TAHUN	SATKER		Belanja BanSos			
			Pagu	Real	%	Sisa
2022	Kemenag Bengkulu	Se-Prov.	14.942.400.000	14.942.400.000	100	0
2023	Kemenag Bengkulu	Se-Prov.	17.641.800.000	17.641.800.000	100	0
2024	Kemenag Bengkulu	Se-Prov.	28.888.200.000	28.888.200.000	100	0

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Realisasi Belanja Bansos tahun 2020 hampir semua mencapai 100%, anggaran tersebut merupakan anggaran PIP yang masih di alokasikan di Anggaran Satker se-Provinsi Bengkulu. Sementara tahun 2021 sd. 2024 realisasinya mencapai 100%.

Tabel 10 :
Data Pagu Dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Total Belanja Tahun 2020-2024
Satker Kemenag Se-Provinsi Bengkulu

TAHUN	SATKER	Total Belanja			
		Pagu	Real	%	Sisa
2020	Kemenag Se-Prov. Bengkulu	705.380.640.000	643.359.339.281	91,21	62.021.300.719
2021	Kemenag Se-Prov. Bengkulu	728.198.645.000	750.503.516.582	103,06	-22.304.871.582
2022	Kemenag Se-Prov. Bengkulu	714.970.554.000	702.478.404.162	98,25	12.492.149.838
2023	Kemenag Se-Prov. Bengkulu	784.647.625.000	771.547.846.482	98,33	13.099.778.518
2024	Kemenag Se-Prov. Bengkulu	857.345.013.000	877.351.284.420	102,33	-20.006.271.420

Sumber : Aplikasi OM SPAN Kemenkeu Tahun 2020-2024

Dengan demikian, Total Belanja dari 94 Satker Kementerian Agama Se-Provinsi Bengkulu hampir 100%, tahun 2021 dan tahun 2024 yang melebihi 100% selebihnya hampir mendekati prosentase realisasi 100%.

1.1.2 Hasil Aspirasi Masyarakat di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Pada uraian terkait Hasil Aspirasi Masyarakat ini dibagi dalam dua pembahasan yakni Pemenuhan Kebutuhan Publik : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi dan Layanan Publik, yakni : Komitmen Membangun Zona Integritas, Layanan PTSP dan Layanan PPID

1.1.2.1. Pemenuhan Kebutuhan Publik : Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi

Pada sub bahasan ini menguraikan tentang Tugas dan Fungsi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Struktur Organisasi dan Sumber Daya Organisasi.

1. Tugas Dan Fungsi.

Pada kondisi umum ini akan dijelaskan tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Organisasi, Komitmen Membangun Zona Integritas dan Pelayanan Publik, Hasil Evaluasi Pencapaian Renstra 2020–2024, Anggaran dan Serapan 2020–2024 dan Aspirasi dan Isu Strategis di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agama Bab V : Instansi Vertikal, Pasal 58 : (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian di daerah, dibentuk instansi vertikal Kementerian berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (2) Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja instansi vertikal Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Peraturan Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan munculnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Agama Bab XVII Instansi Vertikal, Pasal 483 : Ayat (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Kementerian di tingkat provinsi dan Kantor Kementerian di tingkat kabupaten/ kota. Ayat (2) Tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Kantor Wilayah provinsi dan Kantor Kementerian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, diperbarui dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022, dijelaskan sebagai berikut : pada Bab I Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi, Pasal 1 : Ayat (1) Instansi Vertikal Kementerian Agama merupakan instansi pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di daerah. Ayat (2) Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas:

- a. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi; Dan
- b. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 2 dijelaskan bahwa Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri atas: 34 provinsi salah satunya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada urutan : p. Pada Pasal 3 dijelaskan pada ayat (1) Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Dan ayat (2) Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi

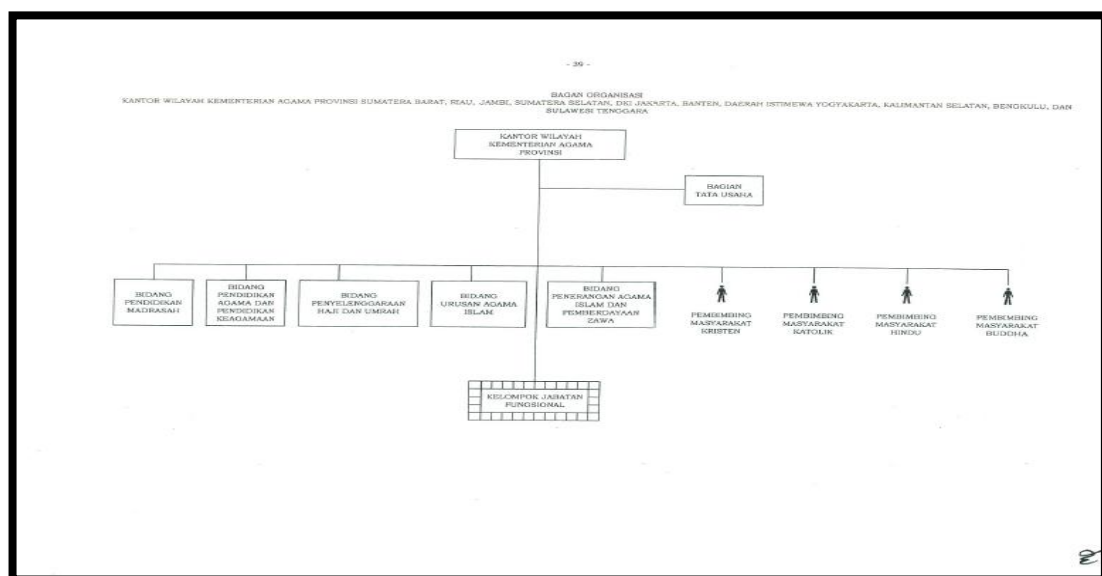
dipimpin oleh seorang kepala. Pasal 4 : Kantor wilayah Kementerian Agama provinsi bertugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan kehidupan beragama;
- c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan haji dan umrah, serta zakat dan wakaf;
- d. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan Pendidikan madrasah, pendidikan agama, dan Pendidikan keagamaan;
- e. pembinaan kerukunan umat beragama;
- f. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- g. pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; dan
- h. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian Agama di provinsi.

2. Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.



Gambar 2 : Bagan Organisasi Kanwil Berdasarkan PMA No. 6 Th. 2022

3. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

a. Data Jumlah Pegawai Se-Provinsi Bengkulu

Tabel 11
Data ASN berdasarkan PNS Dan PPPK Se-Provinsi Bengkulu

NO	UNIT KERJA	JML PNS	JML PPPK	TOTAL ASN
1.	Satker Kanwil & Kab/Kota Se-Prov. Bengkulu	2.460	1.158	3.618

Sumber : Buku Statistik Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (Cutoff 31 Desember 2024)

Tabel : 12
Data PNS berdasarkan Golongan Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2025

NO	JENIS GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan I	3
2	Golongan II	101
3	Golongan III	1.661
4	Golongan IV	695
	Jumlah	2.460

Sumber : Buku Statistik Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu(Cutoff 31 Desember 2024)

Tabel : 13
Data PPPK berdasarkan Jabatan Se-Provinsi Bengkulu Tahun 2025

NO	JABATAN PPPK	JUMLAH
1	Golongan VII	16
2	Golongan IX	1.141
3	Golongan X	1
	Jumlah	1.158

Sumber : Buku Statistik Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (Cutoff 31 Desember 2024)

b. Data Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan Dan Luas Wilayah

Tabel : 14
Jumlah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan Dan Luas Wilayah
Se-Prov. Bengkulu

No	Kab/Kota	Kab	Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (KM2)
1	Kota Bengkulu	0	1	9	0	67	150,31
2	Kab. Bengkulu Selatan	1	0	11	142	16	1.186,10
3	Kab. Bengkulu Utara	1	0	19	215	5	4.324,60

No	Kab/Kota	Kab	Kota	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Luas Wilayah (KM2)
4	Kab. Bengkulu Tengah	1	0	11	142	1	1.223,94
5	Kab. Kaur	1	0	15	192	3	2.365,00
6	Kab. Seluma	1	0	14	180	22	2.400,44
7	Kab. Kepahiang	1	0	8	105	12	710,00
8	Kab. Rejang Lebong	1	0	15	122	34	1.550,28
9	Kab. Lebong	1	0	12	94	10	1.665,28
10	Kab. Muko-muko	1	0	15	151	3	4.036,70
Jumlah		9	1	129	1.343	173	19.612,65

Sumber : Buku Statistik Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu (Cutoff 31 Desember 2024)

c. Data Jumlah Satker Berdasarkan DIPA se-Provinsi Bengkulu

Tabel 15

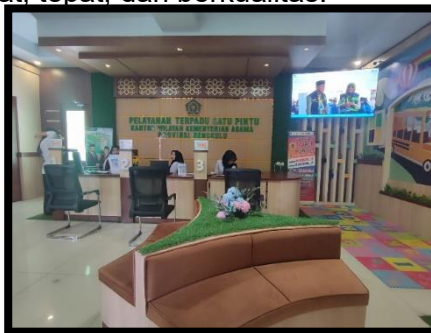
Data Jumlah Satker Berdasarkan DIPA se-Provinsi Bengkulu

No	Satker Berdasarkan DIPA	Jumlah
1	Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu	8
2	Kantor Kemenag Kab/Kota Se-Prov. Bengkulu	44
3	MAN se-Prov. Bengkulu	13
4	MTsN se-Prov. Bengkulu	33
Jumlah		96

Sumber : Bag TU Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu : Tim Perencanaan dan Data

1.1.2.2 Layanan Publik : Komitmen Membangun Zona Integritas, Layanan PTSP dan Layanan PPID.

Sejak tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu telah menapaki langkah strategis membangun Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Langkah ini diwujudkan melalui perbaikan tata kelola dan pelayanan publik, di antaranya dengan penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang kini dilengkapi dengan standar layanan yang jelas, transparan, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Transformasi pelayanan ini menjadi bukti bahwa pembangunan ZI bukan sekadar slogan, tetapi upaya nyata untuk memberikan layanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.



Gambar 3. Dokumentasi Fasilitas Layanan Publik



Gambar 4 : Membangun Komitmen Zona Integritas Antara Pimpinan dan ASN di Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu melalui banner dan baliho

Dalam perjalanannya, Kanwil Kemenag Bengkulu terus melakukan inovasi untuk memastikan pelayanan publik semakin inklusif. Pelayanan ramah kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan ibu menyusui menjadi perhatian serius. Penyediaan fasilitas fisik yang aksesibel, pendampingan petugas khusus, dan penggunaan media informasi yang ramah difabel menjadi bagian dari standar pelayanan yang diterapkan di lingkungan Kanwil. Upaya ini menunjukkan bahwa semangat ZI juga berarti menjamin kesetaraan akses layanan bagi semua warga negara.



Gambar 5 : Membangun Komitmen Zona Integritas melalui pembinaan eksternal dan monitoring daerah

Penguatan integritas internal juga menjadi prioritas. Setiap pegawai dibekali pemahaman tentang kode etik dan perilaku, serta dilibatkan aktif dalam pengawasan internal. Mekanisme *whistleblowing system* dan pengaduan masyarakat ditata ulang agar lebih mudah diakses dan ditindaklanjuti secara cepat. Dengan demikian, setiap laporan, baik terkait dugaan pelanggaran maupun saran perbaikan layanan, dapat diproses secara transparan dan akuntabel.

Hasil dari upaya berkelanjutan ini mulai terlihat. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan PTSP meningkat signifikan, tercermin dari hasil survei kepuasan yang dilakukan secara periodik. Waktu penyelesaian layanan menjadi lebih singkat, jumlah keluhan menurun,

dan tingkat kepercayaan publik terhadap Kanwil Kemenag Bengkulu semakin menguat. Fakta ini menjadi evidence bahwa penerapan prinsip integritas dan perbaikan layanan publik berjalan seiring, memberikan dampak positif bagi masyarakat.



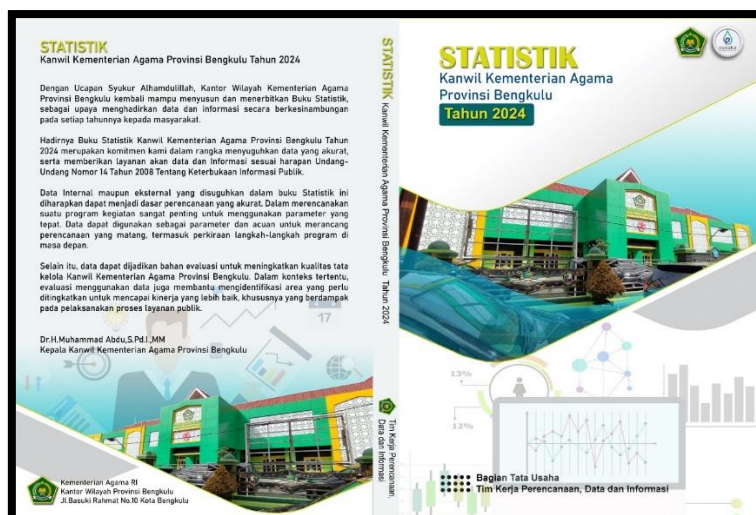
Gambar 6 : Penguatan Zona Integritas di Lingkungan Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu, melalui sinergi dan pembinaan

Ke depan, Kanwil Kemenag Bengkulu bertekad untuk mempertahankan dan memperluas capaian ini. Pembangunan ZI akan terus diarahkan pada perbaikan berkelanjutan, inovasi layanan publik, dan penguatan budaya kerja berintegritas. Dengan kolaborasi seluruh jajaran, semangat perubahan ini diharapkan semakin mengakar, sehingga visi mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan dipercaya publik dapat terwujud secara nyata dan berkesinambungan.

Dalam meningkatkan peran PPID Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, secara bertahap terus melakukan sosialisasi, khususnya Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. Sosialisasi pengelolaan informasi publik bertujuan memberikan pengetahuan dan wawasan tentang tugas, fungsi dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam melakukan pengelolaan layanan informasi publik, khususnya PPID pada unit Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Provinsi Bengkulu.



Gambar 7 Kegiatan Evaluasi PPID Kantor Kemenag Kab/kota



Gambar 8. Publikasi Data Statistik

Hingga tahun 2024, terdapat beberapa capaian yang berhasil diraih oleh PPID Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai berikut.

1. Meraih predikat Badan Publik **Informatif** pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2022 untuk kategori Kementerian /Lembaga Vertikal tingkat Provinsi Bengkulu



Gambar 9 Sertifikat Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu Tahun 2022

2. Meraih predikat Satuan Kerja **Informatif** Berdasarkan hasil monitoring Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Agama pada tahun 2023 lalu.



Gambar 10 Sertifikat Informatif dari Kementerian Agama Tahun 2023

3. Meraih predikat Satuan Kerja **Informatif** Berdasarkan hasil monitoring Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Agama pada tahun 2024 lalu.



Gambar 11 Sertifikat Informatif dari Menteri Agama RI

1.1.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Peraturan Bersama Menteri nomor 9 tahun 2006 menegaskan untuk adanya alat ukur dalam Kerukunan Umat Beragama yang berfungsi sebagai alat pemetaan, pengukuran, prediksi dan deteksi dini kerukunan umat beragama. Alat ukur kerukunan umat beragama haruslah memuat 3 dimensi yaitu toleransi, kesetaraan dan kerjasama. Untuk provinsi Bengkulu indeks kerukunan umat beragama pada tahun 2024 mendapatkan nilai 72,40 dengan nilai dimensi masing-masing: dimensi toleransi adalah 72,91, Dimensi Kesetaraan adalah 73,79 dan Dimensi Kerjasama adalah 73,24. Dengan nilai Indeks tersebut menunjukkan bahwa nilai tersebut termasuk kategori tinggi dan masuk klaster 1 berdasarkan indeks KUB yang disampaikan oleh Lembaga Kajian Kurikulum dan Kebijakan pendidikan (LK3P) yang berkerjasama dengan Kementerian Agama di tahun 2024.

1.1.4 Aspirasi dan isu Strategis

Hasil Aspirasi Masyarakat terkait kinerja dan layanan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dapat diketahui dari Hasil Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat). Hasil analisis capaian Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sehingga rencana perbaikan yang disusun berdasarkan hasil laporan ini diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pelayanan publik.

Hasil pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh Kanwil Kemenag Bengkulu hampir dilakukan setiap tahun, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Mutu pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu secara umum mencerminkan tingkat Kualitas yang baik (B). Hal ini terlihat dari nilai rata-rata ke-30 sub unsur pelayanan pada tahun 2024 berada pada nilai interval IKM 94,25.
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu setelah dikonversikan yaitu 94,25 nilai tersebut berada pada nilai interval konversi IKM 81,26 – 100,00. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Sangat Baik.
- c. Untuk dapat mewujudkan pelaksanaan pelayanan prima diperlukan komitmen untuk melaksanakan transparansi dan akuntabilitas, baik oleh pengambilan keputusan (top manajemen), pimpinan unit pelaksana dan pelaksana pelayanan publik, untuk selalu berupaya memberikan pelayanan secara cepat dan responsif, serta penyediaan sarana prasarana layanan kebutuhan khusus
- d. Melakukan publikasi secara terus menerus akan upaya perbaikan yang sedang dan telah dilakukan untuk perbaikan layanan baik melalui website maupun sosial media.

1.2. Potensi Dan Permasalahan

Yang diuraikan pada pembahasan Potensi dan Permasalahan yakni : Potensi yang Dimiliki, Permasalahan yang Dihadapi, selanjutnya dilakukan Analisa dengan menggunakan Analisis Lingkungan Strategis (SWOT), dengan Langkah - Langkah : Menyusun Matrik SWOT, memaparkan Implikasi Strategis, dan terakhir menampilkan Matriks Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT).

1.2.1 Potensi yang Dimiliki

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menunjukkan sejumlah potensi strategis yang dapat menjadi modal utama dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional bidang agama dan pendidikan keagamaan. Potensi tersebut meliputi :

1. SDM Profesional dan Dedikatif Kanwil Kemenag Bengkulu didukung oleh sumber daya manusia yang relatif stabil dan berdedikasi, baik pada sektor pendidikan, penyuluhan,

- pelayanan keagamaan, maupun administrasi umum. Kehadiran para guru, penyuluh, penghulu, dan ASN lainnya menjadi fondasi penting dalam membangun layanan keagamaan dan pendidikan yang berkualitas.
2. Komitmen terhadap Moderasi Beragama Moderasi beragama telah menjadi prinsip kerja utama dalam berbagai program Kementerian Agama, dan secara nyata telah diimplementasikan lintas agama di Bengkulu. Indeks Kerukunan Umat Beragama di beberapa wilayah menunjukkan hasil yang menggembirakan dan menjadi indikator positif harmonisasi kehidupan sosial-keagamaan.
 3. Kemitraan Strategis Lintas Lembaga dan Tokoh Agama Kemenag Bengkulu memiliki jaringan kemitraan yang kuat dengan berbagai tokoh agama, lembaga sosial keagamaan, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi motor penggerak dalam menciptakan layanan yang lebih responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
 4. Pemanfaatan Teknologi Digital Dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi telah dimulai dengan pemanfaatan SPBE, EMIS, SIMKEU, dan platform layanan publik lainnya. Langkah ini menjadi titik tolak transformasi digital layanan keagamaan dan pendidikan berbasis data.
 5. Kualitas Pendidikan Keagamaan dan Madrasah yang Terus Meningkat
 6. Lembaga pendidikan seperti madrasah dan pesantren menunjukkan capaian yang progresif dalam hal akreditasi, pemenuhan SNP, dan penerapan kurikulum berbasis moderasi beragama. Ini memberikan optimisme terhadap daya saing lulusan di tingkat regional dan nasional.

1.2.2 Permasalahan yang Dihadapi

Meski demikian, terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan strategis yang harus diantisipasi dan ditangani dalam periode 2025–2029. Permasalahan tersebut antara lain :

1. Kesenjangan Pemerataan Layanan Masih terjadi ketimpangan akses layanan antara wilayah perkotaan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) terutama dalam layanan pendidikan agama, bimbingan pernikahan, dan penyuluhan keagamaan seperti Pulau Enggano. Distribusi guru dan penyuluh agama belum merata dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
2. Transformasi Digital yang Belum Merata Meskipun infrastruktur TIK telah tersedia, pemanfaatannya belum optimal di seluruh satuan kerja. Tingkat digitalisasi layanan, sistem informasi, dan pengarsipan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara utuh.

3. Isu Kerukunan dan Potensi Intoleransi Meskipun indeks kerukunan secara umum positif, dinamika politik identitas, intoleransi berbasis agama atau etnis, serta penyebaran informasi radikal di media sosial masih menjadi tantangan nyata yang perlu direspon secara sistematis, termasuk melalui peran strategis KUA sebagai pusat mitigasi konflik.
4. Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola yang Belum Merata Belum semua satuan kerja mencapai nilai optimal dalam indikator SPIP, Zona Integritas, dan manajemen risiko. Di sisi lain, penyusunan perencanaan, pelaporan kinerja, dan pengelolaan keuangan belum seluruhnya memenuhi prinsip akuntabilitas dan tepat waktu.
5. Keterbatasan Kompetensi ASN dan Rendahnya Sertifikasi Teknis Tingkat profesionalisme ASN dan guru belum merata, terutama dalam hal kepemilikan sertifikasi kompetensi, kemampuan TIK, serta kesiapan dalam menghadapi transformasi kebijakan berbasis kinerja dan pelayanan digital.

1.2.3. Analisis Lingkungan Strategis (SWOT)

Untuk mengambil kebijakan, terutama dalam menentukan kinerja lima tahun kedepan, maka perlu diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Selanjutnya dilakukan telaah dan analisis. Sedangkan analisis yang digunakan adalah analisis SWOT, dengan tabel sebagai berikut :

1.2.3.1. Matrik SWOT

Tabel 16 :
Tabel SWOT Analisis

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
Ketersediaan SDM berdedikasi dan berpengalaman di bidang pendidikan, keagamaan, dan penyuluhan	Distribusi tenaga pendidik dan penyuluh belum merata, khususnya di wilayah 3T
Komitmen kelembagaan terhadap moderasi beragama, kerukunan, dan toleransi lintas iman	Masih terbatasnya jumlah ASN yang tersertifikasi kompetensi dan digital readiness
Tersedianya sistem digital awal seperti EMIS, SIMKEU, dan SPBE untuk mendukung perencanaan dan monitoring	Transformasi digital belum terintegrasi lintas unit dan masih minim pemanfaatan big data
Kemitraan aktif dengan tokoh agama, ormas, dan lembaga keagamaan lokal serta pemerintah daerah	Kurangnya koordinasi antar bidang dalam pengelolaan program terpadu
Peningkatan kualitas dan akreditasi satuan pendidikan keagamaan (madrasah/pesantren)	Beberapa satuan kerja belum memenuhi standar SPIP, laporan kinerja, dan reformasi birokrasi

Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Dukungan strategis nasional terhadap transformasi digital layanan publik, RB tematik, dan SPBE	Meningkatnya intoleransi digital dan penyebaran paham radikal di media sosial
Potensi pendayagunaan dana zakat, wakaf, dan dana sosial keagamaan untuk pemberdayaan umat	Ketergantungan pada anggaran pusat dan fluktuasi kebijakan fiskal nasional
Animo masyarakat tinggi terhadap pendidikan madrasah, program keagamaan, dan sertifikasi pranikah	Polarisasi politik dan sentimen keagamaan menjelang tahun pemilu dan isu sosial

Sinergi multipihak (tokoh agama, ormas, lembaga pendidikan) dalam penguatan layanan berbasis komunitas	Krisis kepercayaan publik jika pelayanan tidak transparan, lambat, atau tidak merata
Tren digitalisasi pembelajaran dan penguatan pendidikan karakter melalui kurikulum moderasi beragama	Perubahan gaya hidup dan nilai generasi muda yang berpotensi menjauh dari nilai-nilai agama

1.2.3.1. Implikasi Strategis:

Adapun implikasi dari perumusan table SWOT diatas, dapat diambil beberapa Kesimpulan-kesimpulan kinerja yang perlu direkomendasikan untuk dilaksanakan pada masa yang akan datang, sebagai berikut :

1. Kekuatan internal perlu dikuatkan melalui penguatan SDM dan adopsi teknologi digital secara merata untuk mendukung integrasi layanan lintas bidang.
2. Kelemahan seperti ketimpangan layanan dan koordinasi antarsatker harus ditangani melalui sistem berbasis data dan reformasi birokrasi menyeluruh.
3. Peluang seperti sinergi multipihak, pemanfaatan dana zakat/wakaf, dan momentum digitalisasi pendidikan perlu dimanfaatkan untuk membangun sistem layanan inklusif dan responsif.
4. Ancaman eksternal seperti intoleransi, radikalisme digital, dan krisis kepercayaan perlu diredam melalui program mitigasi sosial seperti penguatan peran KUA, PPID, dan penyuluh berbasis media.

1.2.3.2. Matriks Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT)

Tabel 17 :
Tabel Strategis Turunan SWOT (SO–ST–WO–WT)

Jenis Strategi		Rencana Aksi Strategis
SO (Strength- Opportunities)	1	Optimalisasi sistem digital SPBE dan EMIS untuk meningkatkan layanan berbasis data (dikaitkan dengan SDM unggul dan dukungan transformasi digital nasional).
	2	Kembangkan program kolaboratif lintas agama berbasis komunitas bersama tokoh agama dan ormas lokal.
	3	Dorong madrasah/pesantren unggul sebagai sentra pendidikan karakter dan moderasi beragama.
ST (Strength- Threats)	1	Perkuat peran KUA dan penyuluh dalam deteksi dini dan mitigasi konflik keagamaan berbasis EWS.
	2	Tingkatkan transparansi layanan publik dan pelaporan melalui PPID dan kanal digital terpercaya.
	3	Lakukan literasi digital keagamaan untuk menangkal narasi intoleran di media sosial.
WO (Weaknesses- Opportunities)	1	Percepat pemerataan distribusi guru/penyuluh ke wilayah 3T melalui kebijakan afirmatif berbasis data kebutuhan.
	2	Bangun dashboard monitoring ASN dan pelatihan digital untuk akselerasi kompetensi teknis.
	3	Sinergikan pemanfaatan zakat dan wakaf dengan layanan pendidikan dan sosial di daerah minim akses.

WT (Weaknesses- Threats)	1	Bangun sistem pengawasan internal berbasis SPIP yang kuat untuk mencegah disfungsi layanan.
	2	Kembangkan pelatihan berkelanjutan dan mentoring ASN terkait pelayanan publik responsif dan moderatif.
	3	Integrasikan pelaporan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat sebagai early warning untuk krisis kepercayaan.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi dan Misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu.

Sebagai bagian dari kementerian yang memiliki mandat dalam urusan keagamaan, pendidikan keagamaan dan Tata Kelola Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menjabarkan dan menyelaraskan visi nasional Kementerian Agama ke dalam arah pembangunan jangka menengah di wilayah Provinsi Bengkulu.

Adapun Visi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029 adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Provinsi Bengkulu Yang Rukun, Maslahat, Dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045."

Visi ini mencerminkan cita-cita besar bangsa untuk mewujudkan kehidupan keagamaan yang harmonis, pelayanan keagamaan yang berdampak, dan pendidikan keagamaan yang unggul sebagai pilar kemajuan bangsa. Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu memaknai visi ini sebagai landasan dalam penguatan kerukunan antar umat beragama, peningkatan pelayanan keagamaan yang inklusif dan adil, serta pengembangan pendidikan yang religius, berkualitas, dan berdaya saing global.

Misi Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu :

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menetapkan tiga misi utama yang akan menjadi arah pembangunan bidang keagamaan, pendidikan keagamaan dan tata kelola selama periode 2025–2029 :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

2.2. TUJUAN KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menetapkan tujuan strategis sebagai berikut :

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa.

2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan serta pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi.
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau.
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul, dan berdaya saing.
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital

Untuk memastikan implementasi yang terarah dan terukur, Kementerian Agama menetapkan **Asta Protas** atau **Delapan Program Prioritas Kemenag Berdampak** yang menjadi pengungkit strategis pencapaian sasaran pembangunan keagamaan dan pendidikan keagamaan dan Tata Kelola yaitu :

1. Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan.

Menjadi tugas kementerian agama untuk memastikan terus meningkatkan kerukunan antarumat beragama, menjamin kebebasan beribadah, serta memastikan proses pendirian rumah ibadah berjalan sesuai regulasi dan berkeadilan.

Program cinta kemanusiaan perlu dibangun untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap sesama manusia, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Program ini berfokus pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan, seperti kasih sayang, empati, tolong-menolong, dan keadilan.

2. Ekoteologi.

Ancaman perubahan iklim saat ini menjadi isu global. Setiap negara diminta melakukan upaya pencegahan. pelestarian lingkungan menjadi hal penting yang harus dilakukan, termasuk melalui pendekatan keagamaan. Menjadi tugas Kemenag RI untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran keagamaan dalam pelestarian lingkungan. Misalnya, ada konsep khalifah dalam Islam, Tri Hita Karana dalam Hindu, atau Laudato Si' dalam Katolik.

3. Layanan Keagamaan Berdampak.

Ada 9 Layanan Keagamaan Berdampak, sebagai berikut :

- 1) Bimbingan perkawinan.
- 2) Standardisasi pengelolaan kualitas layanan bimbingan keagamaan.
- 3) Pembangunan sarana dan pra-sarana KUA yang inklusif dan ramah. (KUA Berdaya)
- 4) Bantuan afirmasi kitab suci dan sumber bacaan keagamaan ramah difabel.

- 5) Pemeliharaan rumah ibadah terintegrasi (digitalisasi data).
- 6) Pemenuhan rumah ibadah di wilayah 3T dan wilayah afirmatif.
- 7) Pelatihan kompetensi SDM pengelola rumah ibadah.
- 8) Pengiriman penyiar agama moderat pada wilayah 3T dan wilayah afirmatif.
- 9) Penguatan karakter dan literasi keagamaan.

4. Pendidikan Unggul, Ramah, dan Terintegrasi.

Kemenag mengemban amanah tujuan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu tugas dan fungsi Kemenag adalah mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan agama dan keagamaan yang unggul, yaitu lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang terintegrasi (sistem), terdigitalisasi, relevan, didukung SDM profesional, sarana prasarana memadai, dan inklusif. Sehingga, melahirkan alumni yang religius, kompetitif, nasionalis, dan cinta kemanusiaan.

5. Pesantren Berdaya.

Pesantren sudah berkontribusi, bahkan sejak sebelum kemerdekaan Indonesia. Lahirnya UU Pesantren menjadi momentum rekognisi dan afirmasi kiprah lembaga Pendidikan keagamaan Islam yang selama ini menjadi tempat pembelajaran aman dan inklusif bagi jutaan santri. Selain mencerdaskan kehidupan bangsa, pesantren berdaya akan menopang pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitarnya.

6. Pemberdayaan Ekonomi Umat.

Masyarakat Indonesia dikenal religius dan peduli. Potensi dana sosial yang bisa dihimpun mencapai ratusan triliun (contoh: potensi zakat Rp327 triliun per tahun. Baru bisa dihimpun Rp41 triliun). Tata Kelola yang baik akan dapat mengoptimalkan peran dana sosial dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sehingga, selain penghimpunan yang maksimal, distribusi dana sosial juga tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan ekonomi umat.

7. Pemberdayaan Rumah Ibadah.

Pemberdayaan rumah ibadah dilaksanakan untuk memenuhi fasilitas dasar seperti listrik air, dan sanitasi serta peningkatan rumah ibadah lain. Hal ini perlu juga dilakukan agar rumah ibadah bisa menjadi tempat yang nyaman dan aman khususnya bagi anak dan difabel.

8. Digitalisasi Tata Kelola.

Digitalisasi adalah kunci untuk layanan keagamaan yang murah, mudah, efisien dan transparan. Beragam informasi disajikan dalam satu layanan data. Berbagai system

informasi diintegrasikan dalam satu aplikasi. Sistem pengembangan SDM juga berbasis digital agar bisa diikuti secara masif oleh stakeholders Kemenag.

Untuk mengakselerasi pencapaian visi, misi, tujuan, serta prioritas nasional yang tertuang dalam Asta Protas, Kementerian Agama menetapkan lima program utama. Sebagai perpanjangan tangan kementerian di daerah, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu melaksanakan empat program utama tersebut melalui kolaborasi layanan teknis dan manajerial yaitu :

1. Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama.

Menguatkan kehidupan beragama yang harmonis, toleran, dan inklusif melalui penguatan moderasi beragama, peningkatan kualitas layanan keagamaan, serta fasilitasi kerukunan umat di seluruh wilayah.

2. Program Wajib Belajar 13 Tahun.

Mendorong pemerataan akses dan perluasan layanan pendidikan dasar hingga menengah melalui penguatan peran madrasah sebagai institusi pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.

3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran.

Fokus pada peningkatan mutu proses belajar mengajar melalui penguatan kompetensi guru, revitalisasi kurikulum, penyediaan sarana prasarana belajar, serta pengembangan model pembelajaran inovatif.

4. Program Dukungan Manajemen.

Menjadi landasan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, serta perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.

2.3. SASARAN KEGIATAN.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian Agama sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025–2029, serta mendukung pelaksanaan Asta Program Prioritas Kemenag Berdampak dan program utama, Kementerian Agama telah menetapkan Sasaran Strategis dan Sasaran Program.

Sasaran Strategis.

Telah ditetapkan 7 (Tujuh) Sasaran Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Meningkatnya masyarakat yang memiliki cara pandang dan praktik beragama jalan tengah untuk mewujudkan kerukunan dan harmoni sosial.
2. Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif.
3. Meningkatnya pemerataan akses pendidikan.
4. Meningkatnya hasil belajar pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.
5. Meningkatnya Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas.
6. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan yang berkualitas.
7. Meningkatnya kualitas tata Kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel.

Program dan Sasaran Program.

025.DC - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama

- SP.1 :Meningkatnya pemahaman dan praktek keagamaan maslahat dalam mewujudkan kehidupan beragama yg rukun
- SP.2 :Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif

025.DF - Program Wajib Belajar 13 Tahun

- SP.3 :Meningkatnya pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah Islam

025.DI - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran

- SP.4 :Meningkatnya Kualitas pengajaran dan Pembelajaran
- SP.5 :Meningkatnya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, kompeten, dan merata
- SP14 :Meningkatnya kualitas kesesuaian pembelajaran bagi Anak Usia Dini

025.WA - Program Dukungan Manajemen

- SP.13 :Meningkatnya Tata kelola Organisasi yang efektif dan akuntabel

Dari Sasaran Strategis dan Sasaran Program diatas, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menetapkan serangkaian sasaran kegiatan yang selaras dan terintegrasi dengan sasaran strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Sasaran Kegiatan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu merupakan turunan langsung dari sasaran kegiatan Kementerian Agama, yang secara hierarkis dijabarkan lebih lanjut pada level wilayah untuk memastikan keterpaduan perencanaan, konsistensi pelaksanaan, serta efektivitas pencapaian tujuan nasional sektor agama. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas yang dilaksanakan di daerah memiliki keterikatan strategis dengan arah kebijakan nasional.

Sasaran kegiatan tersebut diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian program utama Kementerian Agama dengan penekanan pada peningkatan kualitas layanan keagamaan dan pendidikan keagamaan serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Pada dasarnya ada tiga bidang kategori penggolongan Sasaran Kegiatan dan Indikatornya, yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Tata Kelola. Kegiatan-kegiatan beserta sasaran kegiatan-sasaran kegiatan dan indikator-indikator sasaran kegiatan masing-masing Unit Organisasi di Unit Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, dengan rujukan/dasar dari SK dan IKSK dari Eselon-1 :

1. Sekretariat Jenderal : Bagian Tata Usaha
2. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam : Bidang Urusan Agama Islam
3. Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam : Bidang Penerangan Agama Islam
4. Ditjen Pendidikan Islam : Bidang Pendidikan Madrasah
5. Ditjen Pendidikan Islam : Bidang Pendidikan Keagamaan Islam dan Pondok Pesantren
6. Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen
7. Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik
8. Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindhu
9. Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha

Tabel dibawah ini menjelaskan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu selama lima tahun kedepan menetapkan sebanyak 20 Sasaran Kegiatan dan 82 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan untuk tahun 2025. Sedangkan Mulai Tahun 2026, karena Dirjen PHU menjadi Kementerian tersendiri maka ditetapkan 15 Sasaran Kegiatan (SK) dan 75 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) dengan target-target yang ditetapkan tiap tahunnya dalam target pertahun dan direalisasikan tiap tahunnya melalui mekanisme Penetapan Perjanjian Kinerja tiap tahunnya, melalui mekanisme pembagian peran tugas dan fungsi melalui mekanisme Penyusunan Pohon Kinerja dan dituangkan dalam Rencana Aksi dan Kinerja Pegawai masing-masing sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Adapun tabel SK dan IKSK sebagai berikut :

SK DAN IKSK BIDANG AGAMA

**TABEL 18 :
SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN /
RUJUKAN SK DAN IKSK ESELON-1 (BIDANG AGAMA)**

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON-1
Bidang Agama			

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON-1
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	KUB, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	SK.5620.1, SK.2140.1, SK.2137.1, SK.2145.1, SK.2143.1, SK.2130.1
IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00		
IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS		
IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS		
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA		
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya		
IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan		
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	SK.2130.2, SK.2124.2, SK.2137.2, SK.2140.2, SK.2143.2
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)		
IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama		
IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi		
IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah		
IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan		
IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan		
IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat		
IKSK.2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan		
IKSK.2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah		
IKSK.2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan		
IKSK.2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional		
IKSK.2.12	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan		
IKSK.2.12	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan professional		

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON-1
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	PHU	SK.2126.1, SK.2147.1, SK.2147.2, SK.2148.1, SK.2149.1, SK.2149.2, SK.2150.1, SK.2150.2, SK.2150.3, SK.2150.5, SK.2150.6, SK.2150.8
IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota		
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji		
IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan		
IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu		
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji		
IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar		
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji		
IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75		
IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji		
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah		
IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);		
	a. Lembaga penyelenggara haji khusus;		
	b. Lembaga penyelenggara umrah		

Untuk merealisasikan dua SK dan enam belas IKSJ diwujudkan oleh dan diemban oleh dua Bidang, Yakni Bidang Urusan Agama Islam dan Bidang Penerangan Agama Islam, ditambah dengan Pembimbing Masyarakat Kristen, Pembimbing Masyarakat Katolik, Pembimbing Masyarakat Hindhu, dan Pembimbing Masyarakat Buddha. Tugas dan fungsi, yang telah dipaparkan di Bab I.

SK DAN IKSJ BIDANG PENDIDIKAN

TABEL 19 :
SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN /
RUJUKAN SK DAN IKSJ ESELON-1 (BIDANG PENDIDIKAN)

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON-1
Bidang Pendidikan Dasar Menengah			
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas	SK.2129.1, SK.2128.1, SK.2136.1,

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON-1
IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Hindu, Bimas Buddha	SK.2139.1, SK.2142.1, SK.4012.1
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	SK.2130.2, SK.2130.2, SK.2137.2, SK.2140.2, SK.2143.2, SK.2145.2
IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif		
IKSK.9.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana		
IKSK.9.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren		
IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalaya/Nava Dhammasekha)		
IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah		
IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren		
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	SK.4434.1, SK.4435.1, SK.4436.1, SK.4437.1, SK.4422.5, SK.4433.4
IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:		
	a literasi membaca		
	b numerasi		
IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas		
IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		
IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler		
IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)		

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON-1
IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan		
IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B		
IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara		
IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual		
IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional		
IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik		
IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran		
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	SK.1.2133, SK.4434.2, SK.4435.2, SK.4436.2, SK.4437.2, SK.2127.5
IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik		
IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP		
IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal		
IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik		
IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil		
IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil		
IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik		
IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil		
IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir		
IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir		
IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)		
IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan		

Untuk merealisasikan SK dan IKS K Fungsi Pendidikan ini diemban oleh dua Bidang Pendidikan Islam, yakni Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan Keagamaan Islam dan Pondok Pesantren, ditambah dengan Pembimbing Masyarakat Kristen, Pembimbing Masyarakat Katolik, Pembimbing Masyarakat Hindu, dan Pembimbing Masyarakat Buddha yang terkait tugas bidang / fungsi pendidikan. Tugas dan fungsi, yang telah dipaparkan di Bab I.

SK DAN IKS K BIDANG TATA KELOLA

TABEL 20:
SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN BERDASARKAN /
RUJUKAN SK DAN IKS K ESELON-1 (BIDANG TATA KELOLA)

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON-1
Bidang Tata Kelola			
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	Sekretariat/TU : Tim Perencanaan, Data dan Informasi	SK.2102.1, SK.2138.1, SK.2141.1, SK.2144.1, SK.2146.1, SK.2150.1
IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran		
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Sekretariat/TU : Tim Ortala	SK.2101.1, SK.2138.2, SK.2141.2, SK.2144.2, SK.2146.2, SK.2150.2
IKSK.13.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar)		
IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75		
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	SK.2100.1, SK.2138.3, SK.2141.3, SK.2144.3, SK.2146.3, SK.2150.3
IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan		
IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu		
IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)		
IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu		
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	SK.2099.1, SK.2138.4, SK.2141.4, SK.2144.4, SK.2146.4, SK.2150.4
IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN		
IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai		

KODE	SASARAN / INDIKATOR	UNIT ORGANISASI PELAKSANA	RUJUKAN SK ESELON-1
	kebutuhan		
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama dan Pengawasan Orang Asing	SK.2098.1, SK.2138.5, SK.2141.5, SK.2144.5, SK.2146.5, SK.2150.5
IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan		
IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing		
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)	SK.2103.1, SK.2138.8, SK.2141.8, SK.2144.8, SK.2146.8, SK.2150.8
IKSK. 17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses		
IKSK. 17.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap		
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler,	SK.7887.1, SK.7887.1, SK.2138.6, SK.2141.6, SK.2144.6, SK.2146.6, SK.2150.6
IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID		
IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi		
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	Tim PPID	SK.7888.1, SK.2138.7, SK.2141.7, SK.2144.7, SK.2146.7, SK.2150.7
IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik		
IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi		
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	Sekretariat/TU	SK 6708.1
IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output		
IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama		
IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media		
IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media		
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK		
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK		

Bagian Tata Usaha didukung delapan Tim sebagai berikut :Perencanaan, Informasi dan Data, Humas, Umum , PTSP dan Arsiparis, Keuangan dan BMN, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Hukum, Organisasi Tata Laksana dan TLHP dan Kerukunan Umat Beragama, merealisasikan SK dan IKSK Fungsi Tata Kelola, sesuai Tugas dan Fungsi Bagian Tata Usaha yang telah diuraikan di Bab I.

2.4. IDENTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL (MRPN)

1. Pengertian :


Manajemen Risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, menangani, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

2. Dasar Hukum

- a. PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)
- b. Permen PAN-RB No. 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Peraturan BPKP tentang Pedoman Manajemen Risiko Sektor Publik
- d. KMA No. 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah (kaitannya dengan tata kelola pendidikan)
- e. Roadmap Reformasi Birokrasi Kemenag (mengacu pada PermenPAN-RB No. 25 Tahun 2020)

3. Tujuan Dan Prinsip Manajemen Risiko Di Kementerian Agama

- a. Tujuan
 - 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program keagamaan dan pendidikan
 - 2) Menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara
 - 3) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan Kemenag
 - 4) Mengurangi kemungkinan kegagalan program/kegiatan
 - 5) Mendukung pengambilan keputusan berbasis risiko oleh pimpinan
- b. Prinsip
 - 1) Terintegrasi dengan perencanaan dan pengendalian program Kemenag
 - 2) Terstruktur dan menyeluruh di semua unit kerja
 - 3) Berdasarkan data dan informasi terbaik
 - 4) Disesuaikan dengan konteks tugas Kemenag (haji, pendidikan, layanan umat, bimas)

- 
- 5) Bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan regulasi & kebutuhan umat

TABEL 21 :
MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL (MRPN)
RENSTRA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025 – 2029

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
Bidang Agama				
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi dan cinta kemanusiaan umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1 Munculnya pihak-pihak yang kurang / tidak menjamin adanya jaminan beragama terhadap event / peristiwa di Masyarakat. 1 Menurunnya Toleransi beragama dan cinta kemanusiaan umat beragama. 2 SDM belum memahami sepenuhnya konsep, prosedur dan teknis penyelenggaraan Early Warning System (EWS) 3 Dialog kerukunan tidak dilaksanakan secara rutin dan jumlahnya tidak meningkat 4 Kekurangan dana anggaran dari pusat dan daerah untuk kegiatan umat beragama 5 Lambatnya penyampaian berkas/ dokumen kelembagaan. 6 Terbatasnya ruang/akses terhadap pelayanan umat. 7 Terbatasnya anggaran dan SDM serta Koordinasi lintas Pihak yang diperlu dikuatkan 8 Minat masyarakat yang rendah terhadap event seni budaya 9 Resistensi lembaga sasaran binaan (lembaga kurang kooperatif) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi dan mencegah adanya pihak-pihak yang tidak menjamin adanya jaminan beragama. 2. Penguatan dialog lintas agama dengan mediator FKUB dan pemetaan rutin potensi konflik melalui Early Warning System 3. Peningkatan kapasitas (Capacity Building), penyelenggaraan pelatihan teknis EWS secara berkala dan workshop pendalaman konsep, SOP dan alur kerja EWS 4. Mengajukan Permohonan Proposal Bantuan Kepada Pemerintah Pusat dan Daerah berkolaborasi untuk mendapatkan dukungan dari lembaga keagamaan, tokoh lembaga, tokoh masyarakat dan tokoh agama 5. Menggalang Donasi yang tidak mengikat semua elemen masyarakat. 6. Penambahan anggaran dan Memperdayakan SDM yang ada 7. meningkatkan koordinasi dengan semua pihak melalui akses Digital 	<ul style="list-style-type: none"> • Bag. TU : Tim KUB, • Bidang Urais • Bidang Penais • Pembimas Kristen, • Pembimas Katholik, • Pembimas Hindhu, • Pembimas Buddha

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang Profesional, inklusif, dan berdampak	<ol style="list-style-type: none"> 1 Adanya layanan keagamaan yang tidak Profesional, tidak inklusif (membedakan layanan karena status dll), dan tidak berdampak (tidak memberikan manfaat) 2 Sikap pelaku layanan keagamaan yang tidak kooperatif. 3 Keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM yang mendukung dibandingkan dengan jumlah umat 4 Beban administrasi yang tinggi dan proses administrasi yang rumit 5 Partisipasi umat yang rendah 6 Kurangnya update data layanan Keagamaan dan rendahnya Pengetahuan penggunaan aplikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Melakukan identifikasi dan mitigasi pada layanan keagamaan yg tidak profesional, inklusif dan berdampak dan pencegahan dan penyelesaiannya. 2 Melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaku / petugas yang melakukan layanan keagamaan. 3 Adanya peningkatan sarana dan prasarana serta kualitas dan kuantitas SDM yang mendukung 4 Meningkatkan rasio pelaku layanan keagamaan dibandingkan jumlah umat 5 Meningkatkan kerjasama melalui komunitas pelaku layanan keagamaan pusat maupun daerah 6 Sosialisasi melalui rumah ibadah, sekolah dan instansi pemerintah yang terkait 7 Melibatkan pelaku layanan keagamaan dan guru dalam penyampaian pesan pemerintah 8 Peningkatan anggaran untuk bantuan lembaga keagamaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Bag. TU : Tim KUB, • Bidang Urais • Bidang Penais • Pembimas Kristen, • Pembimas Katholik, • Pembimas Hindhu, • Pembimas Buddha
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan System haji	Adanya system pelayanan haji yang tidak efektif	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap system pelayanan haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid PHU dan Tim Bidang PHU.

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	Adanya kendala-kendala dalam pendaftaran ibadah haji	Selalu berkoordinasi dan mengantisipasi adanya kendala kendala dan masalah-masalah pendaftaran baik sifatnya teknis dan non-teknis	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid PHU dan Tim Bidang PHU.
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan System haji	Adanya system pelayanan haji yang tidak efektif	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap system layanan haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid PHU dan Tim Bidang PHU.
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan System haji	Adanya masalah-masalah terkait kualitas system Haji	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap system pembinaa haji yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat di Tingkat Kanwil dan Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid PHU dan Tim Bidang PHU. • Kasi PHU dan Tim Seksi PHU Kab / Kota
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah	Adanya masalah-masalah terkait pengawasan dan penyelenggaraan Haji dan Umroh	Melakukan identifikasi dan mitigasi terhadap Sistem Pengawasan Haji dan Umtroh yang sedang berjalan agar kualitasnya meningkat di Tingkat Kanwil dan Kabupaten / Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Kabid PHU dan Tim Bidang PHU. • Kasi PHU dan Tim Seksi PHU Kab / Kota • Pihak Pengawas Internal Eksternal terkait
Bidang Pendidikan				
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	Tingginya angka putus sekolah di satuan pendidikan keagamaan Keterbatasan sarana, prasarana dan akses pembiayaan pendidikan Kesenjangan kualitas guru dan tenaga kependidikan Rendahnya minat lanjut studi siswa karena factor ekonomi/social Lemahnya monitoring penyelesaian pendidikan Keterbatasan akses siswa pada	Program beasiswa, bantuan biaya pendidikan dan dukungan afirmatif Peningkatan sarana prasarana dan akses digital Pelatihan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Sosialisasi pentingnya pendidikan berkelanjutan kepada orang tua dan masyarakat Penguatan system monitoring dan pelaporan capaian pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penmad • Bidang PD Pontren • Pembimas Kristen • Pembimas Katholik • Pembimas Hindhu • Pembimas Buddha

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
		satuan lembaga pendidikan keagamaan Islam	siswa Memberikan akses yang terbuka bagi siswa pada satuan pendidikan keagamaan	
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	Adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas Minimnya informasi tentang sekolah/satuan pendidikan dengan kekhasan agama Rendahnya pengetahuan sekolah tentang pentingnya sekolah inklusif Banyaknya sekolah yang belum memiliki sertifikat SHM Kementerian Agama Kurangnya komunikasi antara orang tua, tenaga kependidikan dan operator sehingga ada beberapa siswa yang belum bisa diinput di Aplikasi Masih rendahnya persentase siswa yang masuk sekolah usia dini Kurangnya fasilitas layanan kesehatan sekolah Ketidaksesuaian pembangunan dengan standar mutu pendidikan Proses pengadaan rawan keterlambatan atau tidak transparan Keterlambatan pencairan dana BOS	Melakukan koordinasi dengan stakeholder internal dan Lembaga Pendidikan terkait adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas Melakukan pembinaan dan koordinasi kepada lembaga sekolah dalam rangka evaluasi kinerja dan peningkatan promosi sekolah secara lebih luas Memberikan edukasi kepada sekolah terkait implementasi pendidikan inklusif Apabila sertifikat sekolah masih dalam bentuk hibah untuk segera diurus ke SHM Kementerian Agama Menjalin komunikasi yang baik antar semua lini mulai dari penyedia data/orang tua, pengumpul data dan staf Tata Usaha serta pengolah data/operator Aplikasi Membuat syarat untuk siswa yang masuk sekolah berbasis keagamaan harus masuk sekolah usia dini Meningkatkan dana BOS untuk fasilitas layanan kesehatan sekolah	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penmad • Bidang PD Pontren • Pembimas Kristen • Pembimas Katholik • Pembimas Hindhu • Pembimas Buddha

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
			Penerapan standar teknis pembangunan sarpras pada satuan pendidikan keagamaan Penguatan tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel Penguatan tata kelola BOS	
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya pemahaman siswa tentang konsep dasar literasi numerasi, keterampilan berfikir kritis, komunikasi dan penggunaan teknologi sehingga berpengaruh dalam hasil asesmen Kurangnya pemahaman siswa dan guru tentang konsep pendidikan karakter dan cara mengintegrasikannya dalam pembelajaran, keterbatasan sumber daya, waktu dan dukungan Terbatasnya pembinaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah sehingga beberapa prestasi tidak merata dan didominasi sekolah keagamaan negeri walaupun ada beberapa sekolah swasta yang berhasil menampilkan prestasi ekstrakurikuler Belum meratanya kegiatan kepramukaan sehingga nilai-nilai karakter kepramukaan belum sepenuhnya diterapkan Kurangnya pemahaman guru dan 	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi dan menganalisis resiko, mengembangkan strategi mitigasi, meningkatkan kualitas asesmen dan meningkatkan keterampilan gurudan pengembang kurikulum serta menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien Memberikan edukasi kepada seluruh sekolah keagamaan terkait pentingnya kegiatan ekstrakurikuler serta mengalokasikan anggaran dana BOS dan dana lainnya dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekstrakurikuler Mewajibkan seluruh sekolah keagamaan untuk mengaktifkan Gugus Depan Pramuka di lembaga masing masing dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan kepramukaan Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan SDM sekolah keagamaan serta menyiapkan 	<ul style="list-style-type: none"> Bidang Penmad Bidang PD Pontren Pembimas Kristen Pembimas Katholik Pembimas Hindhu Pembimas Buddha

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
		<p>pengembang kurikulum tentang konsep cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan dan cara mengintegrasikannya dalam kurikulum, keterbatasan sumber daya, waktu dan dukungan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya sekolah keagamaan dengan predikat akreditasi B • Kurangnya fasilitas pendukung dalam meningkatkan kualitas satuan pendidikan untuk menghasilkan sekolah keagamaan yang unggul • Kurangnya dukungan pendanaan proses seleksi dan persiapan siswa mengikuti kompetisi siswa tingkat nasional • Kurangnya pengetahuan dalam pengisian instrument Evaluasi Diri sehingga nilai akhir tidak sepenuhnya memperoleh capaian nilai pengelolaan partisipatif kategori baik • Bahan materi ajar kurang relevan dengan perkembangan teknologi 	<p>dukungan finansial</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan edukasi kepada seluruh komponen sekolah keagamaan untuk mempersiapkan data dukung yang memadai sehingga hasil pengelolaan partisipatif kategori baik • Pelatihan/Bimtek pembuatan materi ajar berbasis DIGITAL 	
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Distribusi guru dan tenaga kependidikan yang tidak merata • Kesempatan guru untuk mengikuti pelatihan PPG terbatas • Kurangnya kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan • Sinkronisasi data guru belum 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pembinaan dan koordinasi terkait distribusi guru agar merata pada satuan Pendidikan di daerah yang ada. • Peningkatan SDM dan kualitas guru serta pemerataan program 	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Penmad • Bidang PD Pontren • Pembimas Kristen • Pembimas Katholik • Pembimas Hindhu • Pembimas Buddha

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
		maksimal <ul style="list-style-type: none"> Sarana prasana yang tidak merata dan terbatas 	PPG <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi dan konsultasi terhadap pemerintah pusat yang terkait Sinkronisasi data guru antara SIMPATIKA dan Dapodik Sosialisasi dan updating data 	
Bidang Tata Kelola				
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Adanya pemahaman bahwa hasil perencanaan sama / stagnan dengan hasil perencanaan dan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Adanya pelaksana perencanaan dan anggaran yang kurang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pemahaman bahwa hasil perencanaan berdasarkan konsep perencanaan dan target yang ditentukan sesuai kurun waktu yang ditentukan (misalkan dari Renstra lima Tahunan : berarti dalam lima tahun program dan kegiatan mirip mirip, karena sudah direncanakan selama lima tahun beserta target-targetnya) Melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pelaksana perencanaan dan anggaran agar bertambah berkualitas hasil perencanaannya 	<ul style="list-style-type: none"> Bagian Tata Usaha : Tim Perencanaan , Data dan Informasi
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	Adanya penyelewengan jabatan terhadap kebijakan yang berdampak terhadap pelayanan public Adanya indikasi pelayanan public yang tidak memuaskan Adanya pelayanan public yang tidak sesuai dengan prosedur	Melakukan pengendalian dengan komitmen pimpinan dan evaluasi secara berkala Melakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat Melakukan penyusunan SOP yang sesuai dengan standar layanan	<ul style="list-style-type: none"> Kepala Kanwil Kepala Bagian Tata Usaha Kepala Bidang Pembimas

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
		Adanya hasil SPI yang tidak sesuai dengan standar dari KPK Adanya satuan kerja yang tidak bias diukur akuntabilitas kinerja dan anggaran Adanya satuan kerja yang tidak melakukan manajemen resiko kegiatan Adanya satuan kerja yang tidak bias melaksanakan reformasi birokrasi	Melakukan sosialisasi terkait pengisian SPI KPK Menyelesaikan laporan kinerja dan anggaran sesuai standar Melakukan penilaian resiko terhadap kinerja kegiatan Melakukan pendampingan dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	Adanya ketidaktertiban administrasi dalam pengelolaan Keuangan dan BMN Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang rendah Penyampaian Laporan Keuangan dan BMN Semester I dan II yang tidak sesuai standar dan tepat waktu	Menyelesaikan pengelolaan keuangan dan BMN sesuai regulasi. Menurunkan adanya deviasi halaman III DIPA Menyampaikan Laporan Keuangan dan BMN sesuai standar dan tepat waktu Melakukan pembinaan teknis pengelolaan Keuangan dan BMN berbasis SAKTI	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kanwil • Kepala Bagian Tata Usaha • Kepala Bidang • Pembimas
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)	Proses yang dilakukan belum sepenuhnya profesional: Seleksi ASN masih belum dapat sepenuhnya menjamin profesionalisme dan keahlian teknis yang relevan dengan posisi yang dibutuhkan Penempatan pegawai tidak sesuai kompetensi ditambah dengan pembinaan karier dan pengembangan kompetensi kurang Sistem Penilaian Kinerja yang belum objektif dan tingginya potensi pelanggaran disiplin dan etika ASN	Penerapan rekrutmen berbasis merit dan system seleksi yang transparan Penempatan pegawai sesuai kompetensi, minat dan kebutuhan organisasi Penyusunan program pembinaan karier, pelatihan dan pengembangan berkelanjutan Penguatan system penilaian kinerja yang objektif, terukur dan akuntabel Peningkatan pengawasan disiplin, kode etik serta reward and	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kanwil • Kepala Bagian Tata Usaha • Kepala Bidang • Pembimas

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
			punishment	
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	Kurangnya kolaborasi dan integrasi antara berbagai pemangku kepentingan seperti instansi terkait dan lembaga penegak hukum lainnya masih belum berjalan Dalam hal rekomendasi izin orang asing, dokumen legal pendukung tidak lengkap dan terjadinya keterlambatan dalam mengeluarkan rekomendasi	Melakukan koordinasi dan komunikasi secara rutin sesuai kesepakatan bersama antara pemangku kebijakan Penyusunan SOP yang terstruktur dan lengkap Ceklist dokumen yang valid sesuai layanan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kanwil • Kepala Bagian Tata Usaha • Kepala Bidang • Pembimas • Instansi Terkait
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	Adanya Dokumen surat yang penting rentan terhadap kebocoran informasi serta kehilangan dan kerusakan data jika tidak ada mekanisme keamanan yang kuat Arsip tidak tertata (masih manual) Kekeliruan dalam menetapkan variable pembangun dapat mempengaruhi capaian persentase Adanya persentase sarpras yang tidak dapat digunakan/rusak sebelum masa manfaat berakhir Timbulnya resistensi atau konflik internal akibat perubahan sarpras	Perlu penguatan system keamanan berupa system backup berkala menggunakan penyimpanan eksternal khusus dan penyimpanan online serta pemahaman Bersama antar pelaku tata persuratan. Digitalisasi arsip secara bertahap Keseragaman standar arsip Perbaikan kualitas data Peningkatan sarana alih media arsip Pelaporan dan evaluasi secara kontinu Pastikan sarpras yang dikembangkan memiliki asuransi dan periode garansi yang memadai dari penyedia Libatkan perwakilan pengguna sejak tahap perencanaan roadmap untuk menumbuhkan rasa kepemilikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kanwil • Kepala Bagian Tata Usaha • Kepala Bidang • Pembimas • Ketua Tim dan Anggota

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	Adanya keterbatasan dalam kualitas SDM membuat konten, literasi digital dan mengakses informasi Lemahnya koordinasi Peningkatan persentase publikasi tidak diikuti oleh peningkatan persentase interaksi Peningkatan konten tidak didukung oleh sumber daya teknis yang memadai	Perlu disepakati Bersama cara cepat mengakses dokumen / data sesuai kewenangan masing-masing. Peningkatan koordinasi dengan bidang terkait Peningkatan literasi digital pegawai Tetapkan standar minimum kualitas sebelum publikasi Alokasikan anggaran untuk peningkatan infrastruktur IT dan perangkat keras/lunak yang mendukung produksi konten	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Kanwil • Kepala Bagian Tata Usaha • Kepala Bidang • Pembimas • Ketua Tim dan Anggota
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Data yang sama tersimpan di beberapa tempat dan tidak sinkron menyebabkan kebingungan, inefisiensi, dan peningkatan biaya operasional • Adanya ketidakjelasan dalam mengakses data yang diperlukan di stakeholder internal (Bag TU, Bidang, Pembimas) 	Perlu adanya bank Data / Data base/server yang bisa diakses sewaktu waktu sesuai dengan kewenangan masing-masing	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian Tata Usaha • Kepala Bidang • Pembimas • Ketua Tim dan Anggota
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	Adanya masalah terkait Terbatasnya pengetahuan tentang konsep layanan prima dan kurangnya kompetensi dalam memberikan pelayanan menjadi kendala utama. Sebaran guru dan siswa tidak merata Data pendidikan tidak sinkron Rendahnya capaian program prioritas dan minimnya kompetensi SDM pada unit-unit tertentu Rendahnya jumlah kebijakan	Perlu adanya pembinaan bertahap / berjenjang sesuai periode waktu yang ditentukan Peningkatan sebaran guru dan siswa agar merata Peningkatan data pendidikan Menetapkan target yang terukur dan realistis untuk setiap unit Membuat Standard Operating Procedure (SOP) layanan yang seragam nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Bagian Tata Usaha • Kepala Bidang • Pembimas • Ketua Tim dan Anggota

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
		<p>pendidikan yang dipublikasikan melalui media serta rendahnya tingkat akses masyarakat terhadap informasi kebijakan</p> <p>Ketidaksesuaian infrastruktur dengan standar keamanan TIK</p> <p>Ketidaksesuaian data prioritas dengan indicator RPJMN dan Renstra</p> <p>Publik tidak mengetahui capaian kinerja Kemenag karena publikasi kurang optimal</p> <p>Pemberitaan media tentang Kemenag didominasi isu negative sehingga menutupi peningkatan kinerja</p> <p>Data capaian dari unit teknis lambat diterima oleh Humas sehingga komunikasi kinerja tidak cepat dirilis</p> <p>Ketidaksinkronan narasi antara pusat-kanwil-kankemenag menimbulkan persepsi berbeda soal kinerja</p> <p>Minimnya konten visual/data storytelling yang membuat capaian terlihat kurang menarik bagi public</p> <p>Informasi kebijakan pendidikan tidak segera dipublikasikan</p> <p>Konten kebijakan tidak tersampaikan secara utuh atau disalahartikan oleh media maupun masyarakat</p> <p>Jumlah publikasi kebijakan rendah karena humas tidak memperoleh bahan cukup dari bidang pendidikan</p> <p>Media local kurang tertarik mengangkat isu pendidikan kemenag</p>	<p>Meningkatkan jumlah kebijakan pendidikan yang dipublikasikan melalui media dan memperluas variasi media yang digunakan</p> <p>Melakukan assessment tahunan terhadap kebutuhan perangkat</p> <p>Menetapkan standar format, definisi operasional dan metadata yang selaras dengan RPJMN dan Renstra</p> <p>Menyusun kalender publikasi capaian kinerja secara rutin (bulanan/triwulan)</p> <p>Mengaktifkan SOP alur informasi cepat dari unit teknis ke Humas khusus untuk rilis capaian kinerja</p> <p>Melakukan media monitoring harian dan merilis klarifikasi atau kontra narasi saat muncul isu negatif</p> <p>Mengonsolidasikan narasi kinerja yang seragam dengan pusat dan daerah</p> <p>Memperbanyak infografis, video singkat dan storytelling capaian agar mudah dipahami public</p> <p>Membentuk jalur koordinasi khusus dengan bidang pendidikan untuk mendapatkan bahan publikasi lebih cepat</p> <p>Melakukan briefing materi untuk memastikan pesan kebijakan yang akan disampaikan tidak multitafsir</p> <p>Menjalin kemitraan aktif dengan</p>	

No	Sasaran	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Pj Perlakuan Risiko
		<p>karena dianggap tidak berita utama</p> <p>Minimnya juru bicara teknis yang siap memberi penjelasan ke media</p> <p>Akses informasi publik belum merata di kanal digital Kemenag (website belum diperbarui, IG kurang aktif)</p> <p>Kualitas konten publikasi rendah: kurang menarik, terlalu teknis atau tidak user-friendly</p> <p>Tidak ada pengukuran yang jelas terhadap keterjangkauan informasi (engagement rendah)</p> <p>Publik sulit mencari informasi karena tidak ada standarisasi penamaan atau struktur konten di website/medsos</p> <p>Tidak adanya respons cepat terhadap pertanyaan publik sehingga menurunkan kepercayaan</p>	<p>media lokal melalui press realease rutin dan media gathering tematik</p> <p>Memproduksi konten populer (FAQ, carousel, video pendek) yang menjelaskan kebijakan dengan sederhana</p> <p>Menyiapkan spokesperson teknis yang disiapkan untuk wawancara atau klarifikasi</p> <p>Meningkatkan frekuensi dan konsistensi update di website, IG dan kanal humas lain</p> <p>Mengembangkan standar kualitas konten: visual rapi, Bahasa sederhana, ringkas dan informative</p> <p>Melakukan analisis insight media social dan website untuk memetakan kebutuhan public</p> <p>Menata ulang struktur informasi pada website agar mudah dicari (SEO dasar, menu tematik)</p> <p>Mengaktifkan layanan respons cepat melalui DM, komentar atau helpdesk informasi</p>	

2.5. Rumusan Pengukuran/Metadata

Tabel Rumusan Pengukuran Kinerja ini menjelaskan pengukuran pada Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagai berikut :

Rumusan Pengukuran :

1. Kode SK
2. IKS
3. Kode IKS
4. IKS
5. Cara Pengukurannya
6. Penanggung jawab dari tiap IKS
7. Sumber Data IKS
8. Variabel Pembangun
9. Periode Pelaporan IKS

Pada Tabel ini diuraikan 20 Sasaran Kegiatan dan 82 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Adapun secara garis besar , cara pengukuran meliputi :

1. Indeks
2. Persentase
3. Persentase Peningkatan
4. Rasio
5. Jumlah
6. Rata-Rata Nilai
7. Instrumen yang ditentukan sesuai regulasi

Metadata :

Metadata pada prinsipnya menjelaskan tentang IKS yang dipilih, selanjutnya diuraikan tentang :

- | | |
|---|--|
| • Nama SK, | • Waktu / Cut off Ketersediaan Data, |
| • Nama Metadata IKS, | • Klasifikasi, |
| • Instansi – Unit Kerja Penghasil, | • Level Estimasi, |
| • Nama Indikator, | • Apakah indikator dapat diakses umum?, |
| • Konsep/Definisi, | • Apabila dapat diakses umum, |
| • Interpretasi, | • apakah sudah tersedia publikasi data?(Disebutkan nama publikasinya). |
| • Metode / Rumus Perhitungan, | |
| • Nama Variabel Pembangun, | |
| • Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun, | |
| • Ukuran/Satuan, | |

Tabel 22:
Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2025 - 2029

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BIDANG AGAMA								
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama	IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	IKUB = (Nilai Dim.Toleransi + Nilai Dim.Kesetaraan + Nilai Dim.Kerjasama) / 3	KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	1. Nilai Dimensi Toleransi 2. Nilai Dimensi Kesetaraan 3. Nilai Dimensi Kerjasama	Tahunan
		IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan: a: Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b: Jumlah total KUA secara nasional	Bid. Urais	Bid. Urais	Persentase KUA penyelenggara Early Warning System	Tahunan
		IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya	Sekjen : KUB	Sekjen : KUB / FKUB, Kab/Kota	1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERA NI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b= Jumlah audiens	KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan 2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya			sebelumnya	
		IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persentase Peningkatan = $[(a-b) / b] \times 100$ Keterangan : a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya	KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	Rumusan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
		IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan b = Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan	KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar	Tahunan
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak	IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja kategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat)2. Jumlah total penyuluh agama	Tahunan
		IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	$X = b / a$, sehingga rasionya menjadi 1: X Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Tahunan
		IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi b = Jumlah semua fasilitator	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi 2. Jumlah semua fasilitator bimbingan perkawinan agama	

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				bimbingan perkawinan agama				
		IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan: a = Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan b = Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS	Tahunan
		IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun berjalan b = jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun sebelumnya	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun berjalan 2. Jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan tahun sebelumnya	
		IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan: a = Jumlah rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan b = Jumlah semua rumah ibadah agama yang ada.	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan 2. Jumlah semua rumah ibadah agama yang ada	
		IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persentase = (a / b) x 100 Keterangan: a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata	Bidang Urais	Bidang Urais dan Seksi Bimas Islam Kab/Kota	Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla	Tahunan
		IKSK.2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] x 100 Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.2.9	Persentase buku keagamaan	Persentase = (a / b) x 100	Khonghucu,	Bag. TU : KUB,	1. Jumlah naskah/buku	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Keterangan: a = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan b = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya	Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan 2. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya	
		IKSK.2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan	Bidang Urais	Bidang Urais dan Seksi Bimas Islam Kab/Kota	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan 2. Jumlah total hasil pemantauan	Tahunan
		IKSK.2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek	Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bag. TU : KUB, Khonghucu, Bid. Urais, Penais, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindu, Buddha	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek	Tahunan
		IKSK.2.12	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang sesuai prinsip syariah, akuntabel, dan profesional	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah lembaga yang sesuai prinsip b = Jumlah lembaga keseluruhan	Bidang Penaiszawa	Bidang Penaiszawa dan Seksi Bimas Islam Kab/Kota	Lembaga sesuai dengan Prinsip Syariah, akuntabel, dan profesional	Tahunan
		IKSK.2.13	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah lembaga zakat dan wakaf yang dibina b = Jumlah lembaga zakat dan wakaf keseluruhan	Bidang Penaiszawa	Bidang Penaiszawa dan Seksi Bimas Islam Kab/Kota	Lembaga zakat dan wakaf	Tahunan
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah calon jemaah lansia yang diberangkatkan pada tahun berjalan b = Total kuota jemaah lansia yang	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	Persentase jemaah haji lansia yang diberangkatkan sesuai kuota tahunan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				tersedia pada tahun berjalan				
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji	IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah PLHUT yang telah memenuhi seluruh atau sebagian besar indikator standar pelayanan dan sarana-prasarana b = Jumlah total PLHUT yang terdaftar dan aktif	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	Persentase PLHUT yang memenuhi standar pelayanan dan sarana-prasarana	Tahunan
		IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas b = Jumlah total responden survei	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	Jumlah pengguna PLHUT yang menyatakan puas2. Jumlah total pengguna PLHUT yang menjadi responden survei	Tahunan
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji	IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang memenuhi standar b = Jumlah total unit layanan yang tersedia	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	1. Jumlah unit layanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) yang sesuai standar 2. Jumlah total unit layanan yang disediakan untuk jemaah haji	Tahunan
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji	IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 b = Jumlah total petugas haji yang dievaluasi	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	1. Jumlah petugas haji yang memperoleh nilai kinerja di atas 75 2. Total petugas haji yang dievaluasi kinerjanya	Tahunan
		IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik b = Jumlah total calon jemaah haji	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	1. Jumlah calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haj 2. Jumlah total calon jemaah haji pada tahun berjalan	Tahunan
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara	IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A); a. Lembaga penyelenggara	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a = Jumlah PIHK dan/atau PPIU yang memperoleh akreditasi A pada tahun berjalan	Bidang PHU	Bidang PHU dan Seksi PHU Kab/Kota	Persentase PIHK terakreditasi A2. Persentase PPIU terakreditasi A	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ibadah Haji Khusus dan Umrah		haji khusus; b. Lembaga penyelenggara umrah	b = Jumlah total PIHK dan/atau PPIU yang terdaftar aktif pada tahun berjalan				
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH								
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan	IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus dengan predikat sangat baik	Persentase = (a / b) × 100 a = Siswa/Santri satuan pendidikan umum yang lulus dengan predikat sangat baik b = Siswa/Santri satuan pendidikan kekhasan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus.	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindu, Buddha	1 Siswa/Santri satuan pendidikan umum yang lulus dengan predikat sangat baik 2 Siswa/Santri satuan pendidikan kekhasan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang lulus.	Tahunan
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas	IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif b = Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindu, Buddha	1. Jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif 2. Total jumlah madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan	Tahunan
		IKSK.9.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras b = Total jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindu, Buddha	1. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan yang memenuhi SNP sarpras 2. Jumlah madrasah, pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan	Tahunan
		IKSK.9.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan b = Jumlah siswa madrasah,	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindu, Buddha	1. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun berjalan 2. Jumlah siswa madrasah, pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				pesantren, atau satuan pendidikan keagamaan pada tahun sebelumnya			pada tahun sebelumnya	
		IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD b = Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha yang pernah mengikuti PAUD 2. Total jumlah siswa kelas 1 MI, SDTK, Adhi Widyalyaya, atau Mula Dhammasekha	Tahunan
		IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah b = Total jumlah satuan pendidikan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah 2. Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Rumus = Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan	Bidang PD Pontren	Bidang PD Pontren dan Seksi PD Pontren Kab/Kota	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren	Tahunan
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif	IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi	1. Literasi Membaca : Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi minimum dalam asesmen kompetensi bidang Literasi Membaca b = Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi 2. NumerasiRumus: Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah peserta didik yang memenuhi standar kompetensi	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Literasi Membaca. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang memenuhi Standar Kompetensi Minimum bidang Numerasi. Jumlah peserta didik madrasah, satuan pendidikan umum	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan			minimum dalam asesmen kompetensi bidang Numerasi $b = \text{Jumlah peserta didik yang mengikuti asesmen kompetensi}$			dengan kekhasan agama, dan pendidikan keagamaan yang mengikuti AKM	
		IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: $a = \text{Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas}$ $b = \text{Total jumlah satuan pendidikan}$	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: $a = \text{Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran}$ $b = \text{Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran}$	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran	Tahunan
		IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Rumus = Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Tahunan
		IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persentase Peningkatan = $[(a-b) / b] \times 100$ Keterangan: $a = \text{Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan}$ $b = \text{Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan}$	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan 2. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan	Tahunan
		IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: $a = \text{Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan}$	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas :	1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan 2. Jumlah total perangkat kurikulum	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada		Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha		
		IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah Satuan Pendidikan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah Satuan Pendidikan minimal B 2. Total jumlah Satuan Pendidikan	Tahunan
		IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan unggul 2. Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah satuan pendidikan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan dengan program pendidikan bilingual 2. Total jumlah satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional b = Total jumlah siswa	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional 2. Total jumlah siswa	Tahunan
		IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang memperoleh kategori baik	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah satuan pendidikan yang memperoleh nilai pengelolaan partisipatif kategori baik 2. Total jumlah satuan pendidikan yang dinilai	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				pada nilai pengelolaan partisipatif b = Total jumlah madrasah, satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, dan satuan pendidikan keagamaan formal yang dinilai				
		IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia. 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran	Tahunan
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah guru yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru	Tahunan
		IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru)(Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Jumlah guru madrasah2. Jumlah siswa madrasah	Tahunan
		IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi b = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya	Tahunan
		IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru agama yang	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik,	Bidang Pendidikan Madrasah, PD	1. Jumlah guru agama yang memiliki sertifikat pendidik 2. Total jumlah guru agama	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				memiliki sertifikat pendidik b = Total jumlah guru agama	Bimas Hindu, Bimas Buddha	Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha		
		IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Persentase = (a / b) × 100% Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG	Tahunan
		IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK	Tahunan
		IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi	Tahunan
		IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil b = Total Jumlah semua pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP)	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil 2. Total Jumlah semua pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							(AKP)	
		IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru	Tahunan
		IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu. b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan	Tahunan
		IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persentase Peningkatan = [(a-b) / b] × 100 Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG pada tahun sebelumnya	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) pada tahun sebelumnya	Tahunan
		IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persentase Rekomendasi = [(a/ b) x 100 a.= Jumlah pengadaan guru b = Jumlah rencana kebutuhan	Bid. Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katolik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan 2. Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun	Tahunan
BIDANG TATA KELOLA								
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran	IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Sekretariat/TU : Tim Perencanaan & Data	Sekretariat/TU : Tim Perencanaan & Data	1. Rencana Anggaran 2. Realisasi Anggaran 3. Output 4. Outcome	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi	IKSK.13.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Menggunakan Instrumen dari Menpan RB	Sekretariat/TU : Tim Ortala	Sekretariat/TU : Tim Ortala	SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	Tahunan
		IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Menggunakan Instrumen dari Menpan RB	Sekretariat/TU : Tim Ortala	Sekretariat/TU : Tim Ortala	PMPZI	Tahunan
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN	IKSK.13.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Tahunan
		IKSK.13.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan	Sekretariat/TU : Tim Ortala dan TLHP	Sekretariat/TU : Tim Ortala dan TLHP dan Tim Keuangan & BMN, Tim Hukum POA	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1), Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)	Tahunan
		IKSK.13.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Rumus: $Y = (X2/X1) \times 100$	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun Laporan Keuangan dan Jumlah satuan kerja yang menyusun Laporan Keuangan sesuai standar dan tepat waktu	Tahunan
		IKSK.13.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi	Tahunan
		IKSK.13.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN	Tahunan
SK.15	Meningkatnya	IKSK.14.1	Indeks Profesionalisme ASN	Menggunakan Instrumen yang	Sekretariat/TU :	Sekretariat/TU :	Variabel Profesionalisme ASN	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)			disusun BKN	Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.	
		IKSK.14.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan	Tahunan
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum	IKSK.15.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum	Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing	Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum	Triwulan
		IKSK.15.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan b. Jumlah rekomendasi izin orang asing	Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing	Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing	1. Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS) 2. Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS) 3. Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP) 4. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) 5. Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA 6. Rekomendasi Izin Tinggal Dinas 7. Izin Penelitian 8. Izin Studi 9. Izin Penelitian	Triwulan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa	IKSK. 16.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi	Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)	Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)	10. Izin Studi 1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)	Tahunan
		IKSK. 16.2	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persentase = (a / b) × 100 Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana	Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)	Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)	1. Sarana dan prasarana 2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran	Triwulan dan tahunan
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi	IKSK.17.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	1. Kebijakan dan Regulasi 2. Struktur Organisasi dan SDM PPID 3. Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik 4. Layanan Informasi Publik 5. Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi 6. Monitoring dan Evaluasi	Tahunan
		IKSK.17.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan. b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik	Tahunan
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi	IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	- Pengumpulan data (misalnya, wawancara atau survei) dan kemudian - mengklasifikasikannya ke dalam salah satu dari empat skala pengukuran: nominal, ordinal,	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi	1. Prinsip SDI 2. Kualitas Data 3. Proses Bisnis Statistik 4. Kelembagaan; dan 5. Sistem Statistik	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKS	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKS	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	interval, dan rasio. Persentase = $((a - b) / b) \times 100$ Keterangan: a. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah data statistik yang dipublikasi pada tahun sebelumnya	Sekretariat/TU : Humas, Protokol, dan Sistem Informasi	Sekretariat/TU : Humas, Protokol, dan Sistem Informasi dan Tim Perencanaan & Data	1. Data Statistik 2. Media Informasi Publik	Tahunan
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan	IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan	Sekretariat/TU dan Bidang Pendis, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Realisasi anggaran pendidikan 2. Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan) 3. Rencana kerja dan target output yang ditetapkan	Tahunan
		IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan b. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya	Sekretariat/TU	Sekretariat/TU (semua Tim)	1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan 2. Capaian IKU tahun sebelumnya 3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)	Tahunan
		IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan	Sekretariat/TU dan Bidang Pendis, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Daftar kebijakan prioritas pendidikan 2. Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) 3. Kanal/media penyampaian informasi	Tahunan
		IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui	Persentase = $(a / b) \times 100$ Keterangan: a. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan b. Nilai capaian akses dan kualitas	Sekretariat/TU dan Bidang Pendis, Pembimas : Kristen, Katholik,	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas :	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi 2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi 3. Tingkat keterbacaan dan	Tahunan

KODE SK	SASARAN KEGIATAN	KODE IKSK	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA IKSK	NAMA VARIABEL PEMBANGUN	PERIODE PELAPORAN IKSK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			media	informasi tahun sebelumnya	Hindhu, Buddha	Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	4. pemahaman konten Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal	
		IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan	Sekretariat/TU dan Bidang Pendis, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	Bidang Pendidikan Madrasah, PD Pontren, PAIS, Pembimas : Kristen, Katholik, Hindhu, Buddha	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK	Tahunan
		IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persentase = (a / b) X 100 Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra	Sekretariat/TU : Tim Perencanaan & Data	Sekretariat/TU : Tim Perencanaan & Data dan Sub Bag TU Kab/Kota	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data	Tahunan

Keterangan :

Jumlah SK – IKSK dengan PHU

1. Jumlah SK : 20 SK
2. Jumlah IK SK : 80 IKSK
3. SK dan IKSK PHU hanya sampai Tahun 2025,
Tahun 2026 seterusnya SK, IKSK dan Anggaran sudah tidak di Kementerian Agama (Sudah di Kementerian Haji dan Umrah)

Jumlah SK – IKSK Tanpa PHU

1. Jumlah SK : 15 SK
2. Jumlah IK SK : 73 IKSK

BAB III

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Target Kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, saat ini menetapkan 20 Sasaran Kegiatan dan 80 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan. Tetapi mulai tahun 2026, karena Penyelenggaraan Haji dan Umroh sudah menjadi Kementerian sendiri maka Sasaran Kegiatan berjumlah : 15 Sasaran Kegiatan dan 73 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan sebagaimana akan diuraikan di Bab II ini. Dalam penetapan target Kinerja ditetapkan beberapa kategori sebagai berikut :

1. Penentuan Target Indikator Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu bersifat akumulasi target (rata-rata target) yang ditopang dari stakeholder internal sesuai tugas dan fungsinya masing-masing, mulai Dari Bagian Tata Usaha, Bidang Urusan Agama Islam, Bidang Penerangan Agama Islam, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan pondok Pesantren, Bidang Pendidikan Agama Islam, Pembimbing Masyarakat Kristen, Pembimbing Masyarakat Katolik, Pembimbing Masyarakat Hindhu, Pembimbing Masyarakat dan Pembimbing Masyarakat Buddha, yang didukung oleh Tim nya masing-masing, sedangkan Untuk Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah tidak dimasukkan dalam target Kinerja, karena sudah pisah menjadi Kementerian tersendiri.
2. Penentuan Target Indikator Kinerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu mempertimbangkan target yang ditentukan oleh masing-masing direktoral di Eselon-1 juga mempertimbangkan target (rata-rata target) yang ditopang dari stakeholder internal Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Se-Bengkulu sebanyak 10 Satker Kankemenag dan 32 Satker MTsN dan 17 Satker MAN.
3. Tabel Target Kinerja meliputi tiga bidang, Yakni Bidang Agama, Bidang Pendidikan dan Bidang Tata Kelola, sebagai berikut :
 - a. SK / IKSK
 - b. Sasaran Strategis (Impact)/Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator.
 - c. Satuan
 - d. Baseline 2024
 - e. Target Kinerja Tahun : 2025, 2026, 2027, 2028, 2029
 - f. Unit Organisasi Pelaksana.Lebih detil diuraian pada tabel berikut ini :

Tabel 23:
Target Kinerja Tahun 2025 - 2029

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
BIDANG AGAMA									
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama								KUB, Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 73,00	Nilai	73,40	73,45	77	79	82	85	
IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	0	31	31	35	40	50	
IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	34,27	41,67	47	50	55	65	
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persen	32,275	70,75	72	75	78	79	
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	70,75	74,6	80	80,3	82	85	
IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	34,43	75	80	82	85	87	
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak								Khonghucu, Bimas Islam, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	82,00	70	70	75	80	85	
IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	1 : 5	1:14	1:14	1:15	1:17	1:18	
IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	70	65	70	70	73	75	
IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	0,4	25	30	32	48	55	
IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	16,4	30	35	40	55	60	
IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	17,3	25	30	35	40	50	

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	40,5	40,2	45,3	50,2	55,3	60,2	
IKSK.2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	31,5	29,5	35	37	38	40	
IKSK.2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	31,77	46,92	50	55	60	65	
IKSK.2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen	N/A	0,82	1	2	3	4	
IKSK.2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	7,5	75	80	83	87	90	
IKSK.2.12	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Persen	N/A	75	80	83	87	90	
IKSK.2.13	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	Persen	N/A	80	80	83	85	90	
IKSK.2.14	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Persen	N/A	80	80	83	85	90	
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji.								Bid. PHU
IKSK. 3.1	Persentase calon jemaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen	5,00	80,00	-	-	-	-	
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji.								Bid. PHU
IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen	80,00	80,00	-	-	-	-	
IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu			80,00	-	-	-	-	
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji.								
IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen	87,50	80,00	-	-	-	-	
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji.								Bid. PHU

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen	80,00	75,00	-	-	-	-	
IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen	70,00	75,00	-	-	-	-	
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah								
IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	Persen							Bid. PHU
	a. Lembaga penyelenggara haji khusus;		72,05	75,00	-	-	-	-	
	b. Lembaga penyelenggara umrah		86,01	75,00	-	-	-	-	
BIDANG PENDIDIKAN DASAR MENENGAH									
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan								Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan kekhasan dengan predikat sangat baik pendidikan pesantren yang lulus	Persen	N/A	2	3	5	7	10	
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan keagamaan yang berkualitas								Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Persen	20,5	70	75	80	85	90	
IKSK.9.2	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana	Persen	60	65	70	73	77	80	
IKSK.9.3	Persentase peningkatan jumlah siswa pada satuan pendidikan dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren	Persen	45	50	65	65	70	75	
IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha)	Persen	70	75	80	85	90	95	
IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	55	55	65	65	70	75	

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah	N/A	5	7	9	12	15	
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan.								Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:								
	a literasi membaca	Nilai	90,23	52	55	57	60	65	
	b numerasi	Nilai	93,69	52	55	57	60	65	
IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	30,5	25	30	50	50	75	
IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	54,4	85	85	92	95	97	
IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah		75	75	80	85	85	
IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	20,5	75	75	80	85	85	
IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	27,6	10	15	20	25	30	
IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen		62	70	72	75	77	
IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	2,8	70	75	80	85	90	
IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen		90	90	91	92	93	
IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,18	0,5	0,5	1	1	1	
IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen		25	30	37,5	37,5	50	
IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen	13,78	30	30	40	45	50	
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan.								

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	15,25	80	80	87	90	93	Pendis, Bimas Kristen, Bimas Katolik, Bimas Hindu, Bimas Buddha
IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	1 : 13	1:10	1:10	1:11	1:12	1:13	
IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	43,4	82	82	82	82	82	
IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	38,1	85	85	85	85	85	
IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	10,5	40	45	50	55	60	
IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen		70	75	100	100	100	
IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	24,7	90	90	90	90	90	
IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persen		80	80	80	85	100	
IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen		90	90	93	95	98	
IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen		90	90	93	95	98	
IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen		26	28	35	45	55	
IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	26,14	35	40	45	50	55	
BIDANG TATA KELOLA									
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran								Sekretariat/TU : Tim Perencanaan & Data
IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	92,72	70	70	72	73	75	
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi								Sekretariat/TU : Tim Ortala
IKSK.13.1	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar)	Persen		60	65	10	35	58	
IKSK.13.2	Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75	Nilai		75	75	25	27	29	

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN								Sekretariat/TU : Tim Keuangan dan BMN
IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai		93,5	93,5	94,5	95	95,5	
IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen		10	15	30	60	75	
IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	93,33	70	75	80	85	90	
IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen		70	75	80	85	90	
IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	70,11	85,15	90	95	100	100	
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai).								Sekretariat/TU : Tim Sumber Daya Manusia Aparatur
IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	56,18	75	75	78	79	80	
IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Persen		55	65	75	85	95	
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum								Sekretariat/TU : Hukum, Kerja sama, dan Pengawasan Orang Asing
IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	95,00	95	95	97	98	98	
IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	76,15	98	98	99	99	99	
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa								Sekretariat/TU : Umum (Barang dan jasa, PTSP, dan Arsip)
IKSK. 17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	45	75	75	75	75	75	
IKSK. 17.2	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen	75	80	80	90	95	95	
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi								Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi
IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Tingkat	56,5	80	80	85	90	95	
IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	24,5	96	96	98	98	100	
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi								

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET KINERJA					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks		82	82	87	90	96	Sekretariat/TU : Humas, Protokoler, dan Sistem Informasi
IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen		83	83	86	87	95	
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan								
IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	72,5	85	85	87	89	90	Sekretariat/TU : Tim Terkait
IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1,36	80	85	90	95	95	
IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	10,00	70	75	75	80	85	
IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen		70	75	75	80	85	
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	65,05	80	85	90	95	95	
IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen		80	80	85	85	90	

3.2. Kerangka Pendanaan

Pentuan Kerangka Pendanaan meliputi penggabungan semua Unit Organisasi .

1. Tingkat Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, mulai Dari Bagian Tata Usaha, Bidang Urusan Agama Islam, Bidang Penerangan Agama Islam, Bidang Pendidikan Madrasah, Bidang Pendidikan pondok Pesantren, Bidang Pendidikan Agama Islam, Pembimbing Masyarakat Kristen, Pembimbing Masyarakat Katholik, Pembimbing Masyarakat Hindhu, Pembimbing Masyarakat dan Pembimbing Masyarakat Buddha.
2. Tingkat Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota Se-Bengkulu sebanyak 10 Satker Kankemenag dan 33 Satker MTsN dan 13 Satker MAN.
3. Unit Organisasi dan Program meliputi :
 - Sekretariat Jenderal**
 - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
 - Program Dukungan Manajemen
 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam**
 - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - Program Dukungan Manajemen
 - Ditjen Pendidikan Islam**
 - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
 - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
 - Program Dukungan Manajemen
 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen**
 - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
 - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
 - Program Dukungan Manajemen
 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik**
 - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - Program Dukungan Manajemen
 - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
 - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
 - Program Dukungan Manajemen
 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindhu**
 - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
 - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
 - Program Dukungan Manajemen
 - Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha**
 - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun
 - Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
 - Program Dukungan Manajemen
 - Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah**
 - Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama
 - Program Dukungan Manajemen
4. Adapun Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan sebagaimana terlampir, dibawah ini :

Tabel 24:
Kerangka Pendanaan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu

PROGRAM / KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
025	KEMENTERIAN AGAMA (PROVINSI BENGKULU)						
025.01	Sekretariat Jenderal	26.286.733.000	351.479.782.000	378.810.750.000	378.810.750.000	378.810.750.000	1.530.448.864.0001
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	271.649.000	866.078.000	870.750.000	870.750.000	870.750.000	3.780.000.000
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama	271.649.000	866.078.000	870.750.000	870.750.000	870.750.000	3.780.000.000
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen	26.015.084.000	350.631.704.000	377.940.000.000	377.940.000.000	377.940.000.000	1.526.668.864.000
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN	17.930.000	36.500.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	70.000.000
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian	259.370.000	250.750.000	260.000.000	270.000.000	280.000.000	1.110.000.000
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN	14.194.426.000	96.739.840.000	101.500.000.000	111.500.000.000	121.500.000.000	415.840.000.000
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana	160.990.000	170.270.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	855.990.000
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan	198.950.000	278.100.000	280.000.000	288.000.000	299.000.000	1.480.000.000
2103	Pembinaan Administrasi Umum	5.761.903.000	4.456.346.000	4.875.000.000	4.875.000.000	4.875.000.000	26.358.000.000
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan	155.864.000	203.634.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	355.864.000
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan	5.265.651.000	248.496.264.000	270.600.000.000	270.600.000.000	270.600.000.000	1.080.600.651.000
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam	11.204.378.000	12.245.627.000	13.553.854.000	14.342.446.000	16.126.718.000	18.465.813.000
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	10.402.874.000	11.065.599.000	12.293.799.000	13.026.994.000	14.679.343.000	16.917.854.000
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah	8.130.374.000	10.015.599.000	11.018.799.000	11.598.284.000	13.064.198.000	15.139.796.000
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf	292.500.000	292.500.000	300.000.000	300.000.000	320.000.000	3.139.796.000
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam	1.085.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.120.000.000	1.130.000.000	5.139.796.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah	895.000.000	1.050.000.000	1.275.000.000	1.428.710.000	1.615.145.000	1.778.058.000
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen	801.504.000	1.180.028.000	1.260.055.000	1.315.452.000	1.447.375.000	1.547.959.000
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam	801.504.000	1.180.028.000	1.260.055.000	1.315.452.000	1.447.375.000	1.547.959.000

PROGRAM / KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
025.04	Ditjen Pendidikan Islam	2.576.035.465.000	2.704.837.238.250	2.840.079.100.163	2.982.083.055.171	3.131.187.207.929	14.234.222.066.512
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	494.374.164.000	519.092.872.200	545.047.515.810	572.299.891.601	600.914.886.181	2.731.729.329.791
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam	270.000.000	0	350.000.000	400.000.000	450.000.000	71.391.155.750
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah	481.454.164.000	505.526.872.200	530.803.215.810	557.343.376.601	585.210.545.431	2.660.338.174.041
025.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	2.004.715.047.000	2.104.950.799.350	2.210.198.339.318	2.320.708.256.283	2.436.743.669.098	11.077.316.111.048
2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam	8.365.567.000	11.131.874.000	12.245.061.400	13.469.567.540	14.816.524.294	480.271.722.355
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah	1.894.217.969.000	1.988.928.867.450	2.088.375.310.823	2.192.794.076.364	2.302.433.780.182	10.466.750.003.818
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam	489.000.000	490.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	130.294.384.875
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen	289.048.000	1.752.724.000	2.752.724.000	3.752.724.000	4.752.724.000	425.176.625.673
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam	289.048.000	1.752.724.000	2.752.724.000	3.752.724.000	4.752.724.000	425.176.625.673
025.05	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen	1.427.849.000	1.838.579.000	2.160.000.000	2.191.000.000	2.207.000.000	9.824.428.000
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.000.000.000	1.240.000.000	1.400.000.000	1.420.000.000	1.430.000.000	6.490.000.000
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen	1.000.000.000	1.240.000.000	1.400.000.000	1.420.000.000	1.430.000.000	6.490.000.000
025.05.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	174.000.000	326.000.000	360.000.000	370.000.000	375.000.000	1.605.000.000
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen	174.000.000	326.000.000	360.000.000	370.000.000	375.000.000	1.605.000.000
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	174.000.000	326.000.000	360.000.000	370.000.000	375.000.000	1.605.000.000
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen	174.000.000	326.000.000	360.000.000	370.000.000	375.000.000	1.605.000.000
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen	253.849.000	272.579.000	400.000.000	401.000.000	402.000.000	1.729.428.000
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen	203.849.000	247.579.000	350.000.000	351.000.000	352.000.000	1.504.428.000
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen	50.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	225.000.000
025.06	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik	5.558.543.000	5.836.470.150	6.128.293.658	6.434.708.340	6.756.443.757	30.714.458.905
025.06.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	2.326.880.000	2.443.224.000	2.565.385.200	2.693.654.460	2.828.337.183	12.857.480.843

PROGRAM / KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik	2.326.880.000	2.443.224.000	2.565.385.200	2.693.654.460	2.828.337.183	12.857.480.843
025.06. WA	Program Dukungan Manajemen	488.135.000	512.541.750	538.168.838	565.077.279	593.331.143	2.697.254.010
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik	488.135.000	512.541.750	538.168.838	565.077.279	593.331.143	2.697.254.010
025.06.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038	33.153.788
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038	33.153.788
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	2.290.423.000	2.404.944.150	2.525.191.358	2.651.450.925	2.784.023.472	12.656.032.905
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik	2.290.423.000	2.404.944.150	2.525.191.358	2.651.450.925	2.784.023.472	12.656.032.905
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen	447.105.000	469.460.250	492.933.263	517.579.926	543.458.922	2.470.537.360
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik	447.105.000	469.460.250	492.933.263	517.579.926	543.458.922	2.470.537.360
025.07	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindhu	1.902.000.000	1.184.660.000	2.197.000.000	2.280.000.000	2.525.000.000	10.088.660.000
025.07.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.057.000.000	630.000.000	1.257.000.000	1.300.000.000	1.500.000.000	5.744.000.000
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu	1.057.000.000	630.000.000	1.257.000.000	1.300.000.000	1.500.000.000	5.744.000.000
025.07.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	350.000.000	130.000.000	375.000.000	385.000.000	400.000.000	1.640.000.000
2142	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Hindu	350.000.000	130.000.000	375.000.000	385.000.000	400.000.000	1.640.000.000
025.07.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	160.000.000	208.000.000	190.000.000	200.000.000	210.000.000	968.000.000
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu	160.000.000	208.000.000	190.000.000	200.000.000	210.000.000	968.000.000
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen	335.000.000	216.660.000	375.000.000	395.000.000	415.000.000	1.736.660.000
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu	335.000.000	216.660.000	375.000.000	395.000.000	415.000.000	1.736.660.000
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu	1.902.000.000	1.184.660.000	2.197.000.000	2.280.000.000	2.525.000.000	10.088.660.000
025.08	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha	1.297.108.000	503.200.000	1.429.500.000	1.685.000.000	1.876.000.000	6.790.808.000
025.08.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	410.200.000	113.000.000	520.000.000	650.000.000	700.000.000	2.393.200.000
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha	410.200.000	113.000.000	520.000.000	650.000.000	700.000.000	2.393.200.000
025.08.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	551.000.000	42.400.000	531.000.000	550.000.000	631.000.000	2.305.400.000
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha	551.000.000	42.400.000	531.000.000	550.000.000	631.000.000	2.305.400.000

PROGRAM / KEGIATAN	KODE	INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN					Jumlah
		2025	2026	2027	2028	2029	
025.08.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	96.500.000	157.000.000	98.500.000	170.000.000	175.000.000	697.000.000
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha	96.500.000	157.000.000	98.500.000	170.000.000	175.000.000	697.000.000
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen	239.408.000	190.800.000	280.000.000	315.000.000	370.000.000	1.395.208.000
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha	15.000.000		30.000.000	25.000.000	50.000.000	120.000.000
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha	224.408.000	190.800.000	250.000.000	290.000.000	320.000.000	1.275.208.000
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	43.531.037.000	45.707.588.850	47.992.968.293	50.392.616.707	52.912.247.542	240.536.458.392
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	37.373.366.000	39.242.034.300	41.204.136.015	43.264.342.816	45.427.559.957	206.511.439.087
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus	129.874.000	136.367.700	143.186.085	150.345.389	157.862.659	717.635.833
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri	14.907.671.000	15.653.054.550	16.435.707.278	17.257.492.641	18.120.367.273	82.374.292.742
2148	Pembinaan Haji	22.335.821.000	23.452.612.050	24.625.242.653	25.856.504.785	27.149.330.024	123.419.510.512
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen	6.157.671.000	6.465.554.550	6.788.832.278	7.128.273.891	7.484.687.586	34.025.019.305
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah	6.157.671.000	6.465.554.550	6.788.832.278	7.128.273.891	7.484.687.586	34.025.019.305

BAB IV

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2025 ini disusun dengan seksama dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang penyusunan Rencana Strategis bagi unit kerja khususnya unit kerja Eselon II di lingkungan Kementerian Agama. Diharapkan Rencana Strategis ini dapat menjadi pedoman dan acuan bagi setiap unit kerja bidang-bidang dalam melaksanakan kegiatan 5 tahun kedepan serta bagi unit kerja yang berada dibawah naungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu untuk menyusun Rencana Program Kerja sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan yang terstruktur.

Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan Kementerian Agama Republik Indonesia atas bimbingannya dalam Menyusun Renstra ini. Dan kami juga menyimpulkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu dengan baik. Semoga dengan Rencana Strategis ini dapat menjadikan Kantor Wilayah Provinsi Bengkulu menjadi lebih baik. Aamiin..

Bengkulu, 20 Januari 2026.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Bengkulu



Saefudin
NIP. 197501052003121002



Lampiran I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Rencana Strategis Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029

SK / IKSK	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
BIDANG AGAMA														
025.03	Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam								11.204.378.000	12.245.627.000	13.553.854.000	14.342.446.000	16.126.718.000	18.465.813.000
025.03.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								10.402.874.000	11.065.599.000	12.293.799.000	13.026.994.000	14.679.343.000	16.917.854.000
2104	Pengelolaan KUA dan Pembinaan Keluarga Sakinah								8.130.374.000	10.015.599.000	11.018.799.000	11.598.284.000	13.064.198.000	15.139.796.000
2122	Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat dan Wakaf								292.500.000	292.500.000	300.000.000	300.000.000	320.000.000	3.139.796.000
2123	Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam								1.085.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.120.000.000	1.130.000.000	5.139.796.000
2124	Pengelolaan Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah								895.000.000	1.050.000.000	1.275.000.000	1.428.710.000	1.615.145.000	1.778.058.000
025.03.WA	Program Dukungan Manajemen								801.504.000	1.180.028.000	1.260.055.000	1.315.452.000	1.447.375.000	1.547.959.000
2125	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Islam								801.504.000	1.180.028.000	1.260.055.000	1.315.452.000	1.447.375.000	1.547.959.000
025.05	Ditjen Bimbingan Masyarakat Kristen								5.033.130.000	5.284.786.500	5.549.025.825	5.826.477.116	6.117.800.972	27.811.220.413
025.05.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								1.000.000.000	1.240.000.000	1.400.000.000	1.420.000.000	1.430.000.000	6.490.000.000
2137	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Kristen								1.000.000.000	1.240.000.000	1.400.000.000	1.420.000.000	1.430.000.000	6.490.000.000
025.06	Ditjen Bimbingan Masyarakat Katholik								5.558.543.000	5.836.470.150	6.128.293.658	6.434.708.340	6.756.443.757	30.714.458.905
025.06.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								2.326.880.000	2.443.224.000	2.565.385.200	2.693.654.460	2.828.337.183	12.857.480.843
2140	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Katolik								2.326.880.000	2.443.224.000	2.565.385.200	2.693.654.460	2.828.337.183	12.857.480.843
025.06. WA	Program Dukungan Manajemen								488.135.000	512.541.750	538.168.838	565.077.279	593.331.143	2.697.254.010
2141	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Katolik								488.135.000	512.541.750	538.168.838	565.077.279	593.331.143	2.697.254.010

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
025.07	Ditjen Bimbingan Masyarakat Hindhu								5.017.500.000	5.268.375.000	5.531.793.750	5.808.383.438	6.098.802.609	27.724.854.797
025.07.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								1.057.000.000	630.000.000	1.257.000.000	1.300.000.000	1.500.000.000	5.744.000.000
2143	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Hindu								1.057.000.000	630.000.000	1.257.000.000	1.300.000.000	1.500.000.000	5.744.000.000
025.08	Ditjen Bimbingan Masyarakat Buddha								5.201.394.000	5.461.463.700	5.734.536.885	6.021.263.729	6.322.326.916	28.740.985.230
025.08.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								410.200.000	113.000.000	520.000.000	650.000.000	700.000.000	2.393.200.000
2145	Pengelolaan dan Pembinaan Urusan Agama Budha								410.200.000	113.000.000	520.000.000	650.000.000	700.000.000	2.393.200.000
SK.1	Meningkatnya jaminan beragama, toleransi, dan cinta kemanusiaan umat beragama													
IKSK.1.1	Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi diatas 83,00	Nilai	73,40	73,45	74,01	74,45	75, 01	75,45						
IKSK.1.2	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS	Persen	0	31	50	67	80	96						
IKSK.1.3	Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS	Persen	34,27	41,67	58,33	66,67	75,00	83,33						
IKSK.1.4	Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTS AWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA	Persen	32,275	70,75	74,2	75	78	79						
IKSK.1.5	Persentase peningkatan peserta event seni budaya	Persen	6,5	74,6	78,9	80,3	82	85						
IKSK.1.6	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan	Persen	34,43	75	77	79	81	83						
SK.2	Meningkatnya kualitas layanan keagamaan yang profesional, inklusif, dan berdampak													
IKSK.2.1	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)	Persen	100	100	100	100	100	100						

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.2.2	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	Rasio	1 : 5	1:14	1:14	1:14	1:14	1:14						
IKSK.2.3	Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi	Persen	70	65	67	70	73	75						
IKSK.2.4	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah	Persen	0,4	25	27	32	48	55						
IKSK.2.5	Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan	Persen	16,4	30	35	40	55	60						
IKSK.2.6	Persentase rumah ibadah agama yang memperoleh bantuan sarana prasarana peribadatan	Persen	17,3	25	30	35	40	50						
IKSK.2.7	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat	Persen	40,5	45,5	50,5	55,8	58,5	60,5						
IKSK.2.8	Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan	Persen	31,5	32,5	33,5	36,5	45,5	48,5						
IKSK.2.9	Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah	Persen	31,77	16,5	25,5	30,4	37,5	42,5						
IKSK.2.10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan	Persen		0,84	1,5	3,4	4,2	6,5						
IKSK.2.11	Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional	Persen	7,5	9,2	15,5	22,5	29,5	35,5						
IKSK.2.12	Persentase kolaborasi program pendayagunaan zakat dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan	Persen	75	80	80	80	80	75						
IKSK.2.13	Persentase Lembaga dana sosial keagamaan/Zakat yang sesuai prinsip syariat, akuntabel, dan profesional	Persen	80	80	80	85	85	80						
IKSK.2.14	Persentase lembaga Zakat dan Wakaf yang dibina	Persen	80	80	80	85	85	80						
025.09	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah								43.531.037.000					
025.09.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								37.373.366.000					
2126	Pembinaan Umrah dan Haji Khusus								129.874.000					
2147	Pelayanan Haji Dalam Negeri								14.907.671.000					

2148	Pembinaan Haji								22.335.821.000					
025.09.WA	Program Dukungan Manajemen								6.157.671.000					
2150	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Penyelenggaraan Haji dan Umrah								6.157.671.000	6.465.554.550	6.788.832.278	7.128.273.891	7.484.687.586	34.025.019.305
SK.3	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji													

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK. 3.1	Persentase calon jamaah lansia yang diberangkatkan sesuai kuota	Persen		80										
SK. 4	Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran ibadah haji													
IKSK. 4.1	Persentase pusat layanan haji dan umrah terpadu yang memenuhi standar sarana dan prasarana dan standar pelayanan	Persen		80										
IKSK. 4.2	Tingkat kepuasan pusat layanan haji dan Umrah Terpadu			80										
SK. 5	Meningkatnya kualitas pelayanan jemaah haji													
IKSK. 5.1	Persentase pelayanan (akomodasi, konsumsi, transportasi) jemaah haji sesuai standar	Persen		85										
SK. 6	Meningkatnya kualitas pembinaan jemaah haji													
IKSK. 6.1	Persentase petugas haji yang memperoleh nilai kinerja diatas 75	Persen		80										
IKSK. 6.2	Persentase calon jemaah haji yang memperoleh sertifikat manasik haji	Persen		70,00										
SK.7	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan penyelenggara ibadah Haji Khusus dan Umrah			75										
IKSK. 7.1	Persentase Lembaga penyelenggaraan haji khusus dan umrah yang terakreditasi (A);	Persen		75										
	a. Lembaga penyelenggara haji khusus;													
	b. Lembaga penyelenggara umrah													
BIDANG PENDIDIKAN														
025.04	Ditjen Pendidikan Islam								2.576.035.465.00 0	2.704.837.238.25 0	2.840.079.100.16 3	2.982.083.055.17 1	3.131.187.207.92 9	14.234.222.066.51 2
025.04.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun								494.374.164.000	519.092.872.200	545.047.515.810	572.299.891.601	600.914.886.181	2.731.729.329.79 1
2128	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Keagamaan Islam								270.000.000	0	350.000.000	400.000.000	450.000.000	71.391.155.750
2129	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Madrasah								481.454.164.000	505.526.872.200	530.803.215.810	557.343.376.601	585.210.545.431	2.660.338.174.04 1
025.04.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								2.004.715.047.00 0	2.104.950.799.35 0	2.210.198.339.31 8	2.320.708.256.28 3	2.436.743.669.09 8	11.077.316.111.04 8

2127	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Islam								8.365.567.000	11.131.874.000	12.245.061.400	13.469.567.540	14.816.524.294	480.271.722.355
------	---	--	--	--	--	--	--	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (/IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
2133	Peningkatan Kompetensi dan Profesionalitas Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah								1.894.217.969.000	1.988.928.867.450	2.088.375.310.823	2.192.794.076.364	2.302.433.780.182	10.466.750.003.818
4433	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Keagamaan Islam								489.000.000	490.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	130.294.384.875
025.04.WA	Program Dukungan Manajemen								289.048.000	1.752.724.000	2.752.724.000	3.752.724.000	4.752.724.000	425.176.625.673
2135	Dukungan Manajemen Pendidikan dan Pelayanan Tugas Teknis Lainnya Pendidikan Islam								289.048.000	1.752.724.000	2.752.724.000	3.752.724.000	4.752.724.000	425.176.625.673
025.05.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun (KRISTEN)								174.000.000	326.000.000	360.000.000	370.000.000	375.000.000	1.605.000.000
2136	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Kristen								174.000.000	326.000.000	360.000.000	370.000.000	375.000.000	1.605.000.000
025.05.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								174.000.000	326.000.000	360.000.000	370.000.000	375.000.000	1.605.000.000
4434	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Kristen								174.000.000	326.000.000	360.000.000	370.000.000	375.000.000	1.605.000.000
025.05.WA	Program Dukungan Manajemen								253.849.000	272.579.000	400.000.000	401.000.000	402.000.000	1.729.428.000
2138	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Kristen								203.849.000	247.579.000	350.000.000	351.000.000	352.000.000	1.504.428.000
5100	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Kristen								50.000.000	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	225.000.000
025.06.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun (KATHOLIK)								6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038	33.153.788
2139	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Katolik								6.000.000	6.000.000	6.300.000	6.615.000	6.945.750	7.293.038
025.06.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								2.290.423.000	2.404.944.150	2.525.191.358	2.651.450.925	2.784.023.472	2.290.423.000
4435	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Katolik								2.290.423.000	2.404.944.150	2.525.191.358	2.651.450.925	2.784.023.472	2.290.423.000
025.06.WA	Program Dukungan Manajemen								447.105.000	469.460.250	492.933.263	517.579.926	543.458.922	2.470.537.360
5102	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Katolik								447.105.000	469.460.250	492.933.263	517.579.926	543.458.922	2.470.537.360
025.07.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun (HINDHU)								706.750.000	742.087.500	779.191.875	818.151.469	859.059.042	3.905.239.886

2142	Pengelolaan dan Pembinaan													
------	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Pendidikan Agama Hindu								706.750.000	742.087.500	779.191.875	818.151.469	859.059.042	3.905.239.886
025.07.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								160.000.000	208.000.000	190.000.000	200.000.000	210.000.000	968.000.000
4436	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Hindu								160.000.000	208.000.000	190.000.000	200.000.000	210.000.000	968.000.000
025.07.WA	Program Dukungan Manajemen								335.000.000	216.660.000	375.000.000	395.000.000	415.000.000	1.736.660.000
2144	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Hindu								335.000.000	216.660.000	375.000.000	395.000.000	415.000.000	1.736.660.000
5103	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Hindu								1.902.000.000	1.184.660.000	2.197.000.000	2.280.000.000	2.525.000.000	10.088.660.000
025.08.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun (BUDDHA)								551.000.000	42.400.000	531.000.000	550.000.000	631.000.000	2.305.400.000
4012	Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Agama Budha								551.000.000	42.400.000	531.000.000	550.000.000	631.000.000	2.305.400.000
025.08.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran								96.500.000	157.000.000	98.500.000	170.000.000	175.000.000	697.000.000
4437	Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan Agama Buddha								96.500.000	157.000.000	98.500.000	170.000.000	175.000.000	697.000.000
025.08.WA	Program Dukungan Manajemen								239.408.000	190.800.000	280.000.000	315.000.000	370.000.000	1.395.208.000
2146	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bimas Budha								15.000.000	20.000.000	30.000.000	25.000.000	50.000.000	120.000.000
5105	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Pendidikan Bimas Budha								224.408.000	190.800.000	250.000.000	290.000.000	320.000.000	1.275.208.000
SK.8	Meningkatnya akses dan penyelesaian pendidikan siswa satuan pendidikan keagamaan													
IKSK.8.1	Persentase siswa/santri satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan dengan predikat pesantren yang lulus sangat baik	Persen	2	5	7	10	12	2						
SK.9	Meningkatnya sarana dan prasarana satuan pendidikan yang berkualitas keagamaan													
IKSK.9.1	Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang	Persen	100	100	100	100	100	100						

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	menyelenggarakan pendidikan inklusif													
IKSK.9.4	Persentase Anak Kelas 1 MI/SD/Adi Widyalya/Mula Dhammasekha yang Pernah Mengikuti PAUD (TK/RA/BA/Taman Seminari/Pratama Widyalya/Nava Dhammasekha)	Persen	100	100	100	100	100	100						
IKSK.9.5	Persentase satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan kesehatan sekolah	Persen	55	55	60	60	60	55						
IKSK.9.6	Jumlah anak tidak sekolah yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada pesantren	Jumlah		5	10	10	15	15						
SK.10	Meningkatnya layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada pencapaian kompetensi peserta didik melalui penguatan sistem penilaian pendidikan yang objektif dan akuntabel serta pengembangan perangkat kurikulum yang adaptif dan relevan	-												
IKSK.10.1	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk:													
	a literasi membaca		52	52	55	55	55	52						
	b numerasi		52	52	55	55	55	52						
IKSK.10.2	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas	Persen	25	25	50	50	75	25						
IKSK.10.3	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran	Persen	85	90	92	95	97	85						
IKSK.10.4	Jumlah prestasi yang diraih dari kegiatan ekstrakurikuler	Jumlah	75	80	80	85	85	75						
IKSK.10.5	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)	Persen	75	80	80	85	85	75						
IKSK.10.6	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan	Persen	10	15	20	25	30	10						
IKSK.10.7	Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B	Persen	62	62	68	68	75	62						

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.10.8	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara	Persen	2,8	100	100	100	100	100						
IKSK.10.9	Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual	Persen		90	90	90	90	90						
IKSK.10.10	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional	Persen	0,18	0,5	0,5	1	1	1						
IKSK.10.11	Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik	Persen		25	25	37,5	37,5	50						
IKSK.10.12	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran	Persen		30	35	40	45	50						
SK.11	Meningkatnya pemerataan guru dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan			100	100	100	100	100						
IKSK.11.1	Persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	15,25	80	83	87	90	93						
IKSK.11.2	Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP	Rasio	1 : 13	1:10	1:11	1:11	1:12	1:13						
IKSK.11.3	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal	Persen	43,4	82	82	82	82	82						
IKSK.11.4	Persentase guru agama yang memiliki sertifikat pendidik	Persen	38,1	85	85	85	85	85						
IKSK.11.5	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil	Persen	10,5	40	45	50	55	60						
IKSK.11.6	Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil	Persen		100	100	100	100	100						
IKSK.11.7	Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik	Persen	24,7	90	90	90	90	90						
IKSK.11.8	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas (AKP) minimal predikat terampil	Persen		80	80	80	85	100						
IKSK.11.9	Persentase guru yang meningkat jenjang karir	Persen		90	92	93	95	98						
IKSK.11.10	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir	Persen		90	92	93	95	98						
IKSK.11.11	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)	Persen		26	35	45	55	55						

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (/IMPACT)/SASARAN PROGRAM (/OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (/OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.11.12	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan	Persen	26,14	35	40	45	50	55						
BIDANG TATA KELOLA														
025.01	Sekretariat Jenderal								3.871.639.608.00 0	4.065.221.588.40 0	4.268.482.667.82 0	4.481.906.801.21 1	4.706.002.141.27 2	21.393.252.806.70 3
025.01.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama								271.649.000	866.078.000	870.750.000	870.750.000	870.750.000	271.649.000
2130	Peningkatan Kualitas Layanan Umat Khonghucu													
5620	Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama								271.649.000	866.078.000	870.750.000	870.750.000	870.750.000	271.649.000
025.01.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran													
5621	Pembinaan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Khonghucu													
025.01.WA	Program Dukungan Manajemen								26.286.733.000	351.479.782.000	378.810.750.000	378.810.750.000	378.810.750.000	1.530.448.864.00 01
2098	Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN								17.930.000	36.500.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000	70.000.000
SK.16	Meningkatnya kualitas layanan dan bantuan hukum													
IKSK.16.1	Persentase kasus hukum yang terselesaikan	Persen	95	97	97	98	98	95						
IKSK.16.2	Persentase rekomendasi izin orang asing	Persen	98	98	99	99	99	98						
2099	Pembinaan Administrasi Kepegawaian								259.370.000	250.750.000	260.000.000	270.000.000	280.000.000	1.110.000.000
SK.15	Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai)													
IKSK.15.1	Indeks Profesionalisme ASN	Indeks	56,18	75	77	78	79	80						

IKSK.15.2	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM	Persen		55	65	75	85	95						
------------------	---	--------	--	----	----	----	----	----	--	--	--	--	--	--

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan													
IKSK.15.3	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Jumlah		2	2	2	3	4						
IKSK.15.4	Indeks Sistem Merit	Indeks		252	254	258	259	262						
IKSK.15.5	Presentasi ASN yang memperoleh sertifikasi pemetaan Kompetensi	Jumlah		5	6	7	8	9						
2100	Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN								14.194.426.000	96.739.840.000	101.500.000.000	111.500.000.000	121.500.000.000	415.840.000.000
SK.17	Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa													
IKSK. 17.1	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	Persen	45	75	75	75	75	75						
IKSK. 17.2	Persentase sarana dan prasaran perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap	Persen		80	85	90	95	95						
2101	Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana								160.990.000	170.270.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	855.990.000
SK.13	Meningkatnya kualitas penerapan Reformasi Birokrasi													
IKSK.13.1	Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai maturitas Sistem Pengendalian Internal (SPIP)	Persen		1	5	10	35	58						
IKSK.13.2	Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti (SP4N Lapor)	Nilai		22	24	25	27	29						
IKSK.13.3	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan sesuai SOP	Jumlah		100	120	130	150	200						
IKSK.13.4	Jumlah satuan kerja yang memperoleh Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan katagori sangat baik	Jumlah		1	1	1	1	1						
IKSK.13.5	Jumlah satuan kerja yang memperoleh Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)/LAKIP/LKJ	Jumlah		102	105	105	105	108						
IKSK.13.6	Jumlah satuan kerja yang menerapkan manajemen resiko	Jumlah		1	5	10	35	58						
IKSK.13.7	Jumlah Satuan Kerja yang berpredikat WBK/WBBM	Jumlah		0	1	1	1	1						

IKSK.13.8	Jumlah Masyarakat yang mengisi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah		150	200	250	300	350						
2102	Pembinaan Administrasi Perencanaan								198.950.000	278.100.000	280.000.000	288.000.000	299.000.000	1.480.000.000
SK.12	Meningkatnya kualitas perencanaan dan anggaran													
IKSK.12.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	92,72	70	70	72	73	75						
2103	Pembinaan Administrasi Umum								5.761.903.000	4.456.346.000	4.875.000.000	4.875.000.000	4.875.000.000	26.358.000.000
SK.14	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan dan BMN													
IKSK.14.1	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai		93,5	94	94,5	95	95,5						
IKSK.14.2	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Persen		10	30	50	70	90						
IKSK.14.3	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Persen	93,33	100	100	100	100	100						

SK / IKS	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2024	TARGET KINERJA					KERANGKA PENDANAAN (dalam juta rupiah)					UNIT ORGANISASI PELAKSANA
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
IKSK.14.4	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Persen	98,5	100	100	100	100	100						
IKSK.14.5	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Persen	70,11	88,15	90	95	100	100						
2106	Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan								155.864.000	203.634.000	210.000.000	210.000.000	210.000.000	355.864.000
SK.18	Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi													
IKSK.18.1	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID	Tingkat	56,5	100	100	100	100	100						
IKSK.18.2	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Persen	24,5	88,15	90	95	100	100						
SK.19	Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi													
IKSK.19.1	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2,05	82	85	87	90	96						
IKSK.19.2	Persentase data statistik yang dipublikasi	Persen	2,11	83	83	86	87	95						
6708	Dukungan Manajemen Pendidikan								5.265.651.000	248.496.264.000	270.600.000.000	270.600.000.000	270.600.000.000	1.080.600.651.000
SK.20	Meningkatnya Layanan Prima Bidang Pendidikan													
IKSK.20.1	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output	Persen	72,5	85	85	87	89	90						
IKSK.20.2	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama	Persen	1,36	80	85	90	95	95						
IKSK.20.3	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen	10,00	70	75	75	80	85						
IKSK.20.4	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media	Persen		70	75	75	80	85						
IKSK.20.5	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK	Persen	65,05	80	85	90	95	95						
IKSK.20.6	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra	Persen		80	80	85	85	85						

Lampiran II : Metadata

BIDANG AGAMA			
Metadata IKS.1.1. : Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi.			
NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase Provinsi yang memperoleh nilai kerukunan umat beragama dengan kategori sangat tinggi
3	Konsep/Definisi	:	Kanwil dan Kemenag Kabupaten/Kota mendapat nilai 80 dalam IKUB
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase Kanwil dan Kemenag Kab/Kota yang mendapat nilai IKUB diatas 80, maka semakin baik tingkat Kerukunan Umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	$\text{Persentase} = (\text{Jumlah provinsi dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi} \div \text{Jumlah total provinsi}) \times 100\%$
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Jumlah provinsi dengan nilai kerukunan umat beragama kategori sangat tinggi 2. Jumlah total provinsi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	Berdasarkan kategori nilai: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah
11	Level Estimasi	:	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-
Metadata IKSK.1.2 : Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS			
NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	:	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	:	Persentase KUA yang menyelenggarakan EWS
3	Konsep/Definisi	:	Persentase KUA penyelenggara Early Warning System (EWS) mengukur proporsi KUA yang aktif menjalankan deteksi dini konflik keagamaan, mencakup pemantauan isu, pelaporan potensi konflik, koordinasi lintas sektor, dan rekomendasi penanganan dini.
4	Interpretasi	:	Semakin tinggi persentase KUA yang melaksanakan EWS, semakin kuat kapasitas kelembagaan di tingkat akar rumput dalam menjaga stabilitas dan kerukunan umat beragama
5	Metode / Rumus Perhitungan	:	Rumus: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah KUA yang aktif menyelenggarakan Early Warning System (EWS) b : Jumlah total KUA secara nasional
6	Nama Variabel Pembangun	:	1. Persentase KUA penyelenggara Early Warning System
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	:	1. Implementasi Sistem Informasi EWS Berbasis KUA 2. Pelatihan Petugas KUA dalam Pemantauan Isu Keagamaan 3. Pembentukan Forum Komunikasi Keagamaan di Tingkat Kecamatan 4. Pemetaan Wilayah Rawan Konflik Keagamaan 5. Rekomendasi Tindak Lanjut atas Potensi Gangguan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	:	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	:	Tahunan
10	Klasifikasi	:	1. KUA dengan Petugas Khusus EWS 2. KUA dengan Penyuluh/Penghulu 3. KUA yang Bekerja Sama dengan Lembaga Mitra

11	Level Estimasi	:	1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	:	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	:	-
IKSK.1.3 : Persentase peningkatan dialog kerukunan yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS			
NO	Atribut		Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil		Kementerian Agama
2	Nama Indikator		Persentase peningkatan dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi untuk merumuskan rekomendasi EWS
3	Konsep/Definisi		Dialog kerukunan yang difasilitasi oleh Kementerian Agama atau mitra strategis bertujuan untuk meredam potensi konflik dan memperkuat moderasi beragama. Dalam kegiatan ini, dihasilkan rekomendasi berbasis EWS (sistem peringatan dini) yang dapat digunakan dalam mitigasi konflik dan penguatan kohesi sosial.
4	Interpretasi		Persentase ini menunjukkan seberapa besar peningkatan jumlah dialog kerukunan yang terfasilitasi dari tahun sebelumnya. Makin tinggi persentasenya, makin kuat perhatian terhadap pencegahan dini konflik keagamaan di masyarakat Islam.
5	Metode / Rumus Perhitungan		Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun berjalan b = Jumlah dialog kerukunan agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu yang difasilitasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun		1. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun berjalan 2. Jumlah kegiatan dialog kerukunan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha/Khonghucu tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun		Fasilitasi Dialog Kerukunan Umat Beragama dan Perumusan Rekomendasi Early Warning System
8	Ukuran/Satuan		Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data		Tahunan
10	Klasifikasi		Berdasarkan lokasi dan skala kegiatan: 1. Tingkat lokal (kabupaten/kota). 2. Tingkat provinsi. 3. Tingkat nasional

11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
IKSK.1.4 : Persentase peningkatan audiens MTQ/PESPARAWI/PESPERANI/UTSAWA DHARMA GITA/SWAYAMVARA TRIPITAKA GATHA		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah audiens atau penonton kegiatan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha yang diukur dari perbandingan jumlah audiens tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, baik secara langsung (luring) maupun daring (online streaming)
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan peningkatan minat dan partisipasi masyarakat dalam menyaksikan pelaksanaan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha, baik di lokasi kegiatan maupun melalui media digital
5	Metode / Rumus Perhitungan	$((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan b : Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun berjalan 2. Jumlah audiens MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penyelenggaraan MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha Tingkat Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
8	Ukuran/Satuan	Persentase (%)
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Audiens Langsung (Luring). 2. Audiens Daring (Streaming) 3. Audiens Media Penyiaran (TV/Radio)
11	Level Estimasi	1. Nasional. 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak

13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
IKSK.1.5 : Persentase peningkatan peserta event seni budaya		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/perayaan agama bernafaskan agama (MTQ/Pesparani/Pesparawi/Utsawa Dharma Gita/Swayamvara Tripitaka Gatha)
3	Konsep/Definisi	Suatu ukuran untuk menghitung jumlah peningkatan peserta pada event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan agama dibandingkan dengan jumlah peserta pada tahun sebelumnya
4	Interpretasi	Semakin meningkat persentase jumlah peserta maka semakin luas syiar agama pada umat
5	Metode / Rumus Perhitungan	1. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan 2. Jumlah peserta event keagamaan/ event seni budaya keagamaan/ perayaan keagamaan tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	Rumusan = $[(a-b) / b] \times 100\%$ a = Jumlah peserta tahun ini b = Jumlah peserta tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Jumlah peserta tahun ini 2. Jumlah peserta tahun sebelumnya
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Pendataan dan Evaluasi Event Keagamaan dan Seni Budaya Keagamaan
10	Klasifikasi	1. Berkurang = < 0% 2. Meningkat = 0%-5% 3. Meningkat Pesat = >5%
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi 3. Kota/ Kab

12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
IKSK.1.6 : Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan atau pembinaan tata kelola kelembagaan
3	Konsep/Definisi	Persentase lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah mendapatkan program pembinaan atau pendampingan pemerintah untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak lembaga agama dan sosial keagamaan yang mendapatkan pembinaan kelembagaan untuk meningkatkan kapasitas, kinerja, serta akuntabilitas dalam menjalankan fungsi sosial-keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a : Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan b : Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lembaga agama dan sosial keagamaan yang telah menerima pendampingan/pembinaan 2. Jumlah total lembaga agama dan sosial keagamaan yang terdaftar
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Program Pendampingan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan. 2). Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Lembaga Keagamaan. 3). Pelatihan Manajemen Kelembagaan Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	1. Pelatihan Tata Kelola Kelembagaan Keagamaan 2. Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Lembaga Keagamaan 3. Pendampingan Administrasi dan Keuangan Lembaga Keagamaan 4. Workshop Penguatan Kapasitas Organisasi Keagamaan
11	Level Estimasi	1. Nasional, 2. Provinsi, 3. Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
IKSK.2.1 : Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase penyuluh agama yang memperoleh Nilai Kinerja berkategori baik (Laporan harian, Konten Digital, Kediklatan)
3	Konsep/Definisi	Nilai Kinerja penyuluh agama mencerminkan capaian kinerja penyuluh dalam menjalankan tugasnya, yang dinilai melalui tiga aspek utama: 1. Laporan Harian: Kegiatan penyuluhan yang dilaporkan secara periodik. 2. Konten Digital: Produksi dan penyebaran konten dakwah/penyuluhan berbasis media digital. 3. Kediklatan: Partisipasi dalam pelatihan atau diklat peningkatan kapasitas.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi penyuluh agama yang menunjukkan kinerja baik berdasarkan evaluasi dari tiga aspek tersebut. Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif peran penyuluh agama dalam menyampaikan nilai-nilai keagamaan secara produktif dan profesional.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang memperoleh nilai kinerja dengan kategori baik b = Total jumlah penyuluh agama yang dievaluasi kinerjanya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data hasil evaluasi kinerja penyuluh agama (aspek laporan, konten digital, dan diklat) 2. Jumlah total penyuluh agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Evaluasi Kinerja Penyuluh Agama

8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agamanya: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
IKSK.2.2 : Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
3	Konsep/Definisi	pengukuran data kelompok sasaran yang dimiliki Penyuluh Agama Islam PNS, PPPK dan Non PNS yang mendapatkan bimbingan penyuluhan
4	Interpretasi	bertambahnya jumlah penyuluh agama islam maka akan lebih banyak lagi kelompok sasaran masyarakat yang terbimbing dan mendapatkan layanan advokasi keagamaan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$x = b / a$ sehingga rasionya menjadi 1:x Keterangan: a = Jumlah penyuluh agama yang aktif b = Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah penyuluh agama yang aktif 2. Jumlah kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Layanan bimbingan penyuluhan 2. Layanan advokasi 3. Layanan keagamaan lainnya

8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Kelompok sasaran umum, khusus dan medsos
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kab/Kota
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.3 : Persentase fasilitator bimbingan perkawinan agama yang tersertifikasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi
3	Konsep/Definisi	Persentase ini mengukur proporsi penghulu yang telah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus, sehingga memperoleh sertifikat kompetensi sesuai standar yang ditetapkan. Sertifikasi ini bertujuan memastikan penghulu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam menjalankan tugas pelayanan pernikahan dan pembinaan masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penghulu bersertifikat kompetensi, semakin terjamin kualitas layanan pernikahan dan pembinaan keagamaan di masyarakat. Angka ini juga mencerminkan keberhasilan program peningkatan kapasitas dan profesionalisme penghulu.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah penghulu yang memperoleh sertifikat kompetensi b = Total jumlah penghulu yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Data jumlah penghulu yang lulus uji kompetensi dan memperoleh sertifikat 2. Jumlah total penghulu yang terdata
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Program Sertifikasi Kompetensi Penghulu
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
IKSK.2.4 : Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh pembinaan pranikah		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah
3	Konsep/Definisi	BRUS adalah bimbingan yang diberikan kepada remaja dalam rangka membekali pengetahuan dan ketrampilan yang bertujuan untuk membantu remaja dalam mengembangkan potensi diri dalam menghadapi tantangan dan membuat keputusan yang tepat. isu yang diangkat dari pelaksanaan bimbingan ini adalah cegah kawin anak, cegah seks pranikah, dan npenyalahgunaan Napza serta kenakalan remaja lainnya. Berdasarkan data dari BPS 2024, Jumlah Remaja Usia 15-19 tahun adalah 22.122.887 anak. Catatan: Target Tahunan adalah jumlah target tahun lalu+tahun ini"
4	Interpretasi	Semakin tinggi partisipasi remaja mengikuti bimbingan, semakin besar peran pemerintah dalam ikut serta membangun ketahanan keluarga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a/b) \times 100\%$ Keterangan: A:Jumlah remaja yang mendapatkan bimbingan B: Jumlah remaja usia 15-19 tahun berdasarkan data BPS
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah remaja usia sekolah yang memperoleh sertifikat kursus pra nikah 2. Jumlah penduduk usia 15-19 tahun berdasar data BPS
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Peningkatan SDM melalui Bimtek Fasilitator. 2). Penyiapan Peer Educator bagi madrasah/sekolah 3. Model Bimbingan bekerjasama dengan madrasah/sekolah/pondok pesantren dan lembaga

8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Eselon I
11	Level Estimasi	1. Nasional. 2. Provinsi 3. Kota/ Kab
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.5 : Persentase peningkatan jumlah layanan bimbingan keluarga yang disediakan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan jumlah peristiwa nikah adalah indikator yang mengukur perubahan jumlah pernikahan yang tercatat dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, semakin besar kenaikan jumlah pernikahan yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu. Sebaliknya, jika bernilai negatif, berarti terjadi penurunan jumlah pernikahan dibandingkan dengan periode sebelumnya.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$x = [(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan b = Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode berjalan 2. Jumlah peristiwa nikah pada tahun/periode sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi Pernikahan Resmi 2. Kemudahan Akses Layanan Nikah 3. Revitalisasi Layanan KUA 4. Bimbingan Perkawinan 5. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan"

8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.6. : -

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana
3	Konsep/Definisi	Ketersediaan sekaligus perbaikan Sarana dan Prasarana sebagai penunjang kegiatan pelayanan yang dilakukan untuk mempermudah aktivitas sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana maka semakin mudah akses pelayanan dan kenyamanan untuk masyarakat
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan: $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = KUA yang sesuai dengan standar sarana dan prasaranan b = KUA seluruh indonesia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah KUA yang memenuhi standar sarana dan prasarana 2. Jumlah KUA
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pembangunan KUA melalui SBSN 2. Revitalisasi KUA
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan

10	Klasifikasi	Perhitungan Prioritas : 1. Lahan Kosong milik Kemenag/Hibah sudah sertifikat Kemenag 2. Rusak Berat (Milik Kemenag) dan Tidak dapat ditanggulangi dengan anggaran Rehab 3. Rusak Ringan namun jumlah rata-rata peristiwa nikah tinggi
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
IKSK.2.7 : Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase masjid/musholla bersertifikat arah kiblat
3	Konsep/Definisi	Sertifikasi arah kiblat merupakan proses verifikasi dan penetapan arah kiblat oleh instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian arah shalat di masjid atau musholla. Sertifikasi ini dilakukan berdasarkan metode hisab dan observasi yang akurat.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan proporsi masjid/musholla yang telah memperoleh sertifikat arah kiblat. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masjid/musholla yang telah terstandarisasi arah kiblatnya secara sah dan ilmiah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ a = Jumlah masjid/musholla yang bersertifikat arah kiblat b = Total jumlah masjid/musholla yang terdata
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah masjid/musholla bersertifikat arah kiblat 2. Jumlah total masjid/musholla
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Persentase
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis masjid: Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami'.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.8 : Persentase peningkatan kitab suci agama yang disediakan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kitab suci agama Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang disediakan
3	Konsep/Definisi	Persentase peningkatan kitab suci yang disediakan adalah ukuran perubahan jumlah kitab suci yang tersedia dalam suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya. Indikator ini mencerminkan upaya peningkatan akses terhadap literatur kitab suci bagi masyarakat.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan ini, semakin banyak buku keagamaan yang tersedia, yang dapat mendukung peningkatan pemahaman keagamaan dan literasi masyarakat. Jika persentase rendah atau negatif, hal ini menunjukkan stagnasi atau penurunan dalam penyediaan buku keagamaan, yang dapat berdampak pada keterbatasan akses terhadap sumber bacaan keagamaan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan b = Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun berjalan 2. Jumlah kitab suci yang disediakan pada tahun sebelumnya

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Pengadaan dan Distribusi Kitab Suci . 2). Digitalisasi dan Akses Kitab Suci Online. 3). Fasilitas Cetak dan Penerjemahan Kitab Suci. 4). Kemitraan dengan Penerbit dan Lembaga Keagamaan. 5). Monitoring Kebutuhan dan Ketersediaan Kitab Suci
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan kitab suci masing-masing agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
IKSK.2.9 : Persentase buku keagamaan pendukung peribadatan yang sesuai kaidah		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan naskah dan buku keagamaan Islam/Kristen/Katolik/Hindu/Buddha yang layak edar/sesuai kaidah
3	Konsep/Definisi	Naskah dan buku keagamaan yang dinyatakan layak edar adalah naskah/buku yang telah melalui proses penilaian oleh lembaga atau otoritas berwenang (misalnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Direktorat Urusan Agama, atau lembaga keagamaan masing-masing) dan dinyatakan sesuai dengan kaidah ajaran agama, nilai-nilai moderasi, serta peraturan perundangan.
4	Interpretasi	Indikator ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan jumlah naskah/buku keagamaan yang memenuhi standar kelayakan edar. Makin tinggi persentasenya, makin banyak literatur keagamaan yang berkualitas, sesuai kaidah, dan moderatif yang tersedia di masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan b = Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun berjalan 2. Jumlah naskah/buku keagamaan yang dinyatakan layak edar pada tahun sebelumnya

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Penilaian Kelayakan Naskah dan Buku Keagamaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.2.10 : Persentase rekomendasi hasil pengawasan halal pada wilayah kabupaten kota yang diterbitkan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama dan BPJPH
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi hasil pemantauan pengawas halal yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Rekomendasi hasil pemantauan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan terhadap pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal. Rekomendasi ini diterbitkan oleh pengawas halal sebagai hasil evaluasi terhadap kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal yang berlaku.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan proporsi rekomendasi yang berhasil diterbitkan dari seluruh hasil pemantauan yang dilakukan. Semakin tinggi persentasenya, semakin optimal pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan dalam sistem jaminan produk halal.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ a = Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan b = Jumlah total hasil pemantauan yang dilakukan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang diterbitkan 2. Jumlah total hasil pemantauan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	Pemantauan dan Evaluasi Pengawas Halal
8	Ukuran/Satuan	Persentase

9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-
IKSK.2.11 : Persentase jumlah calon penerima dana sosial keagamaan terintegrasi basis data terpadu nasional		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan Islam terintegrasi basis data terpadu nasional
3	Konsep/Definisi	Integrasi pemanfaatan penerima manfaat penyaluran dana zakat, infak, sedekah dan pemanfaatan wakaf dengan dapat penduduk miskin yang ada pada sistem data kemiskinan di daerah. Jumlah data mustahik yang selaras dengan data kemiskinan regsosek
4	Interpretasi	Semakin tinggi penerima manfaat dari dana sosial keagamaan, maka semakin produktif peran dana sosial keagamaan yang dikembangkan untuk pengentasan kemiskinan, dan data saling terintegrasi
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumusan = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek b = Jumlah penduduk miskin pada Regsosek
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah mustahik zakat/calon penerima dana sosial keagamaan yang terintegrasi dengan Regsosek 2. Jumlah penduduk miskin pada Regsosek

7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Pendataan dan Verifikasi Mustahik 2). Integrasi Data dengan Basis Data Terpadu Nasional. 3). Penyelarasan Kriteria Mustahik dengan Standar Nasional. 4). Digitalisasi dan Pemutakhiran Data Mustahik. 5). Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Dana Sosial
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1). Mustahik zakat 2). Calon penerima dana sosial keagamaan
11	Level Estimasi	1. Nasional 2. Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

BIDANG PENDIDIKAN

METADATA INDIKATOR RENSTRA BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2025-2029

IKSK.4.2 : Persentase satuan pendidikan umum dengan kekhasan agama, satuan pendidikan keagamaan dan satuan pendidikan pesantren yang memperoleh peningkatan sarana prasarana		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan umum yang mengalami peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan karena adanya penguatan sarana ibadah dan fasilitas pendidikan keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan umum yang difasilitasi dan didukung dalam penguatan infrastruktur keagamaan guna meningkatkan mutu pembelajaran agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a) = Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh peningkatan kualitas pembelajaran keagamaan melalui dukungan sarana. b) = Jumlah total satuan pendidikan umum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan umum yang memperoleh dukungan sarana 2. Jumlah total satuan pendidikan umum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahun
10	Klasifikasi	
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.11 : Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama
3	Konsep/Definisi	Persentase pertumbuhan jumlah lulusan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk guru mata pelajaran agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu) dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. PPG agama adalah program pendidikan setelah program sarjana yang mempersiapkan lulusan menjadi guru profesional pada bidang studi pendidikan agama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan jumlah lulusan program PPG agama dari tahun ke tahun. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama yang telah menempuh jalur profesional melalui PPG, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran pendidikan agama pada semua jenjang satuan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase peningkatan = $[(a - b) / b] \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun berjalan b = Jumlah lulusan PPG agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun berjalan 2. Jumlah lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) agama pada tahun sebelumnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru agama oleh perguruan tinggi penyelenggara PPG 2. Pendataan kelulusan PPG agama yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.12 : Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama berbasis rencana kebutuhan yang diterbitkan
3	Konsep/Definisi	Persentase jumlah rekomendasi terkait pengadaan (penambahan) dan pemerataan distribusi guru pendidikan agama yang diterbitkan berdasarkan analisis rencana kebutuhan guru terhadap total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah telah menindaklanjuti hasil perencanaan kebutuhan guru agama dengan menerbitkan rekomendasi formal untuk pengadaan dan pemerataan distribusi guru agama. Persentase yang tinggi menunjukkan proses perencanaan kebutuhan guru agama berjalan baik dan direspons dengan penerbitan rekomendasi kebijakan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	<p>Persentase = $(a / b) \times 100\%$</p> <p>Keterangan:</p> <p>a = Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan</p> <p>b = Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun dan siap ditindaklanjuti</p>
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama yang diterbitkan berbasis rencana kebutuhan. 2). Total rencana kebutuhan guru agama yang telah disusun
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	<p>1. Penyusunan rencana kebutuhan guru agama berdasarkan analisis data kebutuhan dan ketersediaan guru</p> <p>2. Penerbitan rekomendasi pengadaan dan pemerataan guru agama oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah</p>
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis agama: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Khonghucu
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.7 : Persentase guru dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama pada rapor hasil Asesmen Kompetensi minimal baik
3	Konsep/Definisi	Persentase guru mata pelajaran agama dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal kategori baik pada dimensi moderasi beragama dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi. Nilai moderasi beragama ini menggambarkan sejauh mana guru agama dan tenaga kependidikan memiliki sikap keberagamaan yang moderat, toleran, anti-kekerasan, dan menghargai kebhinekaan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat internalisasi nilai-nilai moderasi beragama pada guru agama dan tenaga kependidikan berdasarkan hasil asesmen kompetensi. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru agama dan tenaga kependidikan yang memiliki pandangan keagamaan yang inklusif, toleran, dan selaras dengan prinsip moderasi beragama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik pada rapor hasil Asesmen Kompetensi b = Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru agama dan tenaga kependidikan yang memperoleh nilai moderasi beragama minimal kategori baik 2. Total guru agama dan tenaga kependidikan yang mengikuti Asesmen Kompetensi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi oleh kementerian/lembaga terkait yang memuat penilaian moderasi beragama 2. Rekapitulasi hasil rapor Asesmen Kompetensi guru agama dan tenaga kependidikan
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.2 : Rasio guru satuan pendidikan terhadap siswa yang memenuhi SNP		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Rasio guru madrasah terhadap siswa yang memenuhi SNP
3	Konsep/Definisi	Perbandingan jumlah guru pada madrasah dengan jumlah siswa di madrasah tersebut, yang menunjukkan sejauh mana rasio ini memenuhi ketentuan rasio ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan untuk jenjang pendidikan tertentu.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur ketersediaan guru di madrasah dalam melayani siswa secara optimal sesuai standar minimal yang diatur dalam SNP. Rasio yang memenuhi SNP mencerminkan terpenuhinya standar layanan pendidikan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan efektif.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rasio = 1 : (Jumlah siswa / Jumlah guru) (Hasil rasio kemudian dibandingkan dengan rasio maksimal sesuai SNP pada masing-masing jenjang)
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru madrasah 2. Jumlah siswa madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendataan jumlah guru madrasah oleh kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah 2. Pendataan jumlah siswa madrasah pada sistem administrasi pendidikan
8	Ukuran/Satuan	Rasio
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.3 : Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase tenaga kependidikan lainnya yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi minimal
3	Konsep/Definisi	Persentase tenaga kependidikan selain guru, seperti kepala madrasah/sekolah, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga kebersihan, yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan dan kompetensi kerja sesuai ketentuan standar nasional atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat pemenuhan standar minimal kualifikasi pendidikan dan kompetensi bagi tenaga kependidikan lainnya di satuan pendidikan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin baik kualitas SDM pendukung pendidikan dalam menjalankan tugas layanan administrasi, manajemen, dan teknis penunjang proses belajar mengajar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi. b) = Total jumlah tenaga kependidikan lainnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah tenaga kependidikan lainnya yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1 dan sertifikasi kompetensi 2. Jumlah tenaga kependidikan lainnya
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Verifikasi data kualifikasi pendidikan dan kompetensi tenaga kependidikan melalui sistem informasi pendidikan 2. Pendataan dan penilaian kesesuaian dengan standar minimal yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait 3. Pemberian bantuan pendidikan 4. Peningkatan pelatihan dan pendidikan administrasi dan teknis sesuai jabatan fungsional
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.5 : Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase guru yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang memperoleh nilai minimal predikat terampil pada rapor hasil Asesmen Kompetensi Guru (AKG). AKG adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pedagogik dan profesional guru sesuai standar kompetensi yang ditetapkan.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kualitas kompetensi guru dalam aspek pedagogik dan profesional telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang memiliki kemampuan mengajar, merencanakan pembelajaran, mengelola kelas, serta menguasai materi ajar dengan baik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil b = Total jumlah guru yang mengikuti AKG
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang memperoleh nilai rapor hasil AKG minimal predikat terampil 2. Total jumlah guru yang mengikuti AKG
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Guru (AKG) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi dan publikasi hasil rapor AKG yang mencantumkan predikat kompetensi guru
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.6 : Persentase Kepala satuan pendidikan yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Sekolah (AKK) minimal predikat terampil		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase Kepala Madrasah yang mendapatkan nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK). AKK adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi manajerial, supervisi akademik, kewirausahaan, dan kompetensi lainnya yang wajib dimiliki oleh kepala madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana kualitas kompetensi Kepala Madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak Kepala Madrasah yang memiliki kompetensi memadai dalam memimpin, mengelola satuan pendidikan, melakukan supervisi, serta mendorong inovasi di madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil b = Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah Kepala Madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKK minimal predikat terampil 2. Total Kepala Madrasah yang mengikuti AKK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Kepala Madrasah/Sekolah (AKK) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Rekapitulasi hasil rapor AKK yang memuat predikat kompetensi Kepala Madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.8 : Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas satuan pendidikan Kristen (AKP) minimal predikat terampil		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase pengawas yang memperoleh nilai rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) minimal predikat terampil
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang memperoleh nilai minimal pada kategori terampil dalam rapor hasil Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP). AKP adalah asesmen yang dilakukan untuk mengukur kompetensi pengawas dalam melaksanakan supervisi akademik dan manajerial, pembinaan guru dan kepala madrasah, serta pemantauan pelaksanaan standar nasional pendidikan di madrasah.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kompetensi pengawas madrasah telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang memiliki kemampuan memadai dalam melakukan pembinaan, pendampingan, dan pengawasan mutu madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil b = Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas madrasah yang memperoleh nilai rapor hasil AKP minimal predikat terampil 2. Total pengawas madrasah yang mengikuti AKP
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelaksanaan Asesmen Kompetensi Pengawas Madrasah (AKP) oleh kementerian/lembaga terkait 2. Pengolahan dan rekapitulasi hasil rapor AKP pengawas madrasah
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang madrasah binaan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.9 : Persentase guru yang meningkat jenjang karir

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase guru yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Persentase guru pada satuan pendidikan yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional lama ke jabatan fungsional yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional guru. Jenjang karir guru umumnya meliputi: Guru Pertama, Guru Muda, Guru Madya, dan Guru Utama.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir guru sebagai salah satu bentuk apresiasi terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak guru yang terdorong untuk terus mengembangkan diri dan memenuhi persyaratan kenaikan pangkat/jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ <p>Keterangan: a = Jumlah guru yang naik jenjang karir dalam periode tertentu b = Total guru pada periode yang sama</p>
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah guru yang meningkat jenjang karir 2. Total jumlah guru
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit guru 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional guru yang dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.6.10 : Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase Pengawas yang meningkat jenjang karir
3	Konsep/Definisi	Persentase pengawas madrasah yang mengalami peningkatan jenjang karir, yaitu naik dari jabatan fungsional pengawas madrasah pada jenjang tertentu ke jenjang yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang jabatan fungsional pengawas.
4	Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk mengukur perkembangan karir pengawas madrasah sebagai bentuk penghargaan terhadap peningkatan kompetensi, kinerja, dan pemenuhan angka kredit. Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyak pengawas madrasah yang terdorong untuk meningkatkan kualitas diri dan memenuhi persyaratan kenaikan jabatan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir dalam periode tertentu b = Total pengawas satuan pendidikan pada periode yang sama
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah pengawas satuan pendidikan yang meningkat jenjang karir 2. Total pengawas satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penilaian dan penetapan angka kredit pengawas pada satuan pendidikan 2. Proses kenaikan pangkat/jabatan fungsional pengawas madrasah oleh kementerian/lembaga terkait
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum dengan kekhasan agama dan Satuan Pendidikan Keagamaan 2. Pengawas pada Satuan Pendidikan Umum
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.1 : Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a). literasi membaca. b). numerasi

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Rata-rata nilai asesmen kompetensi tingkat nasional untuk: a literasi membaca b numerasi
3	Konsep/Definisi	Rata-rata skor capaian peserta didik pada asesmen kompetensi tingkat nasional (AKM) dalam aspek literasi membaca dan numerasi, yaitu kemampuan memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan teks tertulis serta kemampuan berpikir menggunakan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari.
4	Interpretasi	Nilai rata-rata ini mencerminkan tingkat penguasaan kompetensi minimum siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Semakin tinggi skor rata-rata, semakin baik penguasaan literasi membaca dan numerasi siswa. Indikator ini berguna untuk melihat efektivitas pembelajaran dan kesetaraan hasil belajar di berbagai daerah dan jenjang pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai rata-rata = $(\sum \text{ skor peserta didik}) / (\text{jumlah peserta didik})$
6	Nama Variabel Pembangun	1. Skor literasi membaca peserta didik 2. Skor numerasi peserta didik 3. Jumlah peserta didik yang mengikuti AKM
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Rapor Pendidikan Kemendikdasmen

IKSK.5.2 : Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang menyusun rencana kerja tahunan berbasis partisipasi komunitas
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dengan melibatkan partisipasi aktif dari komunitas pendidikan (orang tua, komite sekolah, tokoh masyarakat, dll).
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini, menunjukkan bahwa perencanaan program pendidikan di satuan pendidikan melibatkan pemangku kepentingan secara partisipatif, yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan relevansi program dengan kebutuhan lingkungan sekitar.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menyusun RKT berbasis partisipasi komunitas 2. Jumlah total satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat.
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.3 : Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi satuan pendidikan yang menerapkan nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam proses pembelajaran secara sistematis dan terstruktur.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase ini menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang berkomitmen membentuk peserta didik berkarakter melalui integrasi dalam kurikulum dan kegiatan pembelajaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang mengintegrasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran b = Jumlah total satuan pendidikan yang menjadi sasaran
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan pendidikan karakter 2. Jumlah total satuan pendidikan sasaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.5 : Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan nilai karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan (disiplin, gotong royong, kepemimpinan, tanggung jawab)
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan peningkatan capaian nilai-nilai karakter siswa yang diperoleh melalui partisipasi aktif dalam kegiatan kepramukaan.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan seberapa besar pengaruh kegiatan kepramukaan dalam membentuk dan meningkatkan karakter siswa, terutama pada aspek disiplin, gotong royong, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Rata-rata nilai karakter siswa setelah mengikuti kegiatan kepramukaan b = Rata-rata nilai karakter siswa sebelum mengikuti kegiatan kepramukaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai karakter siswa pra-kegiatan kepramukaan 2. Nilai karakter siswa pasca-kegiatan kepramukaan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan pembelajaran berbasis pendidikan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 2. Peningkatan kegiatan ekstrakurikuler dan kepramukaan 3. Fasilitasi peningkatan dan pendampingan kegiatan kepramukaan
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat. MTs/ sederajat, dan MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.6 : Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan berbasis cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menggambarkan proporsi perangkat kurikulum yang telah melalui proses evaluasi dan pengembangan agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap lingkungan.
4	Interpretasi	Angka ini menunjukkan komitmen dan upaya sistem pendidikan dalam merevisi dan menyempurnakan kurikulum agar mendukung pembentukan karakter siswa yang peduli sesama dan lingkungan hidup.
5	Metode / Rumus Perhitungan	<p>Persentase = $(a / b) \times 100\%$</p> <p>Keterangan:</p> <p>a = Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan dengan muatan cinta kemanusiaan dan pelestarian lingkungan</p> <p>b = Jumlah total perangkat kurikulum yang ada</p>
6	Nama Variabel Pembangun	<p>1. Jumlah perangkat kurikulum yang dievaluasi dan dikembangkan</p> <p>2. Jumlah total perangkat kurikulum</p>
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.12 : Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase materi ajar digital (modul, video, e-book) yang tersedia dan digunakan dalam proses pembelajaran
3	Konsep/Definisi	Persentase ini menunjukkan proporsi materi ajar digital yang telah dikembangkan dan secara aktif dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar.
4	Interpretasi	Angka ini mencerminkan kesiapan dan adopsi teknologi digital dalam mendukung proses pembelajaran, serta sejauh mana materi ajar digital digunakan oleh pendidik dan peserta didik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran b = Jumlah total materi ajar digital yang tersedia
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah materi ajar digital yang tersedia 2. Jumlah materi ajar digital yang digunakan dalam pembelajaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase PAUD/RA yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Raudhatul Athfal (RA) yang telah memperoleh status akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi yang berwenang.
4	Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan semakin banyaknya PAUD/RA yang telah memenuhi standar mutu pendidikan minimal sesuai peringkat akreditasi B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha terakreditasi minimal B 2. Total jumlah PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: PAUD/RA/Taman Seminari/Pratama Widyalyaya/Nava Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Mula Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan dasar berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang dasar tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	<p>Persentase = $(a / b) \times 100\%$</p> <p>Keterangan:</p> <p>a = Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B</p> <p>b = Total jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha</p>
6	Nama Variabel Pembangun	<p>1. Jumlah MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B</p> <p>2. Total MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha</p>
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: MI/SDTK/Adhi Widyalyaya/Muda Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan menengah pertama berbasis keagamaan dan kepercayaan yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan pada jenjang menengah pertama tersebut yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai peringkat akreditasi minimal B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha yang terakreditasi minimal B 2. Total MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis pendidikan: MTs/SMPTK/Madyama Widyalyaya/Muda Dhammasekha
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.7 : Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi minimal B		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal B
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi Madrasah Aliyah (MA) yang telah memperoleh akreditasi minimal peringkat B dari lembaga akreditasi pendidikan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak MA yang telah memenuhi standar mutu pendidikan sesuai dengan kriteria minimal peringkat akreditasi B.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B b = Total jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha yang terakreditasi minimal peringkat B 2. Total jumlah MA/SMTK/SMAK/Utama Widyalyaya/Uttama Dhammasekha
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.8 : Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan unggul yang terselenggara
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi satuan pendidikan yang telah memenuhi kriteria sebagai satuan pendidikan unggul berdasarkan standar yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan pendidikan dengan kualitas unggul sesuai indikator mutu dan keunggulan tertentu (akademik, karakter, inovasi, dll).
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah satuan pendidikan yang terselenggara sebagai satuan pendidikan unggul b = Total jumlah satuan pendidikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan pendidikan unggul 2. Total jumlah satuan pendidikan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: PAUD/ sederajat, MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.9 : Persentase satuan pendidikan satuan pendidikan yang menerapkan program pendidikan bilingual		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase Madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menyelenggarakan program pendidikan dengan dua bahasa pengantar, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing (umumnya bahasa Inggris atau bahasa Arab), dalam proses pembelajarannya.
4	Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan semakin banyak madrasah yang memberikan layanan pendidikan bilingual, yang berpotensi meningkatkan kompetensi bahasa siswa dan daya saing lulusan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah yang menerapkan program pendidikan bilingual b = Total jumlah madrasah
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah madrasah dengan program pendidikan bilingual 2. Total jumlah madrasah
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.10 : Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional

NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi siswa pada satuan pendidikan yang berpartisipasi dalam ajang kompetisi berskala nasional atau internasional di bidang akademik, non-akademik, atau keagamaan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak siswa yang aktif dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional, mencerminkan kualitas pembinaan dan dukungan sekolah/madrasah.
5	Metode / Rumus Perhitungan	<p>Persentase = $(a / b) \times 100\%$</p> <p>Keterangan:</p> <p>a = Jumlah siswa yang mengikuti kompetisi nasional maupun internasional</p> <p>b = Total jumlah siswa</p>
6	Nama Variabel Pembangun	<p>1. Jumlah siswa peserta kompetisi nasional/internasional</p> <p>2. Total jumlah siswa</p>
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.5.11 : Persentase satuan pendidikan dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase madrasah dengan nilai pengelolaan yang partisipatif pada kategori baik
3	Konsep/Definisi	Mengukur proporsi madrasah yang menerapkan tata kelola satuan pendidikan secara partisipatif (melibatkan komunitas sekolah, komite, orang tua, dan pihak lain) dan memperoleh penilaian pada kategori baik dalam aspek pengelolaan tersebut.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak madrasah yang melaksanakan prinsip good governance dalam pengelolaan pendidikan, yang berkontribusi pada peningkatan mutu layanan pendidikan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a = Jumlah madrasah dengan nilai pengelolaan partisipatif kategori baik b = Total jumlah madrasah yang dinilai pengelolaannya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai pengelolaan madrasah 2. Kategori penilaian pengelolaan 3. Jumlah madrasah dinilai
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persen
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data S	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenjang pendidikan: MI/ sederajat, MTs/ sederajat, MA/ sederajat
11	Level Estimasi	Nasional, Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

A. BIDANG TATA KELOLA

IKSK.7.1 : Nilai Kinerja Anggaran		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Keuangan
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Anggaran
3	Konsep/Definisi	Nilai yang menunjukkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam suatu instansi pemerintah, mencakup perbandingan antara realisasi anggaran dengan rencana anggaran serta pencapaian output dan outcome yang diharapkan
4	Interpretasi	Menggambarkan seberapa baik instansi dalam mengelola dan menggunakan anggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta seberapa tepat waktu dan akurat pelaksanaan anggaran tersebut.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggabungkan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
6	Nama Variabel Pembangun	1). Rencana Anggaran. 2). Realisasi Anggaran. 3). Output. 4). Outcome
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Perencanaan Anggaran. 2). Pelaksanaan Anggaran. 3). Evaluasi Kinerja Anggaran
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	NKA > 90% (Sangat Baik); NKA > 80% sampai dengan 90% (Baik); NKA > 60% sampai dengan 80% (Cukup); NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% (Kurang); NKA sampai dengan 50% (Sangat Kurang)
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.8.1 : Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Inspektorat Jenderal Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat kualitas laporan kinerja satuan kerja Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik kepatuhan pelaporan kinerja Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KMA 94 Tahun 2021
6	Nama Variabel Pembangun	Memenuhi kriteria dan sistematika dalam KMA 94 Tahun 2021
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Satker
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.8.2 : Nilai Pembangunan Zona Integritas diatas 75		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
3	Konsep/Definisi	Indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas Kementerian Agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi capaian yang diperoleh maka semakin baik sistem tata kelola dan layanan Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB
6	Nama Variabel Pembangun	1. Nilai Komponen Pengungkit (aspek pemenuhan dan aspek reform) 2. Nilai Komponen Hasil 3. Hasil Survei IPAK dan IPKP 4. Nilai SAKIP 5. Prosentase penyelesaian hasil pengawasan 6. Kepatuhan pelaporan LHKAN 7. Kualitas sarana layanan publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pendampingan PMPZI 2. Penilaian Pendahuluan 3. Monitoring dan evaluasi PMPZI 4. Tindak lanjut hasil evaluasi ZI
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Satker
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal RB Nasional

IKSK.9.1 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kemenkeu
2	Nama Indikator	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran
4	Interpretasi	Kenaikan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah tanda positif yang mencerminkan peningkatan dalam kualitas pelaksanaan anggaran oleh suatu kementerian/lembaga
5	Metode / Rumus Perhitungan	Rumus perhitungan dilakukan oleh Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran; 2. Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran; 3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	a. sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ; b. baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA < 95 ; c. cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau d. kurang, apabila nilai IKPA < 70 .
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Wilayah 3. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data?(Disebutkan nama publikasinya)	Website Kemenkeu

IKSK.9.2 : Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan
3	Konsep/Definisi	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah ukuran yang menunjukkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas internal maupun eksternal. Indikator ini mencerminkan efektivitas pengelolaan pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi serta kebijakan yang berlaku.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase penyelesaian tindak lanjut, semakin baik tingkat kepatuhan dan efektivitas organisasi dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang telah ditindaklanjuti b. Jumlah seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang harus ditindaklanjuti (X1), 2. Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (X2), 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan (Y)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait tindak lanjut hasil pengawasan; 2. Pengembangan dashboard pemantauan kepatuhan; 3. Penguatan kerja sama dengan auditor internal dan eksternal
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kementerian 2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Kantor Wilayah 3. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pada Satuan Kerja
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.3 : Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	semakin tinggi persentasi satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu di bandingkan dengan Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN dan Jumlah satuan kerja yang menyusun dan menyerahkan RKBMN tepat waktu
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN pada Kementerian Agama, Eselon I Pusat, Kantor Wilayah
11	Level Estimasi	1. Kementerian Agama, 2. Eselon I, 3. Kantor Wilayah, 4 Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.4 : Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menerapkan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat implementasi sistem Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) oleh satuan kerja untuk memastikan laporan keuangan disusun secara andal, akurat, dan sesuai standar akuntansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa semakin banyak satuan kerja yang telah menerapkan PIPK secara memadai untuk mendukung akuntabilitas dan keandalan laporan keuangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menerapkan PIPK b. Jumlah total satuan kerja
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satuan kerja yang telah menerapkan PIPK sesuai pedoman 2. Jumlah seluruh satuan kerja yang menjadi objek evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengendalian Intern / Akuntabilitas Keuangan / Tata Kelola Pemerintahan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.9.5 : Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu
3	Konsep/Definisi	Persentase Satuan Kerja yang Menyusun RKBMN Tepat Waktu adalah ukuran kinerja yang menunjukkan proporsi satuan kerja yang berhasil menyusun dan menyampaikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan atau pedoman yang berlaku. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan disiplin satuan kerja dalam perencanaan kebutuhan BMN sebagai bagian dari pengelolaan aset negara yang efektif dan transparan.
4	Interpretasi	semakin tinggi persentase satuan kerja yang menyusun RKBMN semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan organisasi terhadap perencanaan kebutuhan aset negara
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah satuan kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu b. Jumlah total satuan kerja yang wajib menyusun RKBMN
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah satker yang menyusun RKBMN tepat waktu 2. Jumlah seluruh satker yang diwajibkan menyusun RKBMN
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Pelatihan bagi pengelola BMN di satuan kerja terkait tata cara penyusunan RKBMN; 2. pendampingan bagi satuan kerja dalam menyusun RKBMN. 3. Evaluasi berkala terhadap kendala yang dihadapi satuan kerja dan pemberian solusi,
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Pengelolaan Barang Milik Negara / Tata Kelola Aset / Perencanaan Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.1 : Indeks Profesionalisme ASN		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	BKN
2	Nama Indikator	Indeks Profesionalisme ASN
3	Konsep/Definisi	Indeks profesionalisme ASN Kementerian Agama merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Capaian Indeks Profesionalisme ASN pada Kementerian Agama maka Semakin Meningkat Presentasi SMART dan Moderat Religiuos ASN Kementerian Agama
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun BKN
6	Nama Variabel Pembangun	Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Lingkup Variabel Profesionalisme ASN berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN (profesionalitas), memiliki integritas, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan, serta berperilaku moderat (komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan penerimaan terhadap tradisi) dalam melakukan tugas jabatannya.
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.2 : Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	KemenPAN RB dan BKN
2	Nama Indikator	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan
3	Konsep/Definisi	Setiap satuan kerja wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja
4	Interpretasi	Semakin Tinggi Satuan Kerja yang melakukan penyusunan maka semakin meningkat Pemenuhan Kebutuhan ASNnya
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh BKN dan Kemenpanrb
6	Nama Variabel Pembangun	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Penyusunan Kebutuhan ASN berdasarkan Jumlah dan Jenis Jabatan di masing-masing satuan kerja
11	Level Estimasi	Nasional dan Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.10.3 : Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama melibatkan Stakeholder KemenPAN RB
2	Nama Indikator	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif
3	Konsep/Definisi	Predikat Pegawai Teladan merupakan bentuk penghargaan bagi pegawai Kementerian Agama yang diberikan setiap tahun. Pegawai teladan merupakan role model bagi pegawai ASN lainnya. Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi
4	Interpretasi	Semakin banyak partisipan yang disertakan maka semakin banyak role model dan reinforcement yang diperoleh
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan Instrumen yang disusun oleh Kemenag
6	Nama Variabel Pembangun	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Dinilai berdasarkan sikap, perilaku, kinerja dan inovasi. Dan dibagi menjadi 4 kategori pegawai teladan (JPT Pratama, Jabatan Administrator/JF Madya, Jabatan Pengawas/JF Muda, Jabatan Pelaksana/JF Pertama/JF Keterampilan
11	Level Estimasi	Nasional dan Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.11.1 : Persentase kasus hukum yang terselesaikan		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kasus hukum yang terselesaikan
3	Konsep/Definisi	Indikator ini menunjukkan efektivitas sistem penanganan dan advokasi dalam menangani dan menyelesaikan kasus hukum, baik di tingkat peradilan pidana, perdata, administrasi, maupun kasus hukum lainnya.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik efektivitas sistem hukum dalam menyelesaikan perkara
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) * 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan b. Jumlah kasus hukum
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kasus hukum yang terselesaikan 2. Jumlah Kasus hukum
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan naskah peraturan 2. Pelatihan/pembinaan/Sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis kasus hukum: 1). Kasus Sengketa tanah. 2). Kasus hukum ASN
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Unit Eselon I 3. PTKN 4. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK.11.2 : Persentase rekomendasi izin orang asing		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase rekomendasi izin orang asing
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur persentase jumlah rekomendasi izin yang diberikan kepada orang asing yang akan melakukan kegiatan keagamaan atau pendidikan atau orang Indonesia yang akan melakukan kegiatan keagamaan dan pendidikan ke luar negeri dalam suatu periode tertentu
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin cepat dan efektif proses pengambilan keputusan terkait izin orang asing.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a). Jumlah rekomendasi izin orang asing yang diterbitkan. B). Jumlah rekomendasi izin orang asing
6	Nama Variabel Pembangun	1). Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS). 2). Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS). 3). Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP). 4). Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 5). Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA. 6). Rekomendasi Izin Tinggal Dinas. 7). Izin Penelitian. 8). Izin Studi. 9). Izin Penelitian. 10). Izin Studi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan Regulasi 2. Penyusunan SOP 3. Penerbitan rekomendasi 4. Monev
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan
10	Klasifikasi	Berdasarkan jenis izin: 1). Rekomendasi Izin Tinggal Terbatas (ITAS). 2). Rekomendasi Visa Tinggal Terbatas (VITAS). 3). Rekomendasi Izin Tinggal Tetap (ITAP). 4). Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). 5). Rekomendasi Pengesahan RPTKA Non DKP-TKA. 6). Rekomendasi Izin Tinggal Dinas. 7). Izin Penelitian. 8). Izin Studi. 9). Izin Penelitian.. 10). Izin Studi
11	Level Estimasi	1. Kementerian 2. Unit Eselon I 3. Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK. 12.1 : Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah diakses
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat arsip yang telah dialihmedia (digitalisasi) dan dapat diakses dengan mudah melalui sistem elektronik, sebagai bagian dari transformasi tata kelola kearsipan modern.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin optimal dalam melakukan digitalisasi arsip serta memastikan aksesibilitasnya bagi pengguna internal maupun publik sesuai kewenangan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah arsip yang telah didigitalisasi dan dapat diakses dengan mudah b. Jumlah total arsip yang seharusnya didigitalisasi
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah arsip digital yang tersedia dan terakses 2. Jumlah keseluruhan arsip yang wajib didigitalisasi 3. Sistem penyimpanan dan akses digital yang digunakan (misalnya e-arsip, SRIKANDI)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Kearsipan / Transformasi Digital / Tata Kelola Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK. 12.2 : Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan berbasis roadmap
3	Konsep/Definisi	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap adalah Indikator yang menunjukkan sejauh mana pengembangan infrastruktur perkantoran, baik fisik maupun digital, telah direalisasikan sesuai dengan perencanaan strategis yang telah ditetapkan dalam roadmap pengembangan instansi atau organisasi. Indikator ini mencerminkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan atau renovasi fasilitas perkantoran dengan target yang telah direncanakan dalam periode tertentu.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik keselarasan antara pembangunan sarana-prasarana dengan roadmap yang ditetapkan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kegiatan pengembangan sarana dan prasarana yang sesuai dengan roadmap b. Jumlah total kegiatan pengembangan sarana dan prasarana
6	Nama Variabel Pembangun	1. Sarana dan prasarana 2. Pengelolaan Fasilitas Perkantoran
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Laporan pembangunan, 2). roadmap pengembangan, data aset perkantoran. 3). sistem manajemen infrastruktur
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Triwulan dan Tahunan
10	Klasifikasi	1). $\geq 80\%$ → Sebagian besar sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap dan berjalan optimal. 2). 60% - 79% → Pembangunan cukup sesuai roadmap, tetapi ada beberapa target yang belum terealisasi. 3). 40% - 59% → Pembangunan berjalan namun masih banyak yang tertunda atau tidak sesuai roadmap. 4). 20% - 39% → Sebagian kecil sarana dan prasarana telah dikembangkan sesuai roadmap, tetapi masih jauh dari target. 5). $< 20\%$ → Pengembangan sarana dan prasarana perkantoran masih sangat minim atau tidak sesuai roadmap.
11	Level Estimasi	1). Kementerian 2). Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Portal Satker

IKSK. 12.3 : Nilai Layanan Kesehatan		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Nilai Layanan Kesehatan
3	Konsep/Definisi	Indikator yang digunakan untuk menilai kualitas, aksesibilitas, efektivitas, dan kepuasan pengguna terhadap layanan kesehatan yang diberikan oleh suatu Klinik Pratama Satuan Kerja . Indikator ini mencerminkan sejauh mana pelayanan kesehatan memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakatmemberikan layanan kesehatan primer kepada seluruh pegawai dan keluarga di lingkungan kementerian agama
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai layanan kesehatan, semakin baik kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan
5	Metode / Rumus Perhitungan	Survey kepuasan pasien
6	Nama Variabel Pembangun	1). Aksesibilitas Layanan 2). Kualitas Pelayanan Medis. 3). Kepuasan Pasien. 4). Efisiensi dan Keamanan Layanan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1). Pengadaan sarana dan prasarana klinik. 2). Pengadaan tenaga medis dan obat-obatanx. 3). Penyusunan SOP layanan Kesehatan. 4). Penyusunan instrumen survey. 5). Pembinaan/Pelatihan bagi tenaga kesehatan
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1). 0-19,99% sangat kurang sekali. 2). 20-39,99% kurang baik 3. 40-59,99% cukup 4. 60-79,99% baik 5. 80-100% sangat baik
11	Level Estimasi	1). Kementerian. 2). Satuan Kerja
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.13.1 : Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	KemenPAN RB
2	Nama Indikator	Tingkat kematangan penyelenggaraan PPID
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana instansi pemerintah atau badan publik telah mengimplementasikan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indikator ini mencerminkan kesiapan, kualitas, dan efektivitas penyelenggaraan layanan informasi publik oleh PPID dalam memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terbuka dan dapat diakses dengan mudah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi tingkat kematangan, semakin efektif pula PPID dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Menggunakan instrumen dari Komisi Informasi
6	Nama Variabel Pembangunan	1). Kebijakan dan Regulasi . 2). Struktur Organisasi dan SDM PPID . 3).Ketersediaan dan Kualitas Informasi Publik. 4). Layanan Informasi Publik. 5). Pengelolaan dan Inovasi Teknologi Informasi. 6).Monitoring dan Evaluasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangunan	1. Penyusunan peraturan tentang pelaksanaan PPID pada Satuan Kerja 2. Pembinaan/Pelatihan 3. Monitoring dan Evaluasi
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Sangat Maju → PPID sudah sepenuhnya digital, transparan, responsif, dan memenuhi standar keterbukaan informasi. 2. Maju → PPID telah berjalan dengan baik tetapi masih memerlukan sedikit penyempurnaan dalam aspek tertentu. 3. Berkembang → PPID telah tersedia tetapi belum sepenuhnya efektif dalam penyelenggaraan layanan informasi. 4. Dasar → PPID baru terbentuk dan masih dalam tahap pengembangan sistem serta kapasitas SDM. 5. Belum Berkembang → PPID belum berfungsi secara optimal dan masih memerlukan banyak perbaikan.
11	Level Estimasi	1). Kementerian. 2). Unit Eselon I. 3). Kanwil Kementerian Agama Provinsi
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.13.2 : Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi
3	Konsep/Definisi	Indikator yang mengukur pertumbuhan jumlah konten berbasis keagamaan dan pendidikan yang diterbitkan dalam periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Konten ini dapat berupa artikel, video, podcast, modul pembelajaran, atau materi digital lainnya yang tersedia di berbagai platform, seperti website resmi, media sosial, dan aplikasi pendidikan
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentase peningkatan, semakin aktif produksi dan distribusi konten keagamaan dan pendidikan
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun berjalan b. Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Konten Keagamaan dan Pendidikan 2. Media Informasi Publik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyusunan konten keagamaan dan pendidikan 2. Pengadaan sistem informasi 3. Melakukan monitoring dan Evaluasi 4. Pelatihan dan sosialisasi
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	1. Konten Digital 2. Konten Cetak
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.14.1 : Indeks Pembangunan Statistik		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	BPS
2	Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik
3	Konsep/Definisi	Ukuran yang menggambarkan tingkat kemajuan pembangunan statistik Kementerian/instansi berdasarkan ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data statistik. IPS digunakan untuk menilai sejauh mana suatu Kementerian/lembaga telah mengembangkan sistem statistik yang andal, akurat, dan relevan guna mendukung pengambilan kebijakan berbasis data
4	Interpretasi	Semakin berkualitas Kementerian/Lembaga mampu menyediakan sistem statistik data yang akurat, berkualitas, relevan, dan tepat waktu maka semakin berkualitas untuk mendukung pengambilan kebijakan dan pembangunan.
5	Metode / Rumus Perhitungan	
6	Nama Variabel Pembangun	1). Prinsip SDI. 2). Kualitas Data. 3). Proses Bisnis Statistik. 4). Kelembagaan; dan 5). Sistem Statistik
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	1. Penyelenggaraan satu data Kementerian Agama 2. Penyusunan data Statistik 3. Penguatan jabatan fungsional statistisi 4. Pengadaan sistem informasi satu data Kementerian Agama
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Menggunakan ukuran skala tingkat kematangan 1 sampai 5 dengan satuan poin tingkat kematangan
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Ya
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	Pada Portal BPS

IKSK.15.1 : Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemanfaatan anggaran bidang pendidikan yang sesuai dengan capaian output
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana realisasi anggaran bidang pendidikan digunakan secara efektif sesuai dengan output atau hasil yang direncanakan, baik dari sisi volume, kualitas, maupun ketepatan sasaran program.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa anggaran pendidikan tidak hanya terserap, tetapi juga menghasilkan output yang sesuai target, mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai anggaran yang digunakan sesuai dengan output yang tercapai b. Total anggaran bidang pendidikan yang direalisasikan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Realisasi anggaran pendidikan 2. Capaian output kegiatan (misalnya jumlah siswa terbantu, sarana pendidikan yang dibangun, pelatihan yang diselenggarakan) 3. Rencana kerja dan target output yang ditetapkan
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.2 : Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan kinerja Kementerian Agama
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan kinerja Kementerian Agama dari tahun ke tahun berdasarkan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan adanya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Agama.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun berjalan b. Nilai kinerja Kementerian Agama pada tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Capaian indikator kinerja utama (IKU) tahun berjalan 2. Capaian IKU tahun sebelumnya 3. Skor evaluasi kinerja kementerian dari instansi pembina (misal KemenPAN-RB atau Bappenas)
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	-
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan dan Evaluasi Kinerja / Reformasi Birokrasi / Manajemen Kinerja Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.3 : Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi kebijakan prioritas di bidang pendidikan yang telah dikomunikasikan secara aktif kepada publik melalui berbagai media, baik konvensional maupun digital, sebagai bagian dari transparansi dan edukasi publik.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi semakin responsif dan terbuka dalam menyampaikan informasi kebijakan pendidikan kepada masyarakat.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = (a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebijakan prioritas bidang pendidikan yang telah disampaikan melalui media b. Jumlah total kebijakan prioritas bidang pendidikan yang ditetapkan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar kebijakan prioritas pendidikan 2. Jumlah kebijakan yang dipublikasikan di media (TV, radio, media cetak, media sosial, website resmi, dll) 3. Kanal/media penyampaian informasi
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Kebijakan Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	

IKSK.15.4 : Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan yang disampaikan melalui media
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur pertumbuhan dari sisi aksesibilitas dan kualitas penyampaian informasi terkait program atau kebijakan prioritas bidang pendidikan kepada publik melalui berbagai media resmi, untuk memastikan informasi sampai secara tepat, luas, dan mudah dipahami.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan peningkatan keterjangkauan dan mutu publikasi informasi pendidikan, yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, serta keberhasilan strategi komunikasi publik.
5	Metode / Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = ((a - b) / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun berjalan b. Nilai capaian akses dan kualitas informasi tahun sebelumnya
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah kanal/media yang digunakan untuk publikasi 2. Jumlah jangkauan atau interaksi publik terhadap informasi 3. Tingkat keterbacaan dan pemahaman konten 4. Frekuensi dan konsistensi publikasi kebijakan pendidikan 5. Penilaian kualitas konten oleh pengguna atau pemantauan internal
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Komunikasi Publik / Pendidikan / Transparansi Informasi Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.5 : Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase pemenuhan infrastruktur dari layanan dukungan TIK
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur tingkat kecukupan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang tersedia untuk mendukung layanan digital dan operasional sistem informasi di lingkungan instansi pemerintah.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur TIK (seperti jaringan, server, perangkat keras, dan pusat data) telah terpenuhi secara optimal guna mendukung kelancaran layanan digital.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah kebutuhan infrastruktur TIK yang telah terpenuhi b. Jumlah total kebutuhan infrastruktur TIK yang direncanakan
6	Nama Variabel Pembangun	1. Jumlah perangkat keras (hardware) yang tersedia 2. Jumlah kebutuhan jaringan dan konektivitas yang terpenuhi 3. Jumlah layanan server/cloud yang tersedia 4. Total kebutuhan infrastruktur yang diidentifikasi dalam perencanaan TIK
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Teknologi Informasi dan Komunikasi / Infrastruktur Digital / Dukungan Layanan Pemerintah Digital
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.6 : Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kementerian Agama
2	Nama Indikator	Persentase ketersediaan data prioritas yang selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur proporsi data prioritas yang telah tersedia dan sesuai dengan kebutuhan pengukuran indikator pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) instansi.
4	Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa instansi telah menyediakan data yang relevan dan selaras dengan perencanaan nasional dan sektoral, sehingga mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Persentase = $(a / b) \times 100\%$ Keterangan: a. Jumlah data prioritas yang tersedia dan selaras dengan indikator RPJMN dan Renstra b. Jumlah total data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator RPJMN dan Renstra
6	Nama Variabel Pembangun	1. Daftar indikator RPJMN dan Renstra yang membutuhkan data 2. Jumlah data yang telah tersedia dalam format dan frekuensi yang sesuai 3. Kesesuaian metadata dan definisi operasional data
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Persentase
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	Berdasarkan fungsi pemerintahan: Perencanaan Pembangunan / Satu Data Indonesia / Tata Kelola Data Pemerintah
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-

IKSK.15.7 : Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran		
NO	Atribut	Keterangan
1	Instansi – Unit Kerja Penghasil	Kemenkeu
2	Nama Indikator	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
3	Konsep/Definisi	Indikator ini mengukur kualitas pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja berdasarkan aspek kepatuhan, efektivitas penyerapan anggaran, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi penggunaan dana, sebagaimana dinilai oleh Kementerian Keuangan.
4	Interpretasi	Semakin tinggi nilai kinerja, menunjukkan bahwa satuan kerja semakin baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggarannya secara tertib, efisien, dan sesuai peraturan yang berlaku.
5	Metode / Rumus Perhitungan	Nilai dari Kementerian Keuangan
6	Nama Variabel Pembangun	
7	Nama Kegiatan Penghasil Variabel Pembangun	
8	Ukuran/Satuan	Nilai
9	Waktu / Cut off Ketersediaan Data	Tahunan
10	Klasifikasi	-
11	Level Estimasi	Nasional
12	Apakah indikator dapat diakses umum?	Tidak
13	Apabila dapat diakses umum, apakah sudah tersedia publikasi data? (Disebutkan nama publikasinya)	-